

LAPORAN KINERJA 2024

PEMERINTAH KOTA
MADIUN



Oleh
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Madiun tahun 2024 telah dapat diselesaikan pada waktunya dan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, maka perlu disusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas kinerja instansi tersebut dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 periode tahun 2024. Selain ini Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja maka dalam penyusunan Laporan Kinerja perlu terus diupayakan penyempurnaan, terutama dukungan ketersediaan data kinerja yang baku, valid, serta handal dari masing-masing indikator kinerja.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan masyarakat dan pembangunan, maupun dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Madiun, maka masukan dari semua pihak sangat diharapkan, sehingga akan memberikan dukungan terhadap terwujudnya *good governance* di Kota Madiun.

Madiun, Maret 2025

WALI KOTA MADIUN



Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	KP – 1
DAFTAR ISI.....	DI – 1
RINGKASAN EKSEKUTIF	RE – 1
BAB I PENDAHULUAN	BAB I – 1
A. Gambaran Umum Daerah	BAB I – 4
B. Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	BAB I – 42
C. Sistematika.....	BAB I – 50
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	BAB II – 1
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024	BAB II – 2
B. Perjanjian Kinerja.....	BAB II – 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	BAB III – 1
A. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	BAB III – 2
1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	BAB III – 2
2) Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	BAB III – 3
1. Misi Pertama : Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	BAB III – 7
2. Misi Kedua : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.....	BAB III – 34
3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.....	BAB III – 45



4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan
memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota

Madiun..... BAB III – 63

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB III – 102

BAB IV PENUTUP..... BAB IV – 1

A. Kesimpulan..... BAB IV – 1

B. Permasalahan BAB IV – 2

C. Upaya Meningkatkan Kinerja..... BAB IV – 4



RINGKASAN EKSEKUTIF

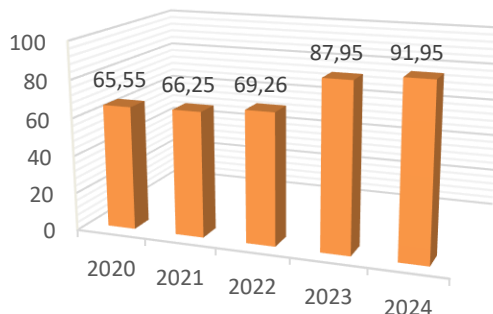
Laporan Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis dan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. Terdapat 5 tujuan dan 11 sasaran strategis tahun 2024 di Pemerintah Kota Madiun. Capaian kinerja dari 7 indikator tujuan adalah 5 indikator tercapai, 1 indikator tidak tercapai, 1 indikator belum bisa dihitung capaiannya karena Lembaga penghitung data tidak melakukan penghitungan sehingga angka terakhir hanya sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk indikator sasaran secara umum tercapai yaitu 15 indikator tercapai, 2 indikator tidak tercapai. Keberhasilan program-program di Pemerintah Kota Madiun sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh komponen baik internal maupun eksternal. Uraian tingkat ketercapaian atau ketidaktercapaian indikator lebih detil diuraikan pada BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Adapun pencapaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tidak hanya menyajikan data tahun 2024 saja melainkan juga pencapaian target tahun keempat RPJMD 2019-2024.

Tujuan 1:
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities

Indeks RB Kota Madiun sampai dengan 2024

Target	Realisasi	Capaian
87,95 (A-)	91,95	103,49%



Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)

Target	Realisasi	Capaian
80,08 (A)	81,03 (A)	101,18%

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Target	Realisasi	Capaian
2,98	3,2179	107,98

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target	Realisasi	Capaian
4,45	4,57	102,69%



Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Target	Realisasi	Capaian
88,028	88,74	100,81%

Indeks Inovasi Daerah

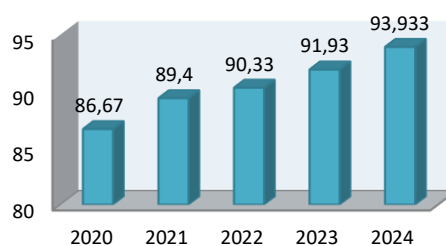
Target	Realisasi	Capaian
53,96	67,09	124,33%

Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

Indeks Kenyamanan Kota (Liveable City)

Target	Realisasi	Capaian
91,93	93,933	101,52

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)



Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

Indeks Infrastruktur

Target	Realisasi	Capaian
98,59	98,59	100%

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Target	Realisasi	Capaian
57,93	62,21	107,39%

Tujuan 3:

Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

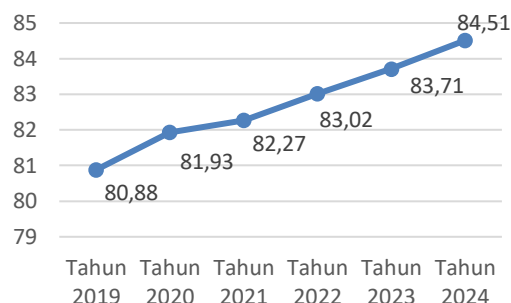
Indeks Pembangunan Manusia

Target	Realisasi	Capaian
83,71	84,51	100,96

Indeks Pembangunan Gender

Target	Realisasi	Capaian
95,18	95,26	100,08

Indeks Pembangunan Manusia



Sasaran 5:

Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

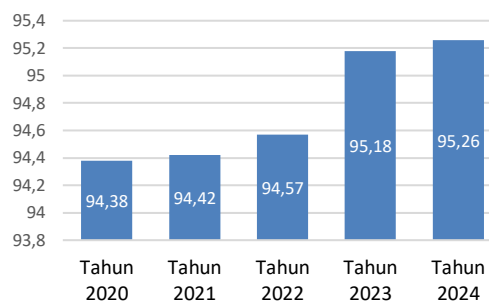
Harapan Lama Sekolah

Target	Realisasi	Capaian
14,42	14,54	100,76%

Rata-rata Lama Sekolah

Target	Realisasi	Capaian
11,67	12,11	103,77%

Indeks Pembangunan Gender



Sasaran 6:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup

Target	Realisasi	Capaian
73,13	75,67	103,47%

Sasaran 7:

Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender

Target	Realisasi	Capaian
77,22	76,51	99,08%

Tujuan 4:

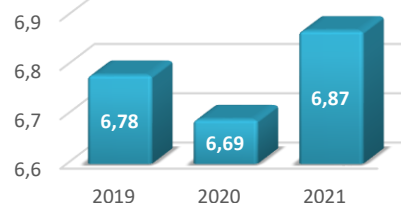
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Target	Realisasi	Capaian
6,40	6,87**	107,34

**Realisasi Tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak rilis

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif





Sasaran 8: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka

Target	Realisasi	Capaian
5,00	4,30	114%

Sasaran 9: Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

% Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Target	Realisasi	Capaian
7,98	4,59	57,51%

% Pertumbuhan PDRB sektor jasa

Target	Realisasi	Capaian
21,57	30,48	141,30%



Tujuan 5: Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Indeks Ketenteraman

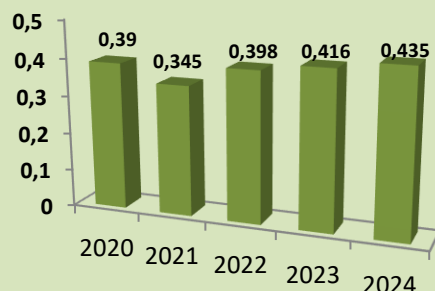
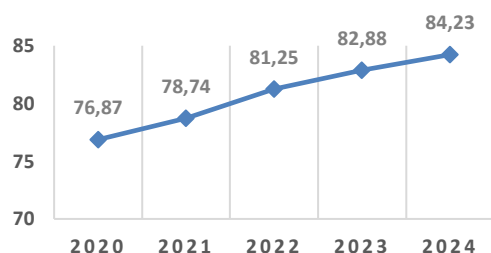
Target	Realisasi	Capaian
82,88	84,23	101,63%

Indeks Gini

Target	Realisasi	Capaian
0,39	0,416*	93,33%

*Realisasi Tahun 2023, 2024 belum rilis

INDEKS KETENTERAMAN



Sasaran 11: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Indeks Kerukunan

Target	Realisasi	Capaian
77,8	78,04	100,31%

Indeks Rasa Aman

Target	Realisasi	Capaian
83,31	84,16	101,02%

Sasaran 10: Meningkatnya Pemberdayaan Gender

Angka Kemiskinan

Target	Realisasi	Capaian
4,45	4,38	101,57%



BAB I

PENDAHULUAN

Birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah dan fleksibel berintegritas dan memiliki budaya melayani, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menjawab dan menyelesaikan isu strategis di tengah masyarakat, yaitu isu kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi pemerintahan.

Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas.

Tata kelola pemerintahan yang baik diawali dari aparatur pemerintah, sehingga reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak yang jelas dan diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Pejabat publik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.



Laporan kinerja dihasilkan oleh suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas pelaporan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 merupakan capaian kinerja yang disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun Tahun 2023, yang penyusunannya berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kota Madiun merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Madiun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun tahun 2023 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kota Madiun dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Madiun adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Madiun. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Kota Madiun untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Madiun;

2. Menjadikan Pemerintah Kota Madiun yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Mejadikan masukan dan umpan balik bagi penyusunan perencanaan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagai upaya dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Madiun guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Madiun terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Madiun.

A. Gambaran Umum Daerah

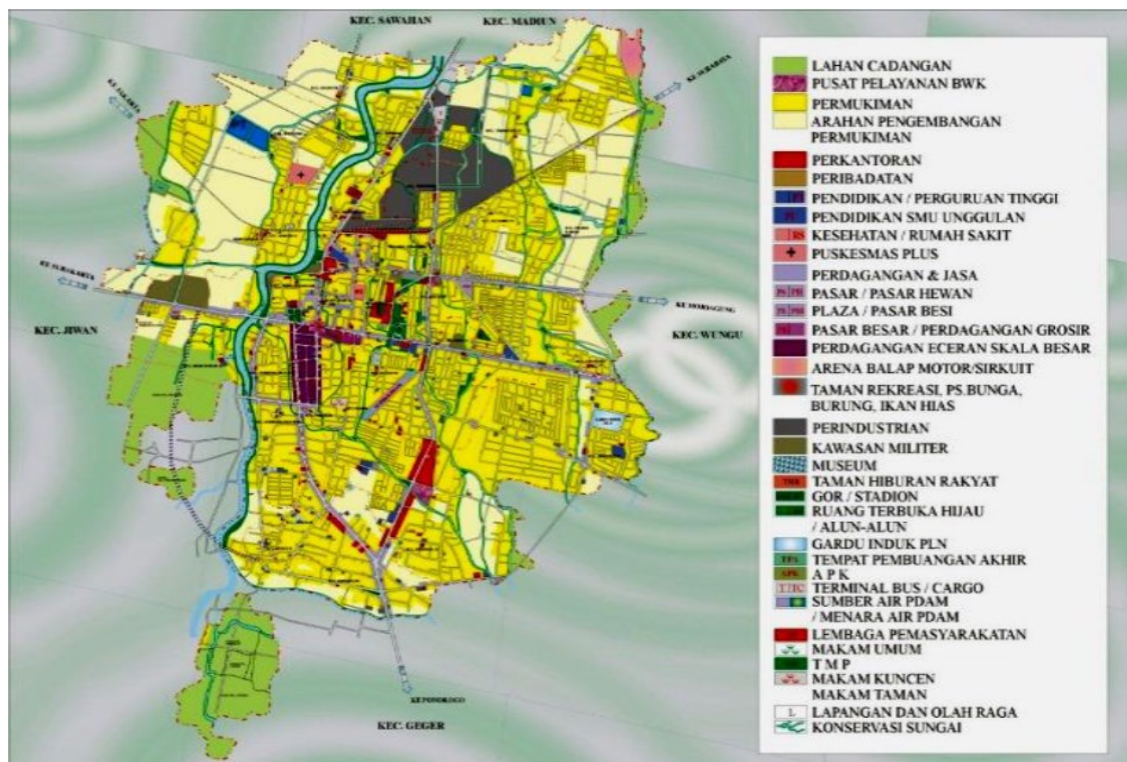
1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan daerah dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat. Kota Madiun mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga posisi ini menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi

Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat.

Secara astronomis Kota Madiun terletak di dataran rendah antara 70-80 Lintang Selatan, dan antara 1110-1120. Letak Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 meter di atas dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 200C hingga 350C. Rata-rata curah hujan pada tahun 2011 di Kota Madiun antara 229 mm sampai 413 mm. Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun.

Gambar I.1. Wilayah Administrasi Kota Madiun



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.

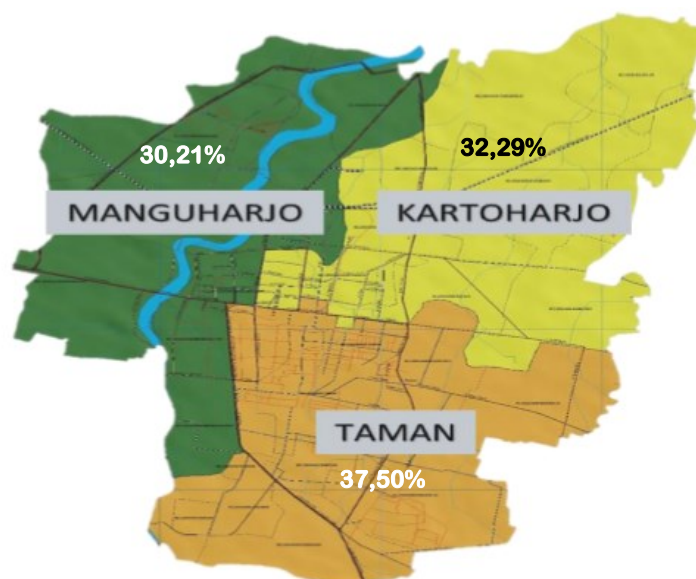
Batas-batas wilayah Kota Madiun

Sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun	Sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun	Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan
---	--	--	--

Kota Madiun mempunyai luas wilayah 33,23 km² dan terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, yaitu meliputi :

- ✚ Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km² (30,21%)
- ✚ Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² (37,50%)
- ✚ Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km² (32,29%)

Gambar I.2. Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan



Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan, Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan. Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- ✚ Kecamatan Manguharjo terdiri dari 324 RT dan 88 RW ;
- ✚ Kecamatan Taman terdiri dari 396 RT dan 107 RW;
- ✚ Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			RW	RT
I.	Manguharjo	10,04	88	325
1.	Manguharjo	1,40	8	36
2.	Sogaten	1,12	9	29
3.	Patihan	0,84	6	22
4.	Ngegong	1,34	5	17
5.	Winongo	2,00	11	37
6.	Madiun Lor	0,73	9	41
7.	Pangongangan	0,61	9	26
8.	Nambangan Lor	0,98	16	71
9.	Nambangan Kidul	1,02	15	46
II.	Taman	12,46	107	399
1.	Mojorejo	1,54	14	65
2.	Pandean	0,32	18	61
3.	Banjarejo	1,92	9	35
4.	Kuncen	1,83	4	9
5.	Manisrejo	0,92	12	60
6.	Kejuron	1,59	15	50

No.	Kecamatan / Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah	
			RW	RT
7.	Josenan	1,06	9	31
8.	Demangan	1,26	11	36
9.	Taman	2,02	15	52
III.	Kartoharjo	10,73	74	309
1.	Kartoharjo	0,94	9	38
2.	Oro-Oro Ombo	0,81	9	43
3.	Klegen	0,84	10	48
4.	Kanigoro	1,62	12	52
5.	Pilangbango	1,21	5	22
6.	Rejomulyo	2,03	11	38
7.	Sukosari	0,55	6	18
8.	Tawangrejo	1,77	6	24
9.	Kelun	0,96	6	26
Jumlah		33,23	269	1.033

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun

Berdasarkan kondisi topografi wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian $\pm$ 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 meter dpl dan selanjutnya menurun hingga 63 meter dpl, sedang di bagian utara kota, ketinggian rata-rata mencapai 64 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun terletak di lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari



daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m – 500 m.

2. Kondisi Demografis

Dikarenakan Laporan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, maka data penduduk yang dipakai berdasarkan Laporan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 Per 30 Juni 2024. Jumlah Penduduk Kota Madiun adalah 201.854 jiwa, sedangkan data per 31 Desember 2023 menunjukkan angka 202.544 jiwa. Pertumbuhan penduduk diantaranya dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan perpindahan.

Berdasarkan Laporan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun menurut kelompok umur, jenis Kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.2. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan per-31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARTOHARJO	27.396	28.559	55.955
2	MANGUHARJO	29.736	30.601	60.337
3	TAMAN	41.945	43.496	85.441
	KOTA MADIUN	99.077	102.656	201.733

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2024



Tabel I.3. Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan per-31 Desember 2024

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KARTOHARJO	15.114	5.327	20.441
2	MANGUHARJO	16.513	6.163	22.676
3	TAMAN	22.796	8.054	30.850
	KOTA MADIUN	54.423	19.544	73.967

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2024

Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2020 s/d 30 Juni 2024 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel I.4. Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Jenis Kelamin per-Kecamatan per-31 Desember 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	32.536	33.177	33.495	35.511	31.762
Belum Tamat SD			18.483	18.156	17.276
Tamat SD;	28.253	26.006	24.843	24.581	23.102
Tamat SLTP;	28.048	26.027	25.314	25.190	24.568
Tamat SLTA;	73.008	69.421	70.350	70.792	72.893
Tamat D-I/II;	502	519	553	563	618
Tamat D-III;	5.912	5.770	6.033	6.145	6.541
Tamat S-1;	20.536	20.170	21.152	21.544	23.264
Tamat S-2;	1.417	1.415	1.490	1.524	1.650
Tamat S-3.	39	41	47	49	59

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Tahun 2024



**Tabel I.5. Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
per 30 Desember 2024**

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Belum/ Tidak Bekerja	35.059
2	Mengurus Rumah Tangga	32.556
3	Pelajar/ Mahasiswa	39.797
4	Pensiunan	5.982
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5.714
6	TNI	1.629
7	POLRI	981
8	Karyawan BUMN	1.529
9	Karyawan BUMD	192
10	Karyawan Swasta	46.585
11	Buruh/ Tukang	5.423
12	KDH, WKDH, DPR, DPRD	11
13	Guru/Dosen	2.252
14	Agamawan	64
15	Kesehatan	801
16	Pedagang	2.047
17	Pekerjaan Lainnya	21.111
	JUMLAH	201.733

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2024

Mayoritas pekerjaan penduduk Kota Madiun pada triwulan II Tahun 2024 masih didominasi oleh karyawan swasta. Dimana jumlah karyawan swasta berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 46.585 orang atau sebesar 23,09%. Apabila dibandingkan dengan data pada triwulan I tahun 2024 (45.825 orang atau 22,86%) meningkat sebesar 0,23%.

Pertumbuhan adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah



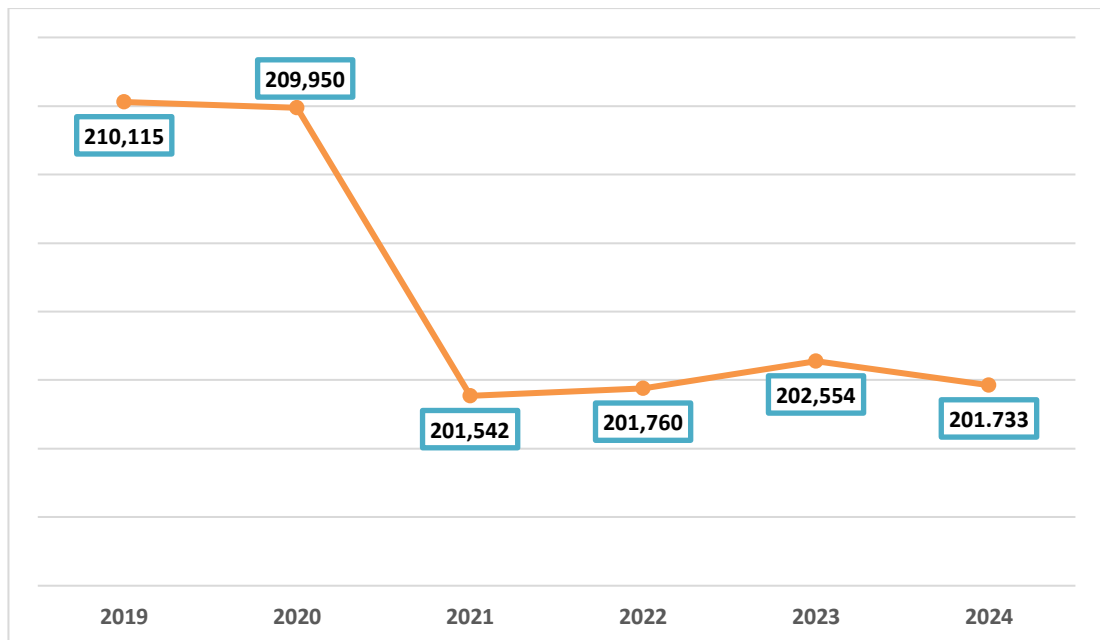
penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan proyeksi jumlah penduduk dimasa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Pertumbuhan penduduk dihitung menggunakan variabel jumlah penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Sistem pengolahan data penduduk Kota Madiun yang sedianya menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terdistribusi, dimana database berada di daerah yaitu Kota Madiun sehingga pengolahan data didasarkan pada database pelayanan tersebut. Kemudian mulai tanggal 15 Desember 2020 telah diterapkan SIAK Terpusat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019. SIAK terpusat merupakan sistem data administrasi kependudukan (Adminduk) yang disusun berdasarkan prosedur dan memakai standarisasi khusus dimana data langsung masuk pada database dipusat yang dikelola oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga mewajibkan daerah menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan tiap semester oleh pusat.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun selama periode 2019-2024 mengalami kenaikan dan penurunan. Selama periode tersebut, persentase laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,39%. Pada tahun 2023 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 794 penduduk dari tahun 2022. Sedangkan adanya penurunan penduduk di mulai Tahun 2020 dan Tahun 2021 dikarenakan data penduduk yang pengolahannya hanya bisa didasarkan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, sehingga menimbulkan perbedaan jumlah penduduk dari

tahun-tahun sebelumnya antara Database Pelayanan pada SIAK Terdistribusi, dibandingkan dengan Database SIAK Terpusat.

Pada Agustus Tahun 2024 laju pertumbuhan penduduk sebesar 201.854, ini terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 202.554. pada tahun 2024 per bulan Agustus terjadi penurunan penduduk sebesar 700 penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Grafik I.1. Laju Pertumbuhan Penduduk



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun 2024

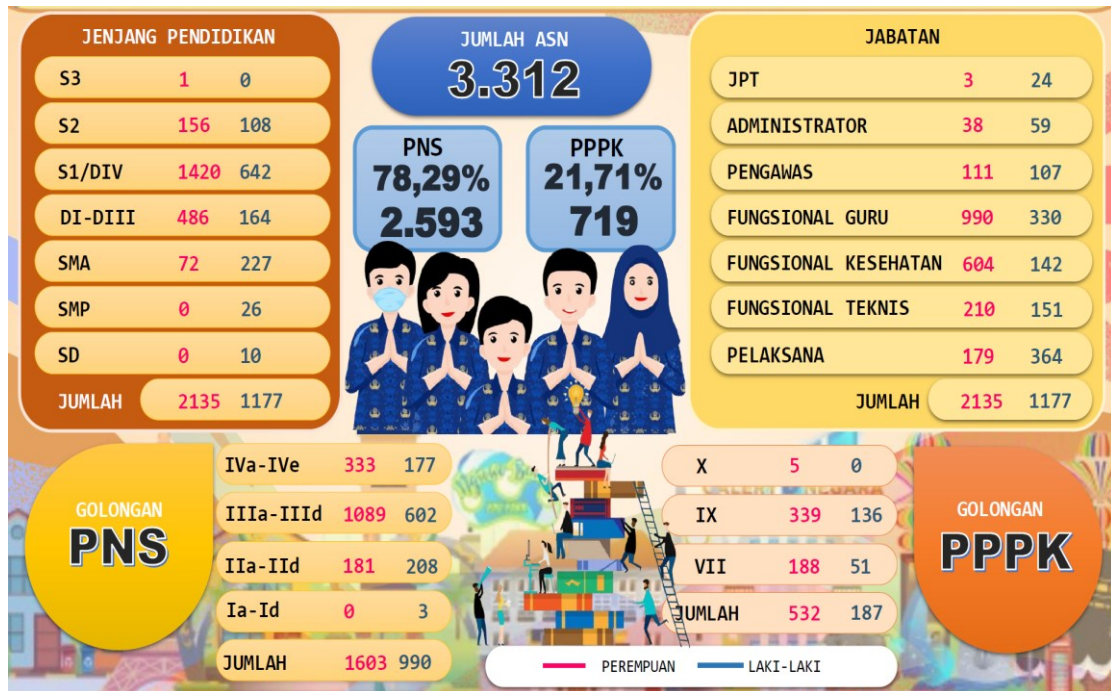
Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2024 cenderung merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.441 jiwa (42,35 %) disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.337 jiwa (29.90 %), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.955 jiwa (27,73%).

3. Jumlah ASN dan PPPK

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam Pemerintahan, sumber daya manusia lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualitas diri yang lebih inovatif, kreatif dan visioner dalam memberikan pelayanan publik dan mendorong birokrasi yang ada menjadi birokrasi yang lebih responsif dan adaptif (agile) sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Kota Madiun.

Di Kota Madiun, Jumlah ASN berstatus aktif sampai dengan 1 Desember 2024 adalah 3.312 yang terdiri dari PNS sejumlah 2.593 (78,29%%) dan PPPK 719 (21,71%). Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci ASN Pemerintah Kota Madiun berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan sebaran PNS di Perangkat Daerah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.6 Statistik Aparatur Sipil Negara Tahun 2024



Sumber : BKPSDM Kota Madiun 2024

Tabel 1.7 Sebaran Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH	PNS		PPPK		Jumlah
	P	L	P	L	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17	22	0	0	39
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	15	0	0	20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	18	15	0	0	33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	0	10
Badan Pendapatan Daerah	10	15	0	0	25
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9	16	0	0	25
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	9	15	0	0	24
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	9	0	0	28
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	448	117	248	58	871
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17	10	0	0	27
Dinas Komunikasi dan Informatika	9	22	0	0	31
Dinas Lingkungan Hidup	15	47	0	0	62
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	29	0	0	43
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	10	0	0	23

PERANGKAT DAERAH	PNS		PPPK		Jumlah
	P	L	P	L	
Dinas Pendidikan	754	277	283	129	1443
Dinas Perdagangan	7	55	0	0	62
Dinas Perhubungan	9	38	0	0	47
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	10	0	0	23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	22	0	0	34
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	8	0	0	26
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	14	12	1	0	27
Inspektorat Daerah	17	25	0	0	42
Kecamatan Kartoharjo	29	34	0	0	63
Kecamatan Manguharjo	28	34	0	0	62
Kecamatan Taman	34	32	0	0	66
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13	32	0	0	45
Sekretariat Daerah	38	57	0	0	95
Sekretariat DPRD	9	7	0	0	16

Sumber : BKPSDM Kota Madiun 2024

Tabel 1.8 Jumlah Aparatur Sipil Negara per Perangkat Daerah berdasarkan Tingkat Pendidikan per-Desember 2024

OPD	PNS					PPPK					Jumlah
	S3	S2	S1/D4	D1-D3	SMA SMP SD	S3	S2	S1/D4	D1-D3	SMA SMP SD	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	7	17	10	5	0	0	0	0	0	39
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5	8	3	4	0	0	0	0	0	20
Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	6	15	6	6	0	0	0	0	0	33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	5	2	2	0	0	0	0	0	10
Badan Pendapatan Daerah	0	3	14	4	4	0	0	0	0	0	25
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	9	13	3	0	0	0	0	0	0	25
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	0	3	15	3	3	0	0	0	0	0	24
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	6	16	4	2	0	0	0	0	0	28
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	49	236	252	28	0	5	62	239	0	871
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6	14	6	1	0	0	0	0	0	27
Dinas Komunikasi dan Informatika	0	5	13	8	5	0	0	0	0	0	31
Dinas Lingkungan Hidup	0	3	18	4	37	0	0	0	0	0	62
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	2	18	10	13	0	0	0	0	0	43
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	4	15	2	2	0	0	0	0	0	23
Dinas Pendidikan	1	91	857	15	67	0	0	412	0	0	1443
Dinas Perdagangan	0	3	15	4	40	0	0	0	0	0	62
Dinas Perhubungan	0	2	13	11	21	0	0	0	0	0	47
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	11	9	2	0	0	0	0	0	23
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0	2	14	6	12	0	0	0	0	0	34
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	6	15	2	3	0	0	0	0	0	26
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	0	7	13	3	3	0	0	1	0	0	27
Inspektorat Daerah	0	7	31	2	2	0	0	0	0	0	42
Kecamatan Kartoharjo	0	4	42	8	9	0	0	0	0	0	63
Kecamatan Manguharjo	0	3	36	7	16	0	0	0	0	0	62
Kecamatan Taman	0	7	40	8	11	0	0	0	0	0	66
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	3	23	10	9	0	0	0	0	0	45
Sekretariat Daerah	0	11	50	9	25	0	0	0	0	0	95
Sekretariat DPRD	0	3	10	0	3	0	0	0	0	0	16
TOTAL	1	259	1587	411	335	0	5	475	239	0	3312

Sumber : BKPSDM Kota Madiun 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di lingkungan triwulan III Tahun 2024, sebagian besar tingkat pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun berpendidikan Diplomas IV/Sarjana (S1) yaitu sebanyak 2.059 orang dan ASN berpendidikan Magister/Pascasarjana (S2) sebanyak 263 orang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun didominasi pada ASN dengan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi yang sangat potensial untuk memenuhi kinerja yang ditargetkan.

4. Kondisi Makro Ekonomi

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2024 disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.8. Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2023-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	83,71	84,51
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,80	5,73
3	Inflasi	Persen	2,35	1,31
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,85	4,30
5	Kemiskinan	Persen	4,74	4,38

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2024

1.3.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator yang

digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum dapat dikatakan bahwa naiknya angka IPM menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam periode lima tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan terutama di Tahun 2024. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Peningkatan pertumbuhan IPM Tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan seluruh indikator pembentuknya baik indeks Kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Gambar I.3. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024



Sumber : BPS 2024

Di tahun 2024 IPM di Kota Madiun yaitu 84,51 (sangat tinggi), mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 83,71 dengan pertumbuhan sebesar 0,95%

Tabel I.9 IPM Kota Madiun Menurut Komponen Tahun 2024

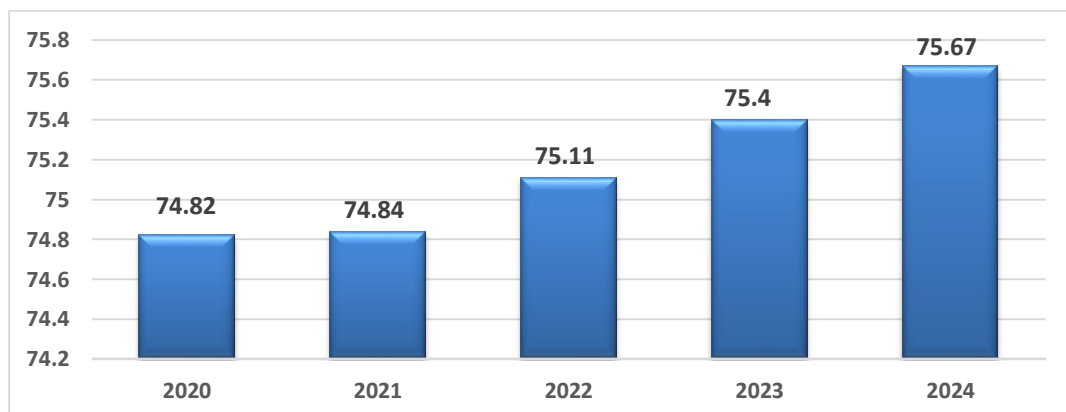
Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) dalam Ribu Rupiah
2020	74,82	14,39	11,14	16.018
2021	74,84	14,41	11,37	16.095
2022	75,11	14,43	11,67	16.503
2023	75,40	14,44	11,82	17.115
2024	75,67	14,54	12,11	17.518

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024

a) Dimensi Umur Panjang dan Umur Sehat

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2020 hingga 2024, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 yaitu dari 74,82 tahun (2020) menjadi 75,67 (2024) atau naik sebesar 0,85 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Grafik I.2. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Kota Madiun, 2020-2024



Sumber : BPS Kota Madiun 2024

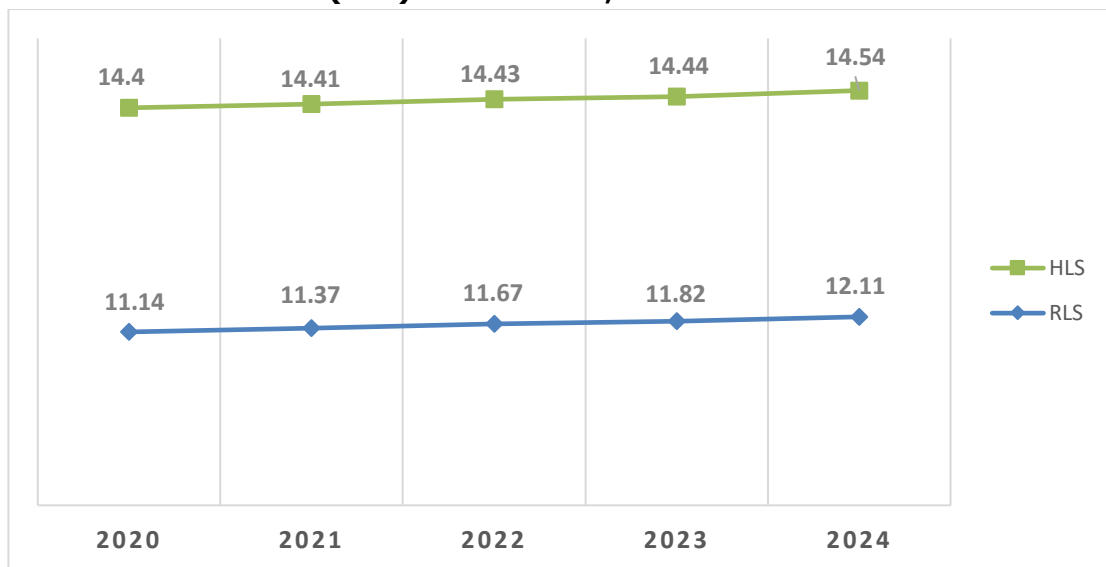
b) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2024, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,54 tahun (2024) atau naik sebesar 0,15 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2024, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar 12,11 atau naik 0,29 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 11,82. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Peningkatan capaian kinerja HLS dan RLS dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik I.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Madiun, 2020-2024

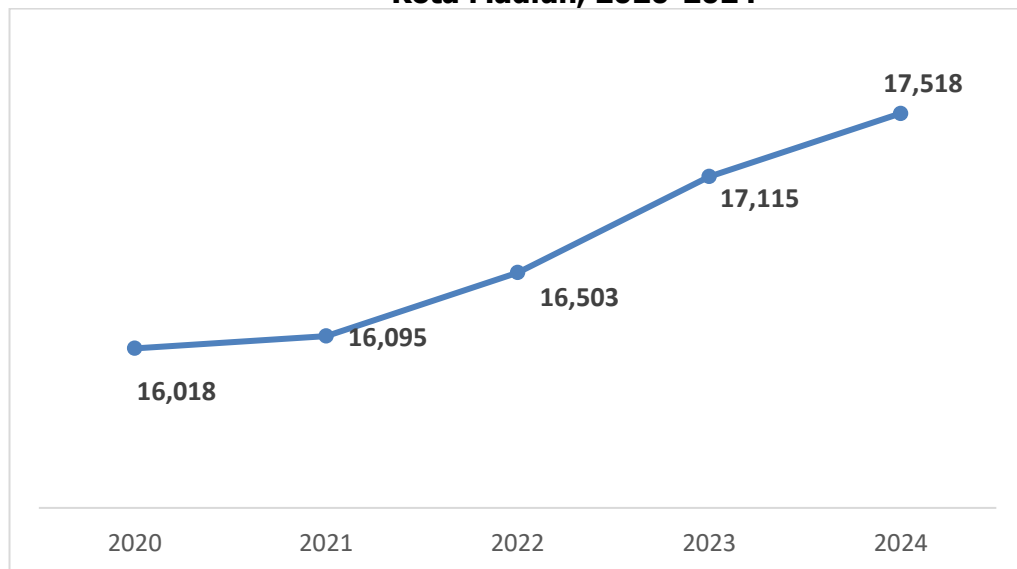


Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 17,518 juta per tahun, naik sekitar 2,35% dibanding tahun 2023 lalu yaitu sebesar 17,115 juta per tahun. Pada periode tahun 2020 sampai dengan 2024 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mengalami kenaikan sebagaimana table berikut.

**Grafik I.4 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)
Kota Madiun, 2020-2024**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

1.3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun

berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel I.10. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)**

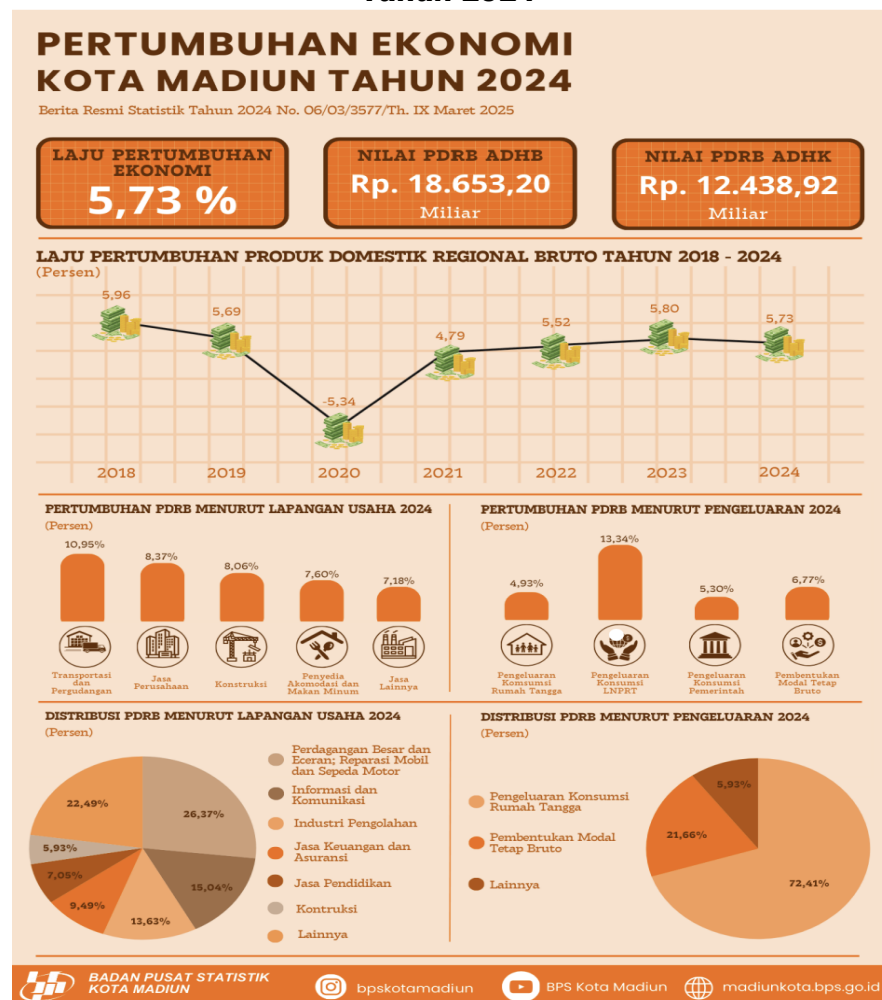
Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2024	18.863,20	12.438,92
2023	17.256,22	11.764,40
2022	15.818,60	11.119,55
2021	14.435,43	10.537,70
2020	13.519,88	10.055,91

Sumber : BPS Kota Madiun 2024

PDRB Kota Madiun selama periode 2020-2024 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai Rp 13.519,88 triliun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 14.435,43 triliun. Namun, pada tahun 2022 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 15.818,60 triliun, kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 17.257,23 triliun, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp. 18.863,20. Ekonomi Kota Madiun Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,73% sedikit melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,80%. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2024,

dari sisi produksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 10,95 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 13,34 persen. Struktur ekonomi kota Madiun tahun 2024, dari sisi produksi didominasi Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,37 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 72,41 persen.

Gambar I.4. Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024



Sumber : BPS Kota Madiun 2024

**Tabel I.11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2023-2024 (%)**

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan		Distribusi	
		2023	2024	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,79	5,04	0,71	0,71
B	Pertambangan dan Penggalian	(5,53)	-29,43	0,02	0,01
C	Industri Pengolahan	7,98	6,36	13,56	13,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,38	6,39	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,21	4,81	0,21	0,21
F	Konstruksi	4,83	8,06	5,83	5,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,60	4,59	26,71	26,37
H	Transportasi dan Pergudangan	11,64	10,95	4,52	4,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	7,60	5,22	5,40
J	Informasi dan Komunikasi	6,17	4,93	15,25	15,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	3,87	9,67	9,49
L	Real Estate	4,35	3,91	2,54	2,46
M,N	Jasa Perusahaan	6,12	8,37	0,68	0,69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,51	7,10	2,70	2,82
P	Jasa Pendidikan	3,17	5,96	6,97	7,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,20	5,10	1,49	1,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,39	7,18	3,85	3,92
Produk Domestik Regional Bruto		5,80	5,73	100	100
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		5,80	5,73	100	100

Sumber : BPS 2024

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2019-2024 mendominasi lebih tinggi dari daerah sekitar. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi

tertinggi pada tahun 2024 adalah masih tetap Kota Madiun dengan 5,73%. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel I.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2020-2024**

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pacitan	-1,84	2,49	5,54	4,46	4,34
Kabupaten Ponorogo	-0,90	3,19	3,24	5,14	4,74
Kabupaten Madiun	-1,69	3,34	4,32	5,12	4,68
Kabupaten Magetan	-1,64	3,04	3,89	4,47	4,79
Kabupaten Ngawi	-1,69	2,55	3,19	4,49	4,64
Kota Madiun	-5,34	4,79	5,52	5,80	5,73

Sumber: BPS Jawa Timur 2024

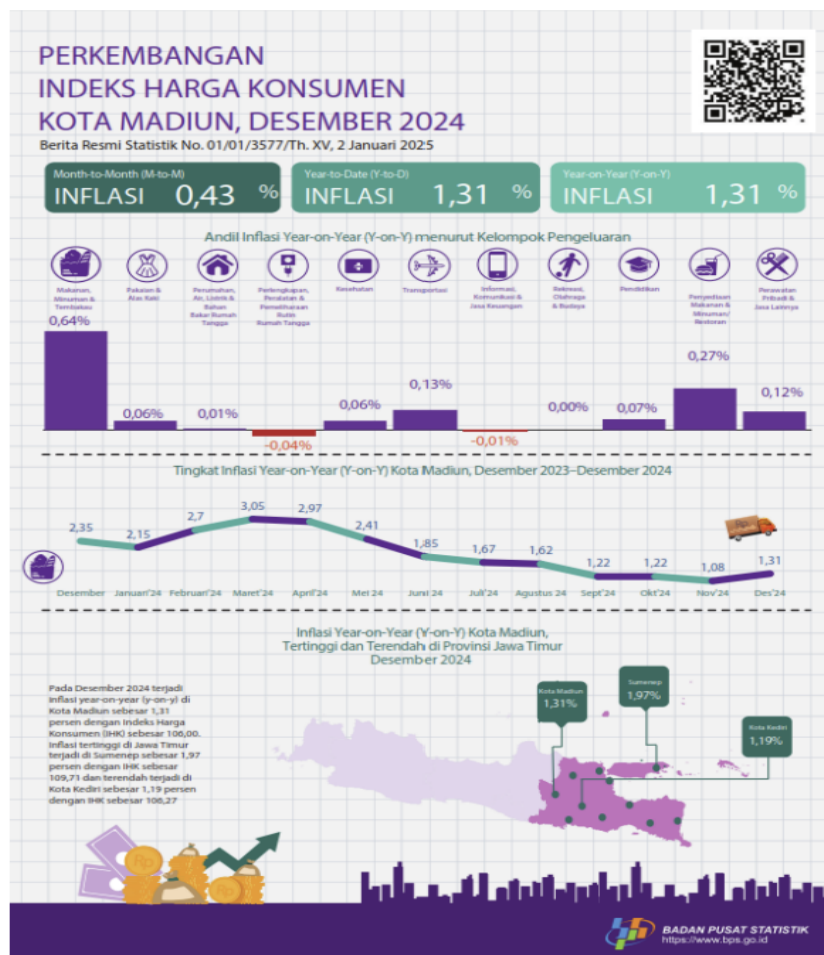
1.3.3. Inflasi

Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintamasyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

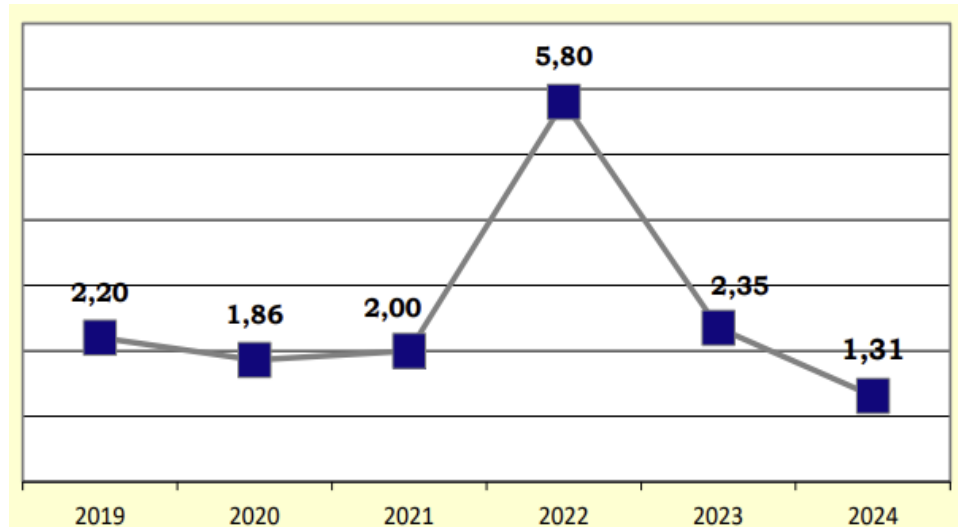
Tingkat inflasi Kota Madiun mengalami inflasi Inflasi Month to month (mtm) 0,43% dan year on year (yoy) Desember tahun 2024 sebesar 1,31% di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Inflasi yoy Desember 2024 dipicu karena kenaikan harga dibandingkan Desember tahun lalu pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan

tembakau mengalami inflasi yoy 2,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,45 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,04 persen; kelompok Kesehatan sebesar 1,72 persen, kelompok transportasi sebesar 1,05 persen, kelompok Pendidikan 1,32 persen, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran 1,98 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,53 persen. Sementara itu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi yoy sebesar 0,81 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,09 persen; rekreasi, olah raga dan jasa lainnya 0,02 persen.

Gambar I.5. Perkembangan IHK Kota Madiun per Desember 2024



Sumber : BPS 2024

**Grafik I.5. Perkembangan Tingkat Inflasi YoY Kota Madiun
Tahun 2020-2024**

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024, data diolah

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa inflasi Kota Madiun yoy tahun 2024 terjaga cukup stabil dan terkendali pada rentang target sasaran 2,5%+1 yakni mencapai 1,31% (yoy) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2023 yakni sebesar 2,35%. Sepanjang tahun 2024, Pemerintah Kota Madiun terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kebijakan tersebut antara lain melalui program Warung Tekan inflasi (WARTEK), Program Toko Acuan, pemantauan ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas, Operasi Pasar, rapat koordinasi antar stakeholder dan Gerakan Pangan Murah, Berbagai program kebijakan yang disinergikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan. Kedepan, Pemerintah Kota Madiun akan terus mewaspadaikan dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi.

Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,36%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain telur ayam ras, cabai rawit, jeruk, bawang merah dan cabai merah.

Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara y-on-y adalah:

1. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,64%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng, dan telur ayam ras
2. Kelompok Penyediaan Makanan, Minuman/ Restoran dengan andil 0,27%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah kopi siap saji, teh siap saji, bakso siap santap, soto, dan kue kering berminyak
3. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,12%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, sabun mandi, dan tisu

Gambar I.6. Inflasi Desember 2024 Bulan ke Bulan

INFLASI DESEMBER 2024

Inflasi Bulan ke Bulan
(Desember 2024 terhadap November 2024)

0,43%

Inflasi Tahun ke Tahun
(Desember 2024 terhadap Desember 2023)

1,31%

Perkembangan inflasi bulan ke bulan (%)



Inflasi m-to-m Bulan Desember 2024 Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan Desember 2023

Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)

Rincian	Inflasi	Andil inflasi
Inflasi Umum	0,43	0,43
Menurut Kelompok Pengeluaran		
1 Makanan, Minuman, dan Tembakau	1,34	0,36
2 Pakaian dan Alas Kaki	0,49	0,02
3 Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,04	-0,01
4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,06	0,00
5 Kesehatan	0,10	0,00
6 Transportasi	0,21	0,03
7 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,00	0,00
8 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,26	0,01
9 Pendidikan	0,00	0,00
10 Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	0,05	0,01
11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,19	0,01

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

Gambar I.7. Inflasi Desember 2024 (y-o-y)



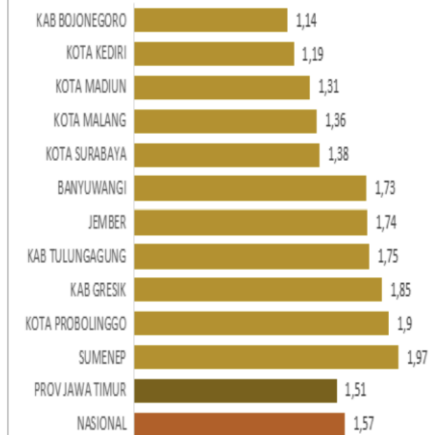
Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

Gambar I.8. Inflasi Desember 2024 Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional, Antar Kota di Jawa Timur



INFLASI ANTARKOTA DI JAWA TIMUR, DESEMBER 2024

Kode Kota	Nama Kota	IHK	Inflasi m-to-m	Inflasi y-on-y
3500	PROV JAWA TIMUR	107,11	0,46	1,51
3504	KAB TULUNGAGUNG	107,54	0,43	1,75
3509	JEMBER	107,09	0,54	1,74
3510	BANYUWANGI	107,32	0,43	1,73
3522	KAB BOJONEGORO	108,34	0,58	1,14
3525	KAB GRESIK	105,74	0,44	1,85
3529	SUMENEP	109,71	0,31	1,97
3571	KOTA KEDIRI	106,27	0,52	1,19
3573	KOTA MALANG	106,94	0,46	1,36
3574	KOTA PROBOLINGGO	107,18	0,28	1,9
3577	KOTA MADIUN	106	0,43	1,31
3578	KOTA SURABAYA	107,11	0,44	1,38



Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 1,97 persen dan terendah terjadi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 1,14 persen.

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

1.3.4. Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 163.080 ribu orang, naik sebanyak 1,652 ribu orang dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 115.142 orang (2,94 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 110.196 orang penduduk yang bekerja dan 4.946 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.290 orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 4.883 orang dan pengangguran turun sebanyak 1.593 orang.

**Tabel I.12. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja,
Agustus 2023–Agustus 2024**

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan	
	orang	orang	2024- 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	161.428	163.080	1.652	1,02
Angkatan Kerja	111.852	115.142	3.290	2,94
- Bekerja	105.313	110.196	4.883	4,64
- Pengangguran	6.539	4.946	-1.593	-24,36
Bukan Angkatan Kerja	49.576	47.938	-1.638	-3,30
	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,85	4,30	-1,55	
- Laki-laki	6,07	4,46	-1,61	
- Perempuan	5,57	4,11	-1,46	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,29	70,60	1,31	
- Laki-Laki	78,69	78,87	0,18	
- Perempuan	60,42	62,81	2,39	

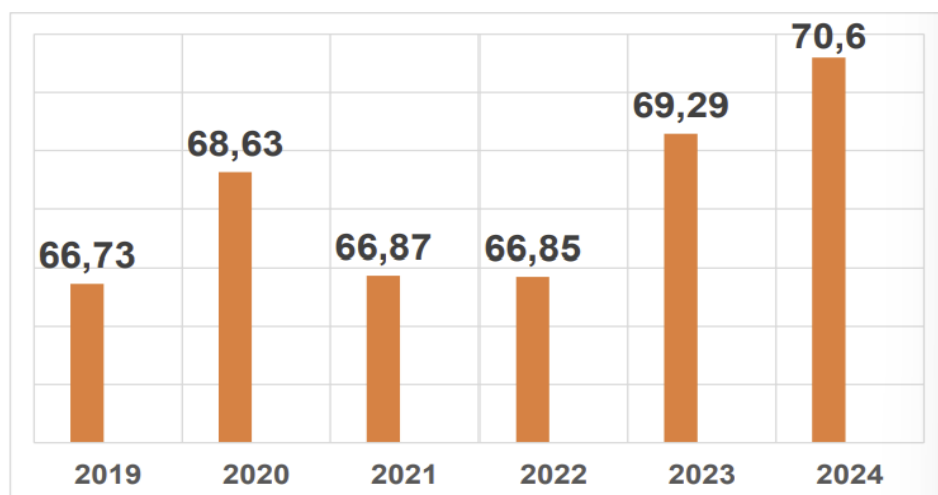
Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

Pengangguran terbuka atau sering disebut dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,30 persen, turun 1,55 poin persen dibanding Agustus 2023.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,60 persen, naik 1,31 poin persen dibanding Agustus 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 78,87 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 62,81 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin persen dan TPAK perempuan juga mengalami kenaikan sebesar 2,39 poin persen.

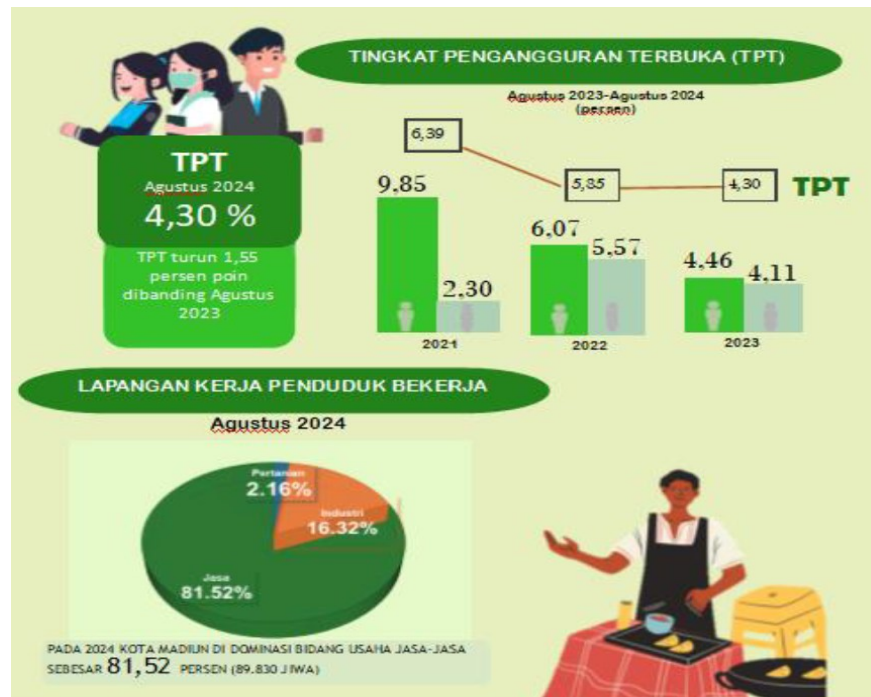
**Grafik I.6. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2019-2024**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,30 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur.

**Gambar I.9. Keadaan Ketenagakerjaan Kota Madiun
Keadaan Agustus 2024**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

1.3.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Upaya nyata di berbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun demi tercapainya upaya pengentasan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus

dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, Profil Kemiskinan di Jawa Timur, selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun berkurang sebanyak 0,62 ribu jiwa, dari 8,46 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 7,84 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 7,32 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu tahun juga mengalami penurunan sebesar 0,36 persen poin, dari 4,74 persen pada Maret 2023 menjadi 4,38 persen pada Maret 2024.

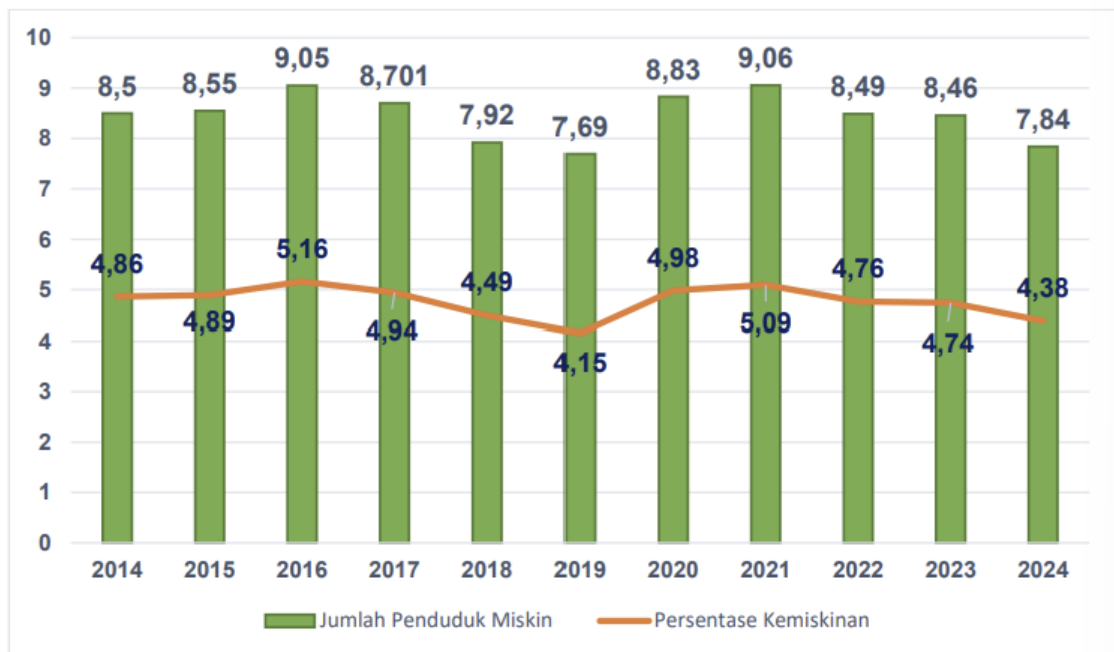
Gambar I.10. Profil Kemiskinan di Kota Madiun per Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun Tahun 2024

Secara umum, dalam periode 2014-2024 tingkat kemiskinan di Kota Madiun cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 8,50 ribu jiwa, berkurang sebesar 0.66 ribu jiwa menjadi 7,84 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kota Madiun pada tahun 2014 sebesar 4.86 persen, berkurang sebesar 0.48 poin atau menjadi 4,38 persen pada tahun 2024. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Madiun tahun 2014 sampai dengan 2024 seperti pada Grafik I.7.

Grafik I.7. Jumlah dan % Penduduk Miskin, Maret 2014-Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024

Sedangkan Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Kota Madiun pada Maret 2024 adalah sebesar Rp 637.838,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023 yang memiliki Garis Kemiskinan sebesar Rp 605.131,00, dengan kata lain Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp 32.707,00 per kapita per bulan. Apabila dibandingkan sepuluh tahun yang lalu garis kemiskinan Kota Madiun naik sebanyak RP 299.229,00 ribu rupiah atau naik sebesar 88 persen.

Tabel I.13. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun, 2014-2024

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	338.609,00	8,50	4,86
2015	359.771,00	8,55	4,89
2016	376.956,00	9,05	5,16
2017	404.959,00	8,70	4,94
2018	446.525,00	7,92	4,49
2019	478.304,00	7,69	4,35
2020	497.628,00	8,83	4,98
2021	514.409,00	9,06	5,09
2022	551.620,00	8,49	4,76
2023	605.131,00	8,46	4,74
2024	637.838,00	7.84	4.38

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2014-2024

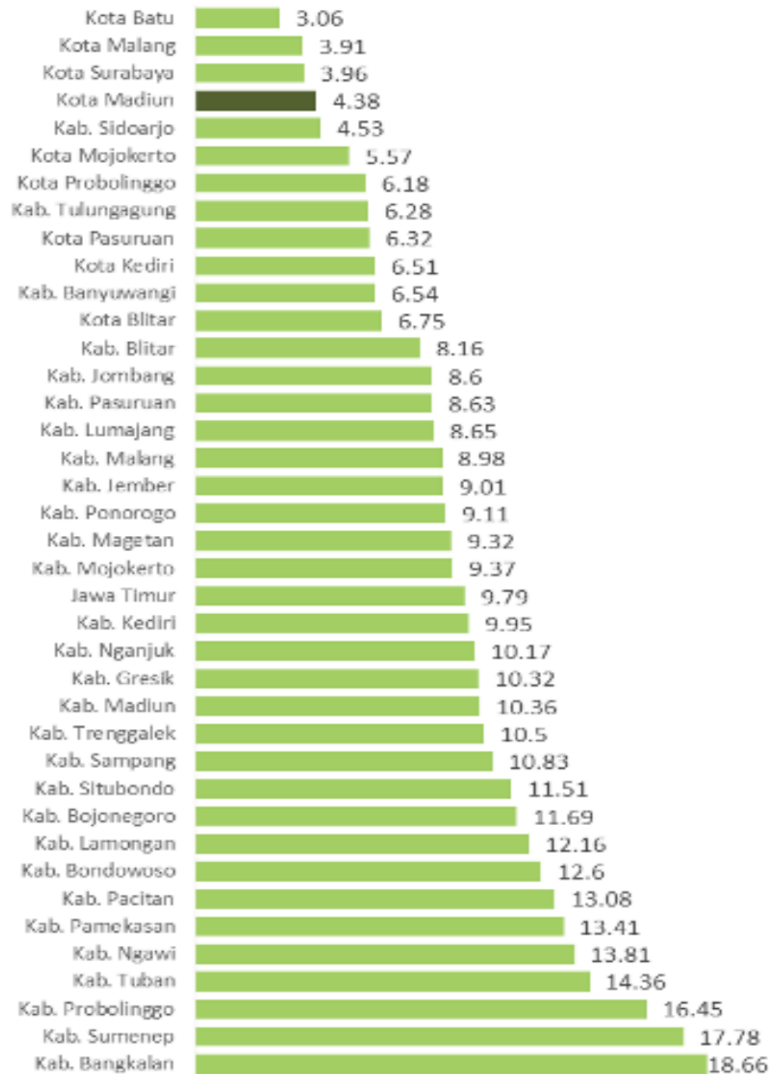
Grafik I.8. Garis Kemiskinan Kota Madiun, Maret 2014-Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024

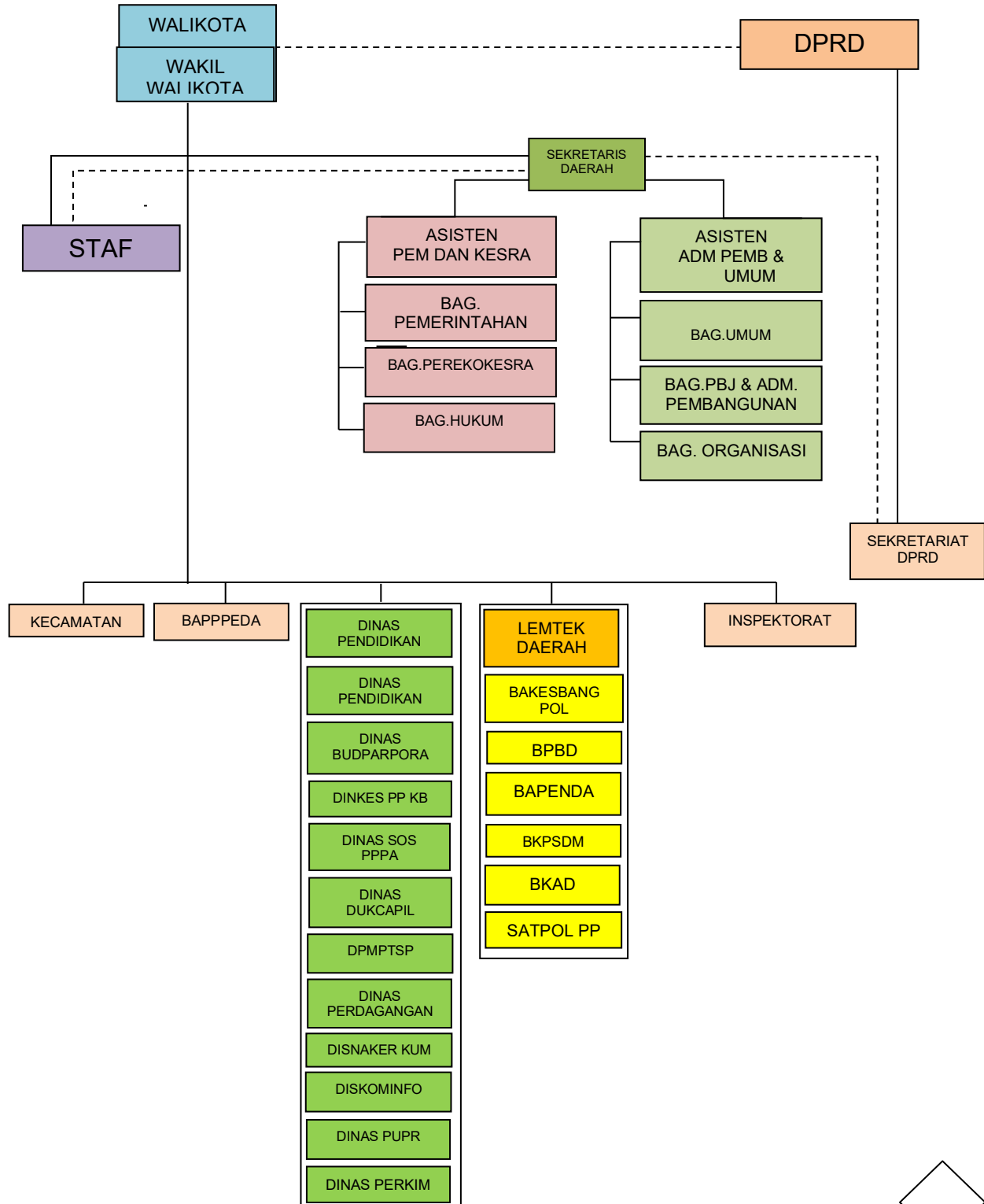
Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk miskin di Kota Madiun yang mengalami penurunan.

Gambar I.11. Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024

C. Struktur Organisasi



B. Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya disebabkan karena adanya peluang (potensi daerah) dan kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Terdapat lima pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan, yaitu :

1. Masih perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia;
2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan kondisi sangat baik perlu ditingkatkan;
3. Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas dan mampu pulih secepatnya sebagai dampak Covid-19;
4. Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target; dan
5. Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi. Hasil pemetaan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar I.12. Lima Masalah Pokok
Pembangunan Kota Madiun**



Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun (RPJMD Perubahan 2019-2024)

Dalam upaya mengatasi permasalahan pokok pembangunan, perlu diidentifikasi faktor penyebab (akar masalah) masalah pokok yang telah diidentifikasi. Permasalahan pokok masih perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan oleh capaian IPM yang lambat meskipun IPM Kota Madiun tertinggi ketiga di Jawa Timur. Selain itu peningkatan kemiskinan dan permasalahan kesehatan akibat Covid-19 perlu juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Masih terbatasnya pencapaian ekonomi daerah yang inklusif disebabkan oleh masih rendahnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan relatif tingginya ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya nilai investasi dan nilai tambah sektor unggulan, serta masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah. Berikut hasil pemetaan :

Tabel I.13. Hasil Pemetaan Masalah Pokok berdasarkan Identifikasi Permasalahan Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Indek Pembangunan manusia sudah sangat tinggi namun belum mencapai target RPJMD	Masih perlu ditingkatkannya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Masih perlu ditingkatkannya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan kualifikasi lulusan S1/S2/S3
			Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan
			Masih perlu ditingkatkannya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun
		Meningkatnya tingkat kemiskinan	Pandemic Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat
			Meningkatnya jumlah PMKS
			Masih terbatasnya jaring pengaman sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas infrastruktur masih perlu peningkatan	Masih perlu ditingkatkannya indeks kenyamanan kota
			Perencanaan pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan dan direncanakan secara komprehensif
			Masih terdapat jalan berkualitas buruk
			Masih terbatasnya indeks infrastruktur ekonomi daerah
			Proporsi Belanja modal relatif rendah meskipun mengalami peningkatan
		Masih terbatasnya pengelolaan lingkungan hidup	Masih perlu ditingkatkannya sanitasi dan penyediaan air dan udara yang bersih
			Penurunan kualitas lingkungan
			Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana kota
			Pengelolaan limbah dan persampahan
			Sanitasi dan penyediaan air bersih
3	Pembangunan ekonomi perlu didorong untuk lebih berkualitas	Menurunnya pertumbuhan ekonomi	Pandemic covid 19 masih belum pasti kapan akan diatasi
			Pembatasan mobilitas akibat Covid-19 dan menurunnya tingkat konsumsi
			Industri utama di Kota Madiun terdampak Covid-19 sehingga mengalami penurunan produksi
			Nilai tambah sektor unggulan masih terbatas
		Ketimpangan Pendapatan	Masih perlu ditingkatkannya infrastruktur ekonomi daerah
			Masih terjadinya ketimpangan antar wilayah khususnya antar kelurahan
		Kapasitas fiskal daerah terbatas	Masih terbatasnya penggalan potensi PAD
			Penentuan target pendapatan masih dalam skema pesimis

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Reformasi birokrasi mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkannya sesuai target	Tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaannya belum optimal	Indeks reformasi birokrasi belum optimal
			Masih terbatasnya kualitas ASN
		Masih perlu ditingkatkannya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis sistem informasi dan teknologi / digitalisasi	Kualitas pelayanan terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan
			Masih terbatasnya kualitas aparatur
5	Perlunya peningkatan kehidupan masyarakat yang tentram dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat	Masih perlu ditingkatkannya harmonisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat	Masih perlu ditingkatkannya kapasitas pengelolaan pemerintahan
			Masih terdapatnya kriminalitas
			Masih rawannya konflik sosial
		Masih rendahnya IPG dan IDG	Masih perlu ditingkatkannya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan serta masih perlu ditingkatkannya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban ketentraman, keindahan)
			Masih terbatasnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun (RPJMD Perubahan 2019-2024)

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah utama dalam menentukan arah kebijakan kedepan. Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal sebagaimana digambarkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang terjadi dan akan terjadi termasuk memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Isu strategis juga disusun berdasarkan berbagai hal yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa perencanaan jangka menengah.

Isu strategis dirumuskan dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dalam tabel di bawah. Setiap kriteria akan dikalikan dengan angka maksimum 100.

Tabel I.14. Kriteria Pembobotan Isu-isu Strategis Daerah Kota Madiun

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah	15
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	15
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
Total		100

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun(RPJMD Perubahan 2019-2024)

Dari berbagai isu strategis kemudian dikelompokkan dan di ranking sebagai berikut :

**Tabel I.15. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun
Tahun 2019-2024**

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
1	Sumberdaya manusia	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	90	90	80	90	80	80	85,5	3
	Pencapaian SDGs									
	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial									
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.									
2	Pembangunan Ekonomi	Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk mencapai ekonomi daerah yang inklusif melalui pengembangan	90	85	90	90	85	85	87,5	1
	Pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak Pandemic Covid-19 terhadap ekonomi global									



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2025



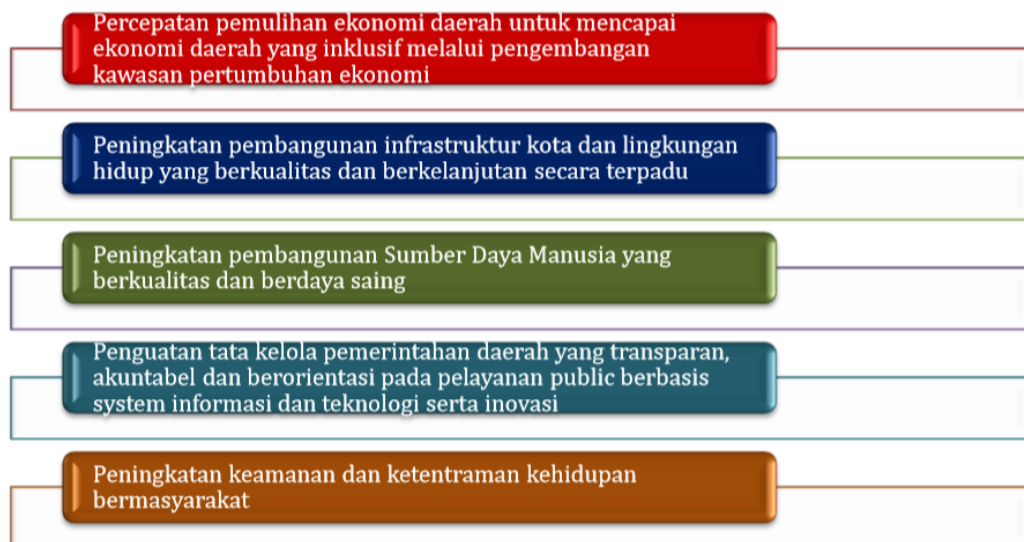
No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Diperlukan klasterisasi wilayah	kawasan pertumbuhan ekonomi								
	Penguatan ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan									
	Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal									
	Peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan Kawasan pertumbuhan ekonomi baru peran yang mandiri									
	Klasterisasi wilayah sesuai potensi sosial ekonomi									
	Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri,									

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	pariwisata dan jasa produktif lainnya									
3	Infrastruktur dan lingkungan	Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu								
	Pembangunan infrastruktur dalam kerangka pengembangan wilayah terpadu, dan keadilan akses bagi masyarakat									
	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat									
	Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air									
	Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup									
4	Sosial kemasyarakatan	Peningkatan keamanan dan ketentraman kehidupan bermasyarakat								
	Penguatan harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup									
	Peningkatan harmonisasi kehidupan bermasyarakat									
5	Pemerintahan dan Tata Kelola	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan,								
	pembangunan berbasis Smart City									

No	Isu Strategis berdasarkan pengelompokan	Isu Strategis utama	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor	Ranking
			1	2	3	4	5	6		
	Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.	akuntabel dan berorientasi pada pelayanan public berbasis system informasi dan teknologi serta inovasi								
	Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional									

Sesuai dengan kriteria diatas, terdapat lima isu strategis pembangunan daerah. Selain itu, berpijak pada analisis atas kondisi daerah dan masukan dari para pemangku kepentingan, maka isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota Madiun pada tahun pelaksanaan rencana jangka menengah daerah 2019–2024 adalah sebagai berikut:

Gambar I.12. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Madiun



Sumber : BAPPPEDA Kota Madiun

C. Sistematika

Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Struktur Organisasi, isu strategis, serta inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar perjanjian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 meliputi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Uraian tentang capaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2023, sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, meliputi pengukuran kinerja, perkembangan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran, evaluasi dan analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja, serta realisasi keuangan.



BAB IV : PENUTUP

Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Madiun tahun 2023 dan memberikan rekomendasi yang mungkin untuk dilakukan sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**BAB
II****P**ERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun tahun 2019-2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Madiun merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Madiun.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan yang matang, berbasis data yang akurat, maka diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang tepat, efektif dan efisien guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Madiun, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Walikota sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. RPJMD Kota Madiun memuat gambaran umum kondisi Kota Madiun, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Madiun Tahun 2019–2024 ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun dengan strategi **keberlanjutan** yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program- program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode kepemimpinan sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu instansi yang berwenang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun yang berkewajiban meningkatkan pembangunan disegala bidang dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan ini, sehingga terwujud satu kesatuan perencanaan yang dapat berjalan sesuai dengan keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gambar 2.1. RPJMD 2019-2024



Sumber : BAPPPEDA 2024

1. Visi

Berdasarkan pada gambaran dan analisa kondisi eksisting dan tantangan makro yang dihadapi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang serta potensi wilayah yang dimiliki dan dapat untuk lebih dikembangkan, maka ditetapkan visi Kota Madiun dalam RPJPD tahun 2005 – 2025 dan selanjutnya berdasarkan visi pembangunan jangka panjang tersebut di tetapkan visi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Visi RPJPD dan RPJMD

PERIODE	VISI
RPJPD 2005-2025	Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera
RPJMD 2019-2024	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
Keterkaitan RPJPD dengan RPJMD	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Optimalisasi Peran Kota Madiun Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Sumber : BAPPPEDA 2024

Dalam dokumen ini dijabarkan pengertian atau makna dari maju dan sejahtera. Makna “Kemajuan” berkaitan dengan kondisi yang terus-menerus berkarya dengan dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Pengertian maju secara sederhana antara lain mencakup bidang IPOLEKSOSBUD, melalui peningkatan indikator ekonomi, indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan penerapan indikator *good governance*.

Makna “Sejahtera” berhubungan dengan kemajuan Kota Madiun di segala aspek kehidupan yang harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Ukuran dasar kesejahteraan yang mencakup pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dalam seluruh struktur dan lapisan masyarakat. Persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan ditangani secara komprehensif dan proporsional. Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Aspek kesejahteraan disini mencakup juga aspek batiniah dan religiusitas yang secara operasional tercermin dalam kerukunan umat beragama dan perilaku yang dilandasi budi pekerti luhur dalam pergaulan hidup keseharian warga masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan tersebut akan tercapai dengan cara mewujudkannya pada 4 (empat) elemen kehidupan kota yaitu Pemerintahan, Masyarakat, Swasta, dan Lingkungan. Pemerintahan dikatakan sejahtera apabila pemerintahan tersebut telah mampu memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar para pegawainya. Untuk

masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, perwujudannya adalah rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kesejahteraan swasta dapat tercapai apabila ditandai dengan peningkatan pendapatan atau laba dari hasil usaha ekonominya dan terwujudnya persaingan yang sehat. Lingkungan yang sejahtera adalah lingkungan yang tata ruangnya mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat dan mendukung kelestarian alam dan keanekaragaman hayati.

2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel II.2 Visi dan Misi RPJMD

VISI : "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"	
M I S I	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)
	2. Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
	3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
	4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

Sumber : BAPPPEDA 2024

Berbagai misi dan orientasi pembangunan tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya. Untuk mengimplementasikan keseluruhan tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan.

3. Tujuan Pembangunan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari misi atau orientasi pembangunan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kota Madiun secara umum. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Madiun, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan bertitik tolak pada arah misi atau orientasi pembangunan, tujuan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel II.3 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities
2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera		
NO	MISI	TUJUAN
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	1. Terwujudnya pembangunan ekonomi inklusif 2. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Tabel II.4 Target Kinerja Tujuan 2024

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	(A-) 87,95
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	91,93
Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	83,71

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
	Indeks Pembangunan Gender	95,18
Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun		
Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88
	Indek Gini	0,39

4. Sasaran Pembangunan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Madiun selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel II.5 Target Kinerja Sasaran 2024

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cities			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	A (80,08)
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,01 (sedang)

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berbasis Smart Cities

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45 (Memuaskan) Indeks
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,028(baik) indeks
		Indeks Inovasi Daerah	53,96 indeks

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Kota yang Maju, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,59 indeks
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,93 indeks

Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43 Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	11,67 tahun
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13 Tahun
3.1.3	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22 indeks

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7,98%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	21,57%

Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat			
Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target 2024
4.2.1	Pengurangan kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45%
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan social masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 77,8 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	83,31 indeks

B. Perjanjian Kinerja

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, selanjutnya dijabarkan secara bertahap dalam rencana kinerja tahunan yang memuat target kinerja tahunan dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Target kinerja yang telah ditetapkan tersebut beserta dengan alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan yang mendukungnya, selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Besaran target kinerja yang ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Madiun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	A (80,08) Skor
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,01 (sedang)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45 (memuaskan) Indeks
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,028 (baik) indeks
		Indeks Inovasi Daerah	53,96 indeks
3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks infrastruktur	98,59 indeks
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,93 indeks
5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43 tahun
		Rata-rata Lama Sekolah	11,67 tahun
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13 tahun
7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22 indeks
8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00%
9	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7,98%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	21,57%
10	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45%
11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	B skor 77,80 (Harmonis)
		Indeks Rasa Aman	83,31 indeks

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	711.477.809.669
2	Program Pengelolaan Pendidikan	68.029.409.791
3	Program Pengembangan Kurikulum	1.201.204.299
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.053.205.561
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	76.532.897.399
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	442.559.000
7	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	305.327.000
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.658.468.800
9	Program Pengendalian Penduduk	213.907.000
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana	1.355.866.000
11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.353.474.000
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.580.676.000
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.905.323.500
14	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainasi	12.352.748.400
15	Program Penataan Bangunan Gedung	23.584.359.814
16	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	22.045.832.500
17	Program Penyelenggaraan Jalan	38.554.253.532
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.251.039.058
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.596.253.128
20	Program Pengembangan Perumahan	1.922.750.000
21	Program Kawasan Permukiman	17.433.326.000
22	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	16.746.929.527
22	Program Pengelolaan Izin Lokasi	-
23	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	32.413.750
24	Program Penatagunaan Tanah	773.378.500
25	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.161.805.425
26	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.386.141.000

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
27	Program Penanggulangan Bencana	1.375.265.000
28	Program Pemberdayaan Sosial	3.265.196.184
29	Program Rehabilitasi Sosial	3.931.608.371
30	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.120.631.330
31	Program Penanganan Bencana	447.562.100
32	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	170.200.600
32	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	743.859.274
33	Program Perlindungan Perempuan	299.929.753
34	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	210.271.527
35	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	67.627.961
36	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	326.795.688
37	Program Perlindungan Khusus Anak	73.268.687
38	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.596.000.000
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	253.256.682
40	Program Hubungan Industrial	3.667.160.448
41	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	444.174.500
42	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	150.586.523
43	Program Pengembangan UMKM	260.686.759
44	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.607.187.748
45	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	165.600.000
46	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	391.234.000
47	Program Penanganan Kerawanan Pangan	58.200.000
48	Program Pengawasan Keamanan Pangan	85.631.000
49	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	436.605.000
50	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	70.022.000
51	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	466.054.000
52	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.439.213.000
53	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.459.043.910
54	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	407.740.090
55	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	109.800.000
56	Program Perizinan Usaha Pertanian	33.600.000
57	Program Penyuluhan Pertanian	3.558.495.367



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
58	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	279.440.000
59	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.246.691.086
60	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	10.000.000
61	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	50.000.000
62	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	264.150.000
63	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	715.786.000
64	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	247.000.000
65	Program Pengelolaan Persampahan	5.557.300.000
66	Program Pendaftaran Penduduk	87.604.025
67	Program Pencatatan Sipil	113.993.195
68	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	133.291.513
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6.817.887.490
70	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.421.850.097
71	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	16.874.395.275
72	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	100.000.000
73	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	241.752.000
74	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	109.550.000
75	Program Promosi Penanaman Modal	421.063.000
76	Program Pelayanan Penanaman Modal	409.495.000
77	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	462.000.000
78	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	163.272.400
79	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100.000.000
81	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.765.938.521
82	Program Pengembangan Kebudayaan	2.334.535.000

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
83	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	50.000.000
84	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	279.765.000
85	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	248.000.000
86	Program Pemasaran Pariwisata	605.500.000
87	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	278.000.000
88	Program Pembinaan Perpustakaan	928.836.199
89	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	80.000.000
90	Program Pengelolaan Arsip	619.386.636
91	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	154.000.000
92	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	86.160.400
93	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.643.298.691
94	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	300.254.200
95	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	224.674.843
96	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	337.278.650
97	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.140.893.884.00
98	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.527.949.504.00
99	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.991.428.825
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.026.300.083
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.810.266.216
102	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.681.866.000
103	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.844.623.000
104	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.111.148.000
105	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.565.796.600
106	Program Kepegawaian Daerah	2.549.288.376
107	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.729.384.178
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	721.400.000
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	908.756.000
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.789.605.117.00
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35.115.224.360.00



No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
112	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.427.825.585.00
113	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	352.206.913.00
114	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.378.091.188
115	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	18.375.563.500
116	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.809.600.000
117	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.960.086.980
118	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.562.890.400
JUMLAH		1.246.786.210.085,00

**BAB
III****A KUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022 bahwa kategori capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.1 Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

No	Capaian Realisasi	Kategori Capaian Kinerja	Bobot	Kategori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Sangat Baik/Istimewa	5	Di atas ekspektasi
2	100 %	Baik	4	Sesuai ekspektasi
3	80 % ≤ 99 %	Cukup	3	Di bawah ekspektasi
4	60 % ≤ 79 %	Kurang	2	
5	0 % ≤ 59 %	Sangat Kurang	1	

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat Realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

- (1) **Tingkat Realisasi Positif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- (2) **Tingkat Realisasi Negatif** yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2) Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikaitkan dengan Misi Walikota dan Tujuan pendukung Misi Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Pengukuran Realisasi Kinerja Misi 2024

Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance)				
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	(A-) 87,95	(A-) 91,95	104,54

Misi 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	91,93	93,933	101,52

Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,51	100,96
	Indeks Pembangunan Gender	95,18	95,26	100,08

Misi 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	107,34
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88	84,23	101,63
	Indek Gini	0,39	0,435	88,46

Sumber Data : Bappeda Kota Madiun dan BPS

** Angka 2022 dikarenakan angka 2023 dan 2024 belum rilis

Tabel III.3 Pengukuran Realisasi Kinerja 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	A (80,08) Skor	A (81,03) skor	101,19
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,01 (sedang)	3,3619	111,69
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45 (memuaskan) indeks	4,57 (Memuaskan) indeks	102,70
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,028 (baik)	88,74 (sangat baik)	100,81
		Indeks Inovasi Daerah	53,96 indeks	67,09 indeks	124,33
3.	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,59 indeks	98,59 indeks	100,00
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,93 indeks	62,21 indeks	107,39
5.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43 tahun	14,54 tahun	100,76
		Rata-rata Lama Sekolah	11,67 tahun	12,11 tahun	103,77
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13 tahun	75,67 tahun	103,47

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22 indeks	76,51 indeks	99,08
8.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00%	4,30%	114
9.	Meningkatnya pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	7,98%	4,59%	57,51
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	21,57%	30,48%	141,30
10.	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45%	4,38%	101,57
11.	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Angka Kerukunan	B skor 77,8 (harmonis)	78,04 (harmonis)	100,31
		Indeks Rasa Aman	83,31 indeks	84,16 indeks	101,02

Sumber Data : Tim Penyusun LKPJ Kota Madiun, data diolah

3) Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

1. Misi Pertama : Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Pada Misi 1 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	87,95 (A)	91,95 (A-)

Sumber : KEMENPANRB 2023-2024

Tabel III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	70,01 (BB)	91,95 (A-)	131,33

Sumber : KEMENPANRB 2023-2024

**Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Realisasi Provinsi dan Nasional**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Indeks RB Kota Madiun	91,95 (A-)	A-	N/A

Sumber : KEMENPANRB 2023-2024

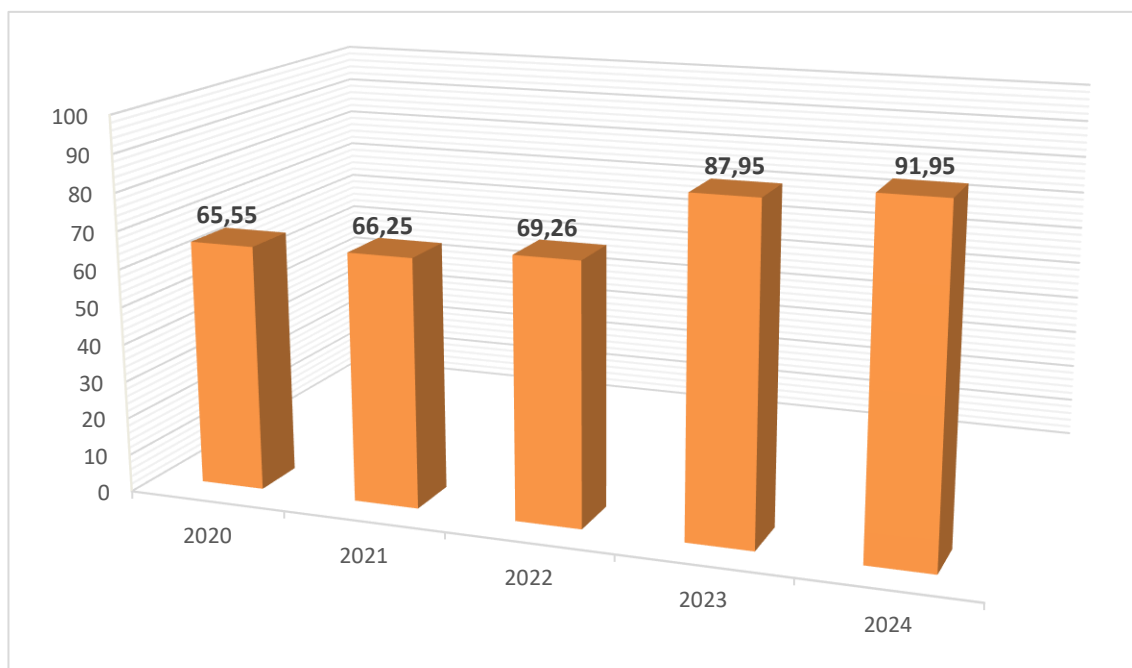
Indeks RB Kota Madiun

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Gambar III.1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2020-2024**



Sumber : Kementerian PANRB 2025

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan, Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun adalah 91,95 kategori "A-" dengan capaian kinerja sebesar 131,33%.

Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.7. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A.	RB General	100	80,60
B.	RB Tematik	20	11,35
C.	Indeks RB	120	91,95
			A-

Sumber : Kementerian PANRB 2025

Sedangkan untuk rincian hasil dari masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

Tabel. III.8. Rincian Hasil Indikator Penilaian dari Kementerian/Lembaga

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2,42	2,42	Tim Penilai Nasional
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	5,65	Tim Penilai Nasional
3.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	4	2,4	KEMENPAN RB
4.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3,29	2,63	BPKP
5.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	0,75	0,75	KEMENPAN RB
6.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	81,03	3,24	KEMENPAN RB
7.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2,5	98,09	2,45	KEMENPAN RB

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
8.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2,5	5	2,5	KEMENPAN RB
9.	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	68,67	1,72	LAN
10.	Indeks Reformasi Hukum	2,5	97,72	2,44	KEMENKUM HAM
11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,18	1,09	BPS
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	78,01	1,95	LKPP
13.	Indeks Sistem Merit	4	295	2,88	KASN
14.	Indeks Pelayanan Publik	2	4,47	1,87	KEMENPAN RB
15.	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	95,5	1,91	Ombudsman RI
16.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	4,57	8,23	KEMENPAN RB
17.	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	4	99,15	3,97	Tim Penilai Nasional
18.	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	94,12	4,57	Tim Penilai Nasional
19.	Opini BPK	5	5	5	BPK
20.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	90,97	3,64	BPK
21.	Indeks BerAKHLAK	4	74,47	2,98	KEMENPAN RB
22.	Survei Penilaian Integritas	10	77,07	7,71	KPK
23.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88,74	7,1	KEMENPAN RB
24.	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0,63	0,63	Tim Penilai Nasional
26.	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0,58	0,58	Tim Penilai Nasional
27.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0,54	0,54	Tim Penilai Nasional
28.	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	2	2	Tim Penilai Nasional
29.	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1,92	1,92	Tim Penilai Nasional
30.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	1,5	1,5	Tim Penilai Nasional

No.	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Indeks	Sumber Data
31.	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0	0	0	Tim Penilai Nasional
32.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2,85	2,85	Tim Penilai Nasional
33.	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Tim Penilai Nasional
34.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,5	3	1,5	Tim Penilai Nasional

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2025

Pemerintah Kota Madiun akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Tak hanya untuk mendapatkan nilai tertinggi. Namun, juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal ke depannya.

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 yang memberikan konsep yang jelas terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun
2. Penyusunan rencana aksi yang lebih terarah dan berorientasi pada prioritas penyelesaian permasalahan utama
3. Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mendorong perubahan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah yang didukung budaya kerja berorientasi hasil
5. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan

6. Pemanfaatan aplikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik
7. Ketersediaan dana/anggaran yang cukup, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
8. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai
9. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur Masyarakat serta memberikan masukan yang membangun terhadap kebijakan dan pelaksanaan reformasi
10. Adanya regulasi yang jelas dan konsisten yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mempercepat proses perubahan
11. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Masih terdapat penetapan target atas Kegiatan Utama belum didasarkan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpan RB nomor 182 Tahun 2024)
2. Belum adanya perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan system kerja dan penyederhanaan birokrasi
3. Pengelolaan komunikasi kebijakan kepada seluruh stakeholder sasaran pada seluruh proses kebijakan yang belum optimal
4. Belum terdapat kebijakan atau kaidah baku terkait aspek data statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Kota Madiun
5. Belum optimalnya kerja sama antara lima elemen masyarakat, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media dalam pengendalian inflasi
6. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan indeks n menerapkan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di perangkat daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimtek mengenai pohon kinerja/cascading pada bulan Juni 2024 dalam rangka peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
2. Melaksanakan bimtek mengenai SPIP pada bulan Juni 2024
3. Melaksanakan upaya-upaya perbaikan manajemen resiko yaitu:
 - bimtek mengenai MRI pada bulan Februari 2024
 - menyusun rancangan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah pada bulan
 - menyusun revisi pedoman pengelolaan risiko pada bulan April 2024
4. Melaksanakan bimtek mengenai MRI Fraud dan kegiatan pencegahan, deteksi dan pemeriksaan pada bulan Februari 2024
5. Melakukan asistensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada
6. Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Raperda dan Raperkada
7. Melakukan review, dan evaluasi dilaksanakan tiap semester terkait penyelenggaraan statistik sektoral
8. Mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional Pengelola PBJ ke BKPSDM Kota Madiun: Usulan kebutuhan fungsional Pengelola PBJ tahun 2024 sebanyak 2 orang. ABK 8 orang, dan keterisian PNS eksisting 6 orang. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan indeks tata kelola pengadaan
9. Pemetaan kompetensi (Assessment) telah dilaksanakan bertahap untuk pegawai mulai dari jenjang JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana. Dan diperbarui secara berkala apabila telah melebihi masa 3 tahun hasil Assessment nya.
10. Pemetaan talenta saat ini telah dalam proses penyusunan bagi pegawai yang telah memiliki hasil Assessment
11. Melakukan pengawasan atas kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas dan Kemudahan untuk mengikuti SOP pada OPD Pelayanan

12. Melaksanakan pengawasan thd obyektifitas Kebijakan Manajemen SDM
13. Mengoptimalkan sosialisasi pencegahan korupsi (gratifikasi, benturan kepentingan dsb)
14. Melaksanakan pengawasan ketaatan dan kinerja
15. Melaksanakan Reviu Pengelolaan UKPB dan Probitiy Audit
16. Maksanakan perbaikan/revisi peraturan dan aplikasi WBS
17. Melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten dan memberikan feed back terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan

Tujuan "Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities" didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.10. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 1 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun	A (80,08) skor	A (81,03)	101,18
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,01 (sedang)	3,2179 (sedang)	106,91
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45 (memuaskan) indeks	4,57 (memuaskan) indeks	102,70
1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,028 (baik)	88,74 (sangat baik)	100,81
		Indeks Inovasi Daerah	53,96	67,09	124,33

Sumber Data : Kementerian PAN RB, Dinas terkait pengampu indikator dan BPS

A. Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan kategori hasil penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11. Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah**

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4.	B	>60 -70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5.	CC	>50 -60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>50 -60	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>50 -60	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

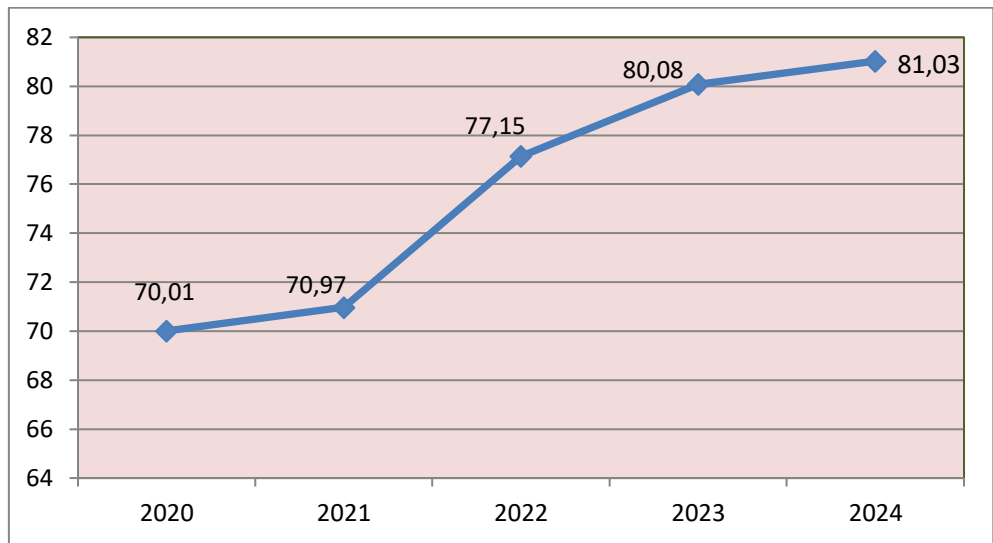
Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2024 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

**Gambar III.3. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024**

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,00
2	Pengukuran Kinerja	30	24,37
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,21
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

**Gambar III.4. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024**



Sumber : KEMENPANRB 2024

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 3 November 2024 Nomor : B/314/AA.05/2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 81,03 dengan dengan Predikat A tercapai 101,18% dari target sebesar 80,08. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Namun hasil evaluasi mulai tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut :

1. Menyusun pohon kinerja 2024 berdasarkan isu strategis oleh perangkat daerah melalui aplikasi E-KAK yang nantinya akan ditarik menjadi

- Perjanjian Kinerja dan SKP pada aplikasi M-SKP. Pohon kinerja ini kemudian sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan melalui berita acara penyesuaian dokumen perencanaan dengan pohon kinerja
2. Melakukan *collaborative working* yang digambarkan dalam pohon kinerja tingkat Kota Madiun
 3. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana yang selaras dengan pohon kinerja dan penandatanganan Perjanjian Kinerja
 4. Menyusun manual sistematika penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah yang menjelaskan perencanaan berdasarkan laporan kinerja tahun N-1 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya
 5. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dilaporkan Tahun 2025, dengan penekanan pemanfaatan data realisasi kinerja sebagai bahan penyusunan target di tahun berikutnya, keselarasan strategi perangkat daerah dengan strategi kota dalam pohon kinerja, crosscutting dan inovasi dalam penyelesaian permasalahan dalam pencapaian tujuan
 6. Pemanfaatan informasi kinerja melalui aplikasi yang terintegrasi dengan kualitas pengukuran kinerja yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yaitu melalui dashboard manajemen kinerja
 7. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/Biro Organisasi, dan study banding
 8. Melakukan monitoring terhadap pengisian realisasi pada penetapan kinerja triwulanan yang ditetapkan pada rencana aksi dan rencana kerja masing-masing ASN pada setiap perangkat daerah melalui aplikasi e-sakip terintegrasi.
 9. Melakukan pengembangan aplikasi dengan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan

evaluasi. Untuk tahun 2024 ini telah direalisasikan dashboard Manekin yaitu dashboard yang berisikan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang terdiri dari aplikasi e-kak, sipd, mskp, e-sakip dan manpro. MSKP juga merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

10. Melakukan pembaruan skema pemberian reward dan punishment berdasarkan ketercapaian kinerja dan perilaku pegawai
11. Melakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja terhadap target kinerja secara berkala yang digunakan dalam penentuan target kinerja berikutnya

2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah dengan basis data yang berdasarkan dari LPPD sebagai sumber informasi utama. Dalam hal pelaksanaan EPPD tingkat Kota Madiun, Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan EPPD berdasarkan LPPD Kota Madiun dengan melibatkan

perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun. Sasaran penilaian dari EPPD adalah untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Evaluasi Kinerja Makro dilaksanakan dengan menilai capaian kinerja dan perubahan capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD, sedangkan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD.

Adapun untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator makro sebagai berikut :

**Tabel III.12 Tabel pembobotan Indikator Kinerja Makro
Penyelenggaraan Pemerintahan**

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	BOBOT INDIKATOR
1	Indeks Pembangunan Manusia	20%
2	Angka Kemiskinan	20%
3	Angka Pengangguran (TPT)	15%
4	Pertumbuhan Ekonomi	10%
5	Pendapatan Perkapita	15%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi :

Tabel III.13 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA	JUMLAH INDIKATOR
1	IKK Outcome	106
3	IKK Fungsi Penunjang	19

Dalam pengisian LPPD Tahun 2024, IKK Output tidak dimasukkan dalam pelaporan sehingga hanya mengisi 125 IKK saja yang terbagi dalam 106 IKK Outcome dan 19 IKK Fungsi Penunjang.

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 meraih nilai 3,2179 dengan predikat Sedang. jika dibandingkan, nilai Tahun 2024 terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2020 yang memperoleh nilai 3,385. Sedangkan di Tahun 2021 dan 2022 tidak dikeluarkan nilai LPPD dari Kementerian Dalam Negeri karena perubahan sistem dari penilaian secara manual menjadi penilaian melalui aplikasi serta masih adanya pandemi COVID-19, di mana di seluruh wilayah Indonesia juga tidak keluar nilai LPPD.

Adapun Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Madiun periode 2019 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

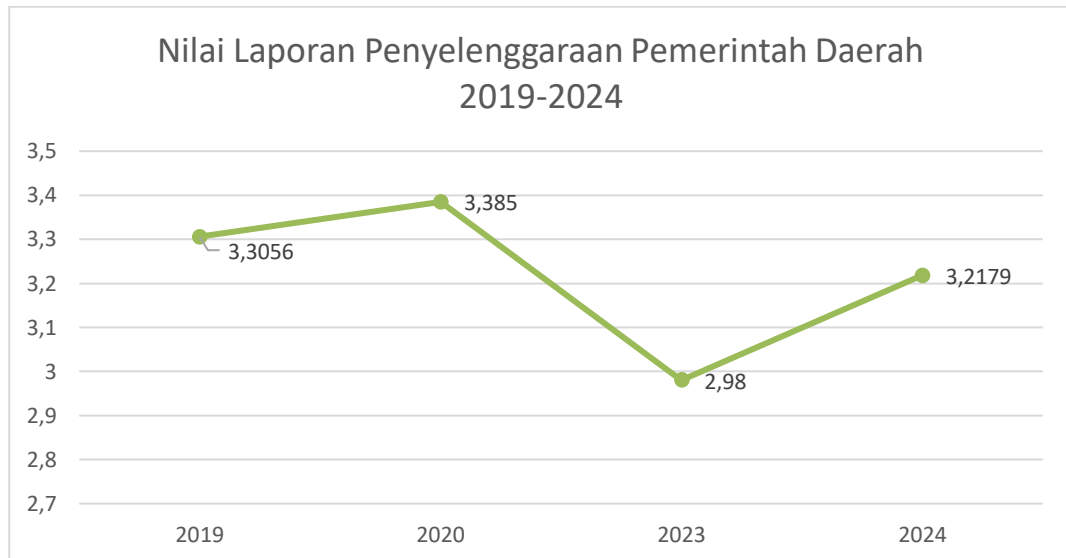
Tabel III.14. Tabel Nilai LPPD tahun 2019-2024

Tahun	Nilai (Status Kinerja)
2019	3,3056 (sangat tinggi)
2020	3,385
2021*	Tidak keluar nilai
2022*	Tidak keluar nilai
2023	2,98 (sedang)

2024	3,2179 (sedang)
------	-----------------

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun

*Data Tahun 2021 dan 2022 data tidak dikeluarkan



Faktor Penghambat pencapaian realisasi indikator LPPD yaitu adanya perbedaan persepsi dan pemahaman antara penyusun LPPD dengan Tim APIP Inspektorat menyebabkan progres penyusunan LPPD belum secepat yang diharapkan. Selain itu, penilaian LPPD didasarkan pada tren kondisi daerah, sehingga jika suatu indikator di daerah tertentu mencapai capaian yang paling tinggi, maka capaian itu yang akan dipakai untuk tolok ukur indikator seluruh Indonesia. sehingga peluang untuk mencapai nilai tertinggi semakin kecil ketika bersaing dengan kota seluruh Indonesia. faktor penghambat terakhir yaitu ditjen otda kemendagri memiliki rumus tersendiri dalam perhitungan nilai LPPD, walaupun daerah mencoba untuk menghitung nilai secara mandiri untuk antisipasi maka nilai yang keluar tidak akurat.

Sedangkan faktor pendorong pencapaian realisasi indikator LPPD yaitu kemudahan dan kecepatan setiap perangkat daerah penyusun LPPD untuk mengumpulkan data dukung melalui fasilitas Google Drive serta koordinasi

yang intens dengan perangkat daerah penyusun LPPD dapat meminimalisir kesalahan input data.

Rencana tindak lanjut atas capaian realisasi indikator LPPD:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi antara perangkat daerah penyusun LPPD, APIP Inspektorat dan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Menyebarluaskan juknis dan definisi operasional setiap IKK LPPD kepada Perangkat Daerah APIP Inspektorat
3. Melaksanakan Bimtek/Desk Pendalaman dan Pemahaman IKK dengan narasumber dari Ditjen Otda Kemendagri yang melibatkan Perangkat Daerah penyusun LPPD dan APIP Inspektorat untuk penyamaan persepsi tentang IKK LPPD.

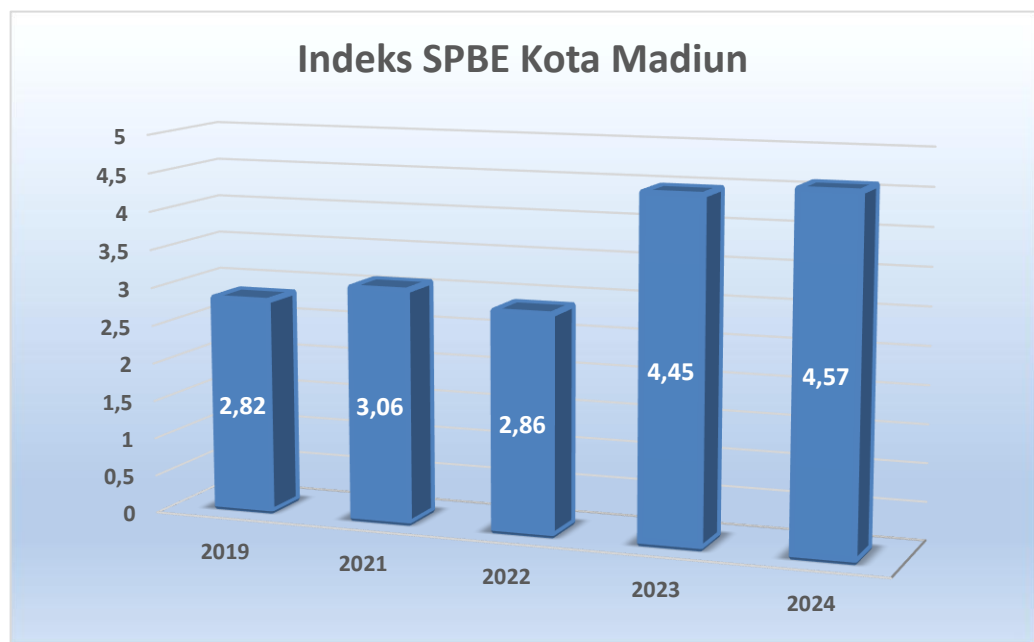
3. *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada

instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Gambar III.5. Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun



Sumber : Kementerian PAN RB

Proses Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia telah dilaksanakan dan Pemerintah Kota Madiun meraih nilai 4,57 dengan predikat Memuaskan. Nilai ini naik jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang memperoleh nilai 4,45 (Baik). Sedangkan di Tahun 2022 yang memperoleh nilai 2,86 (baik) dan Tahun 2021 memperoleh nilai 3,06 (Baik).

Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang

Indeks SPBE nya masih bernilai rendah, sehingga untuk tahun 2020 Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) suatu daerah dapat mengalami fluktuasi, terkadang naik dan di lain waktu turun, tergantung pada berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dan pengelolaan teknologi informasi dalam pemerintahan.

Peningkatan nilai indeks SPBE biasanya mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola teknologi, peningkatan layanan publik berbasis elektronik, serta penguatan komitmen dan koordinasi antara pimpinan daerah dan instansi terkait. Di sisi lain, penurunan nilai indeks sering kali disebabkan oleh kendala teknis dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi.

Fluktuasi ini juga dapat terjadi karena perubahan kebijakan atau evaluasi yang lebih ketat terhadap indikator-indikator yang diukur, seperti kebijakan SPBE, tata kelola, manajemen layanan, dan penerapan sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, konsistensi dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi menjadi kunci untuk menjaga tren peningkatan indeks SPBE secara berkelanjutan.

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE
2. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
3. Keberadaan regulasi dan kebijakan yang mendukung digitalisasi pemerintahan, seperti kebijakan terkait standar data, pengelolaan informasi publik, dan keamanan informasi, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
4. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi

5. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
6. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan infrastruktur TIK yang memadai, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah usang atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi terkini.
2. Banyak pegawai pemerintahan yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam mengoperasikan atau mengelola sistem berbasis elektronik
3. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK
4. Kurangnya Integrasi Sistem yang menyebabkan kesulitan dalam berbagi data dan informasi antar instansi, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik
5. Ancaman siber dan kekhawatiran terhadap kebocoran data pribadi dapat menghambat adopsi teknologi digital dalam pemerintahan, mengingat pentingnya perlindungan data yang dikelola oleh instansi pemerintah
6. Perubahan budaya kerja yang terbiasa dengan sistem manual menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasi SPBE.

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perbaikan/tindak lanjut dokumen evaluasi SPBE sesuai rekomendasi dan hasil evaluasi SPBE tahun sebelumnya
2. Melaksanakan kegiatan Review Proses Bisnis pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
3. Melaksanakan proses input data ke dalam aplikasi SIA SPBE (Sistem Informasi Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

4. Melaksanakan tugas sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pengelolaan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di perangkat daerah.

Analisis terhadap ketercapaian dan ketidaktercapaian:

1. Disamping faktor pendorong dan faktor penghambat dari ketercapaian dan tidak ketercapaian di atas, dari hasil evaluasi SPBE 5 tahun terakhir, ada juga faktor perubahan kebijakan atau evaluasi yang lebih ketat terhadap indikator-indikator yang diukur, seperti kebijakan SPBE, tata kelola, manajemen layanan, dan penerapan sistem yang terintegrasi yang menyebabkan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) suatu daerah dapat mengalami fluktuasi, terkadang naik dan di lain waktu turun.
2. Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan memastikan bahwa berbagai upaya transformasi digital dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar nilai indeks SPBE dapat menunjukkan tren yang positif di masa mendatang.

B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat

beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

Pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2024 bahwa terjadi penyesuaian target indikator yang mana pada RPJMD sebesar 85 disesuaikan menjadi 88,028. Hal ini dilakukan karena berdasarkan kebutuhan atas Indeks Kepuasan Masyarakat maka terjadi penambahan lokus untuk pelaksanaan survey sehingga penyesuaian berdasarkan proyeksi dengan memperhitungkan realisasi capaian kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan hasil survey tahun 2024 pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 88,74 dengan kategori nilai Sangat Baik, hal ini menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2023 dengan nilai sebesar 88,028 dengan capaian kinerja atas target di tahun 2024 sebesar 100,80%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 88,028 dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Kenaikan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kota Madiun didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
2. Kolaborasi kinerja antar perangkat daerah di Pemerintah Kota Madiun
3. Pelayanan online
4. Inovasi pelayanan yang memberikan kemudahan kepada penerima layanan
5. Sistem dan prosedur kerja yang memadai

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya :

1. Terdapat beberapa penyelenggara pelayanan dengan sarana dan prasaranya yang belum memadai
2. Masih terdapat oknum petugas berperilaku kurang baik dalam memberikan pelayanan
3. Masih terdapat beberapa penyelenggara pelayanan yang belum menerapkan standar pelayanan secara optimal

Perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Gambar III.6. Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kota Madiun (2024)

Trend Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 sampai dengan 2024 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* pasca pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal.

Pemerintah Kota Madiun selalu berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur maupun Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

2. Melakukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Evaluasi Pelayanan Publik secara berkala dan berkelanjutan
6. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat
7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat
8. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2024 dilaksanakan pada satu Unit Pelayanan Publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

2. Indeks Inovasi Daerah

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah. *Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari :

- Sangat Inovatif;
- Inovatif;
- Kurang Inovatif; serta
- Tidak Dapat Dinilai.

IGA (*Innovative Government Award*) Kemendagri dimaksudkan agar dapat mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat

mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan kegiatan *Innovative Government Award* / IGA Kemendagri adalah:

1. Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai
2. Mendorong penerapan *good governance*
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah
4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

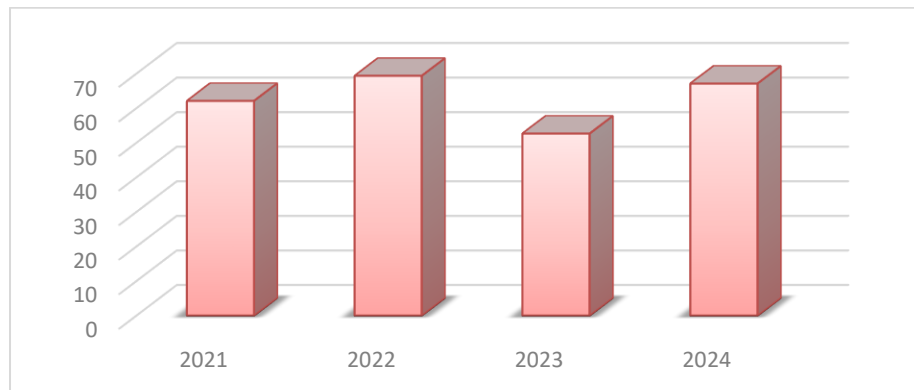
Output dari IGA adalah keluarnya Indeks Inovasi Daerah yang merupakan sarana dari pemerintah pusat untuk menilai kualitas dan kuantitas inovasi pada pemerintah daerah.

Pada tahun 2024 proposal inovasi yang diinput dan dilaporkan melalui <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/> adalah sebanyak 131 proposal. Adapun rinciannya adalah:

1. 61 adalah inovasi yang telah diterapkan
2. 67 inovasi yang masuk tahap uji coba
3. 3 proposal inovasi baru

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 mendapatkan indeks 67,09 dengan predikat Kota Sangat Inovatif.

Gambar III.7. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Madiun Tahun 2021-2024



Sumber: BAPPPEDA Kota Madiun 2024

Adapun faktor pendorong yang membuat realisasi indeks inovasi daerah melebihi dari target yang ditentukan adalah :

- Mendatangkan narasumber Kemendagri maupun pihak lain dari Pusat (BRIN) yang betul- betul memahami substansi dan cara penyusunan proposal inovasi dan data dukung indikatornya untuk melakukan pendampingan kepada inovator daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kemendagri selaku penilai dan para inovator di Perangkat Daerah sehingga didapatkan kesepahaman dan pemahaman akan proposal inovasi yang dilaporkan
- Meningkatkan semangat berinovasi Perangkat Daerah melalui fasilitasi Kompetisi Inovasi Kota Madiun dan fasilitasi lomba Inovasi Teknologi Provinsi Jawa Timur
- Melakukan desk dan pendampingan intensif kepada OPD pada saat proses penyusunan hingga pelaporan inovasi ke dalam sistem IGA

2. Misi Kedua : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran

Pada Misi 2 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)

Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	89,01	91,93	93,933
---	---------------	-------	-------	--------

Sumber : BAPPPEDA 2024

Tabel III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Livable City	89,01	93,933	105,53

Sumber : BAPPPEDA 2024

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Liveable City	93,933	N/A	N/A

Sumber : BAPPPEDA 2024

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City)

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis. Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep livable city terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang livable.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep livable city bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat livability di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi. Kondisi ini masih dikategorikan livable dikarenakan perencanaan awal kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang

bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar livable city :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Indikator Umum

- I. Sarana Prasarana
 1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
 2. Kualitas Angkutan/ Transportasi
 3. Kondisi Jalan
 4. Pedestrian
 5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
 6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
 7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
 8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
 9. Listrik
 10. Ketersediaan Air Bersih
 11. Kualitas Air Bersih
 12. Telekomunikasi

II. Ekonomi

1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
2. Biaya Hidup

III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan

1. Tata Kota
2. RTH
3. Kebersihan
4. Persampahan
5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air

IV. Kehidupan Sosial

1. Kriminalitas
2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
4. Akses Informasi Pelayanan Publik
5. Keamanan

Indikator Khusus

I. Sarana Prasarana

1. Kantong Parkir
2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)
3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
5. Jaringan Internet (WIFI)

II. Ekonomi

1. Iklim usaha/investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah

III. Kehidupan Sosial

1. Interaksi Sosial beretika toleransi/ kerukunan antar penduduk/agama
2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial

4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
 5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif
- IV. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum
- V. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan
- VI. Kondisi Politik
- VII. Smart City
- VIII. Kualitas Hidup Penduduk

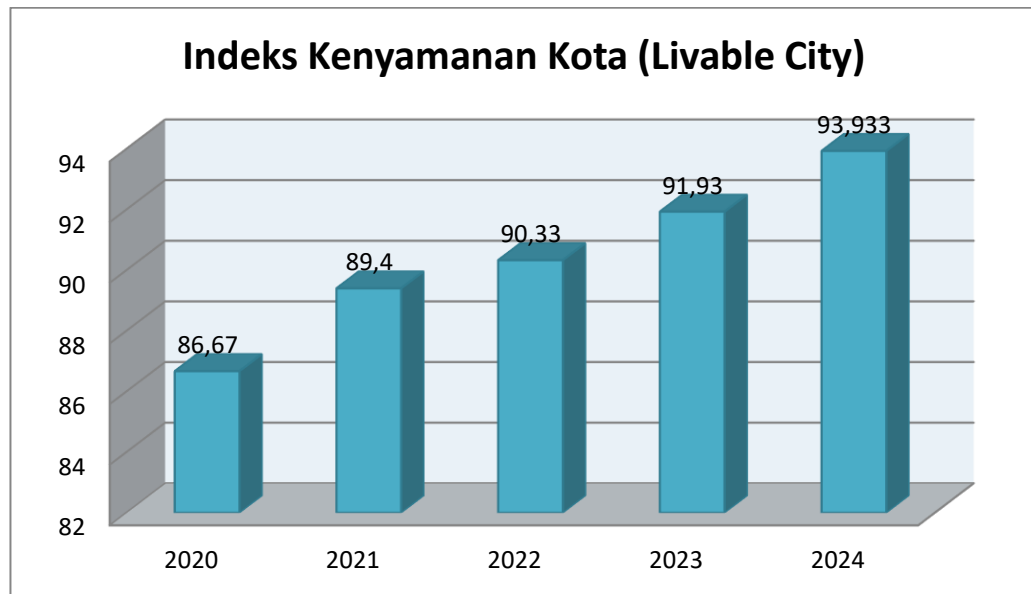
Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*) adalah indikator untuk mengukur seberapa nyaman Kota Madiun dilihat dari:

1. Infrastruktur pendukung meliputi: akses jalan, akses air minum dan akses sanitasi perumahan
2. Sarana prasarana pemukiman meliputi: rumah layak huni, rumah tinggal bersanitasi, cakupan lingkungan yang sehat yang didukung dengan PSU, ruang terbuka hijau, penerangan jalan dan fasilitas permakaman
3. Keamanan meliputi: persepsi keamanan dari bencana, pemenuhan kesejahteraan sosial, perlindungan dan pemanfaatan atas kebhinekaan dan keamanan dari kekerasan.

Dari perhitungan indeks kenyamanan kota diperoleh dari masing-masing indikator pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Indeks infrastruktur diperoleh nilai (98,59)
2. Indeks sarana dan prasarana permukiman diperoleh nilai (99,05)
3. Indeks rasa aman diperoleh nilai (84,16)

**Gambar III.8. Trend Kenaikan Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)
Tahun 2020-2024**



Sumber : BAPPPEDA Kota Madiun

Realisasi kinerja Indeks Livable City Pemerintah Kota Madiun tahun 2024 sebesar 93,933 dengan target 91,93. Sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,52%. Sedangkan tahun 2023 sebesar 91,653 dengan target 90,33. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tujuan "Terwujudnya pembangunan infrastruktur kota yang maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan" didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.16. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 2 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
2.1.1	Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota	Indeks Infrastruktur	98,59	98,59	100
2.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	57,93	62,21	107,39

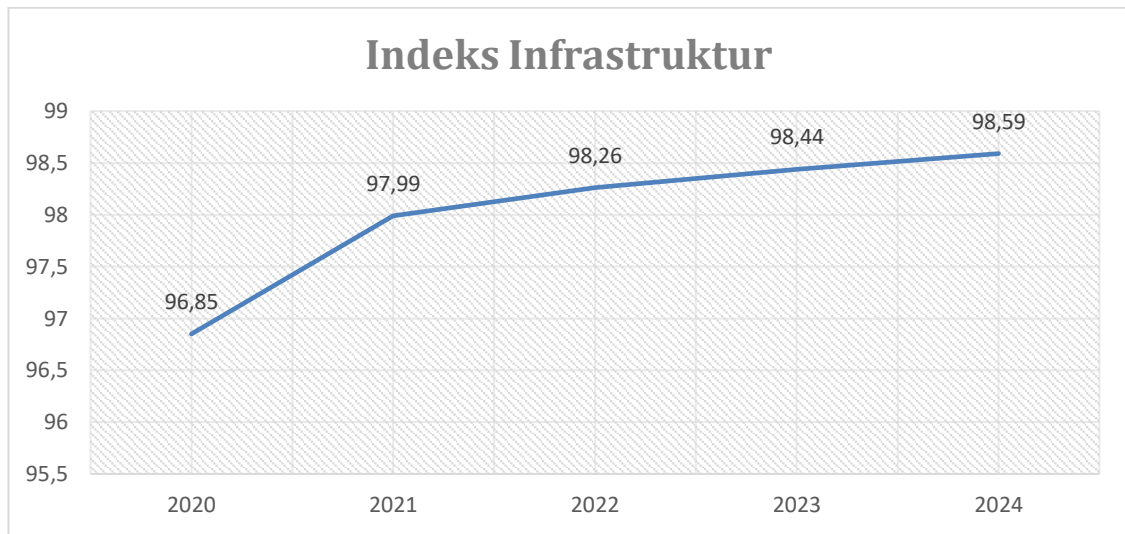
Sumber Data : BAPPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

A. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota :

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak (limbah domestik dan sampah), persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh capaian indeks infrastruktur Kota Madiun yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2023 realisasinya adalah 98,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,02%. Hal ini melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2023 yaitu 98,40. Sedangkan untuk tahun 2024 ini realisasi kinerjanya sebesar 98,59 dengan capaian kinerja sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu 98,59.

**Gambar III.9. Trend Kenaikan Indeks Infrastruktur
Tahun 2020-2024**



Sumber Data : BAPPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong sebagai berikut:

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif
- 2) Adanya aplikasi yang memudahkan pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditindaklanjuti
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang ditentukan;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak

- 3) Anggaran yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pembangunan hanya dapat dilakukan secara bertahap dan yang dilaksanakan adalah prioritas top down dari visi misi kepala daerah

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan/mempertahankan Indeks Infrastruktur :

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stageholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
- 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.
- 4) Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana prasarana dan infrastruktur perkotaan agar tetap representatif
- 5) Optimalisasi pengawasan/pengendalian secara rutin dari kerusakan atas sarana prasarana dan infrastruktur kota

B. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan lahan yang diinput dalam aplikasi <https://ppkl.menlhk.go.id/>.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2024 sebesar 62,21. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Capaian IKA Tahun 2024 yaitu 52,43, IKU Tahun 2024 yaitu 92,12 sedangkan IKL Tahun 2024 yaitu 24,18.

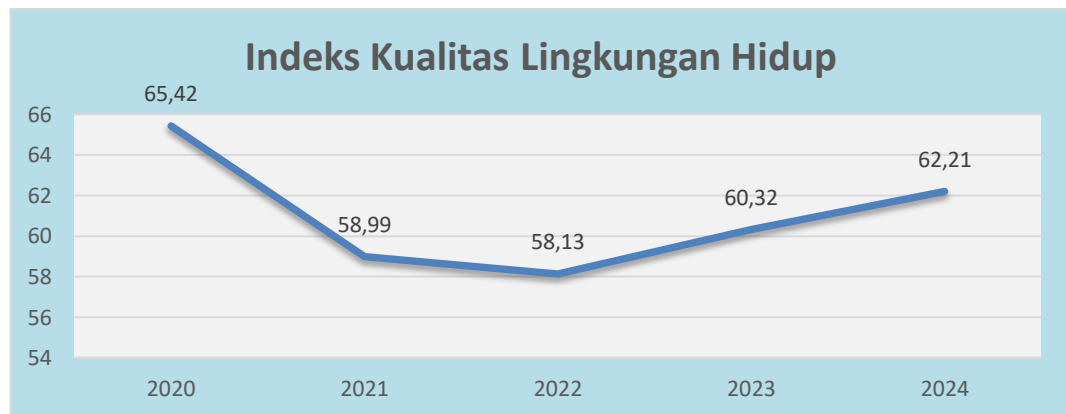
Adapun kriteria dalam penilaian IKLH adalah sebagai berikut :

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 90$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Berikut adalah data realisasi IKLH dalam 5 tahun terakhir

**Gambar III.10. Trend Kenaikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024**



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2023 yaitu 60,32 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2024 adalah 62,21 sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2024 berada dalam posisi "sedang". Diharapkan setiap tahun Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

1. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
2. Pemasangan ONLIMO atau online monitoring di ngebrak adalah sistem pemantauan kualitas air yang beroperasi secara kontinu, otomatis, dan online melalui aplikasi yang terhubung dengan sistem server KLHK
3. Memperluas kampung iklim di Kota Madiun sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Faktor penghambat yang mempengaruhi yaitu :

1. Semakin Kota Madiun menjadi Kota Wisata Iconik, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara
2. 2024 menjadi tahun usaha bagi Kota Madiun, banyak lahan lahan terbuka di jadikan bangunan tempat usaha, sehingga ruang terbuka prifat sangat banyak berkurang, sehingga menyebabkan nilai indeks kualitas lahan tidak bisa optimal
3. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan volume sampah meningkat, kondisi TPA Winongo sudah di ambang batas.
4. Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan
5. Kurang optimalnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH dan Penghijauan Kota oleh Perangkat Daerah terkait

- d. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
- f. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- g. Optimalisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

3. Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun didukung oleh 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran

Pada Misi 3 Tujuan 1 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2024 dengan Target Akhir RPJMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	83,71	84,51
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	95,18	95,26

Sumber : BPS Kota Madiun

Tabel III.18. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	82,35	84,51	102,62
	Indeks Pembangunan Gender	94,51	95,26	100,79

Sumber : BPS Kota Madiun

Tabel III.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	84,51	75,35	N/A
	Indeks Pembangunan Gender	95,26	92,19	N/A

Sumber : BPS Kota Madiun

1. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Keteny merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel III.20. IPM Kota Madiun Menurut Komponen

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PENGELUARAN PER KAPITA
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020	72,81	14,40	11,14	16.018
2021	72,83	14,41	11,37	16.095
2022	73,13	14,43	11,67	16.503
2023	73,44	14,44	11,82	17.115
2024	75,67	14,54	12,11	17.518

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun 2024

Selama 2019 hingga 2024, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2021 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2022 dan 2023.

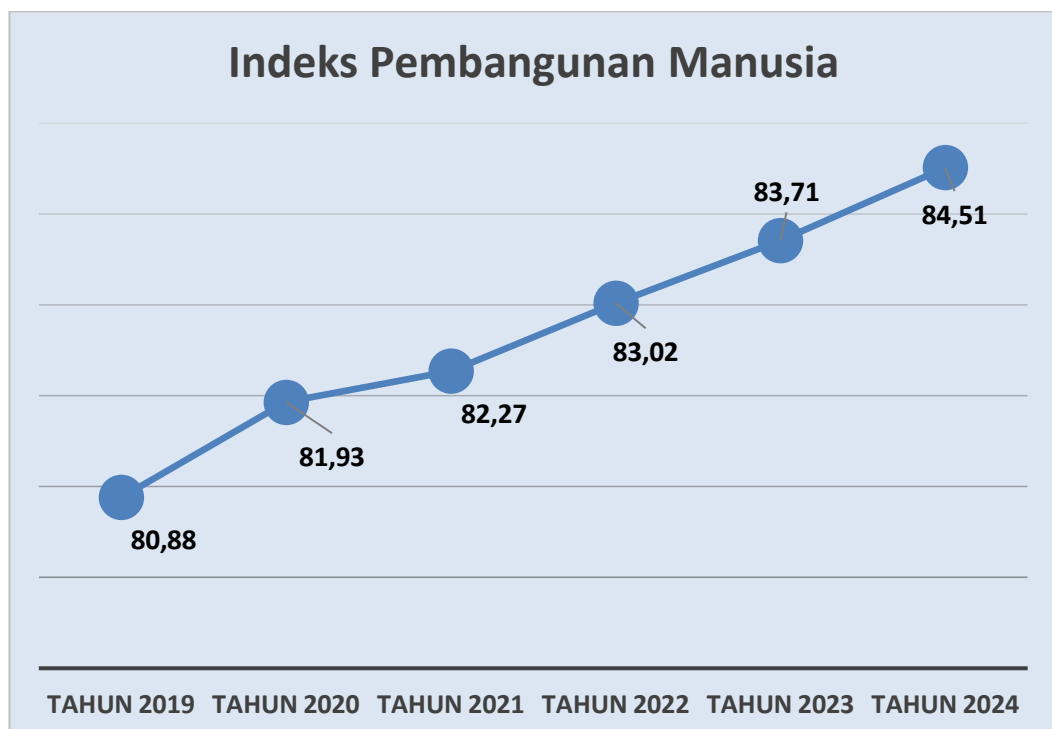
Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2024, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,75 tahun (2019) menjadi 75,67 tahun (2024). Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2024 di Kota Madiun diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,67 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2024, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,54 tahun (2024) atau naik sebesar 0,15 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,13 tahun (2019) menjadi 12,11 tahun (2024) atau naik 0,98 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XII. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2024, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Selanjutnya dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai 17,518 juta rupiah per tahun, naik sekitar 2,35 persen dibanding tahun 2023 lalu yang tercatat Rp. 17.115.000,00.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2024 sebesar 84,51 atau tumbuh 0,95 persen (meningkat 0,8 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

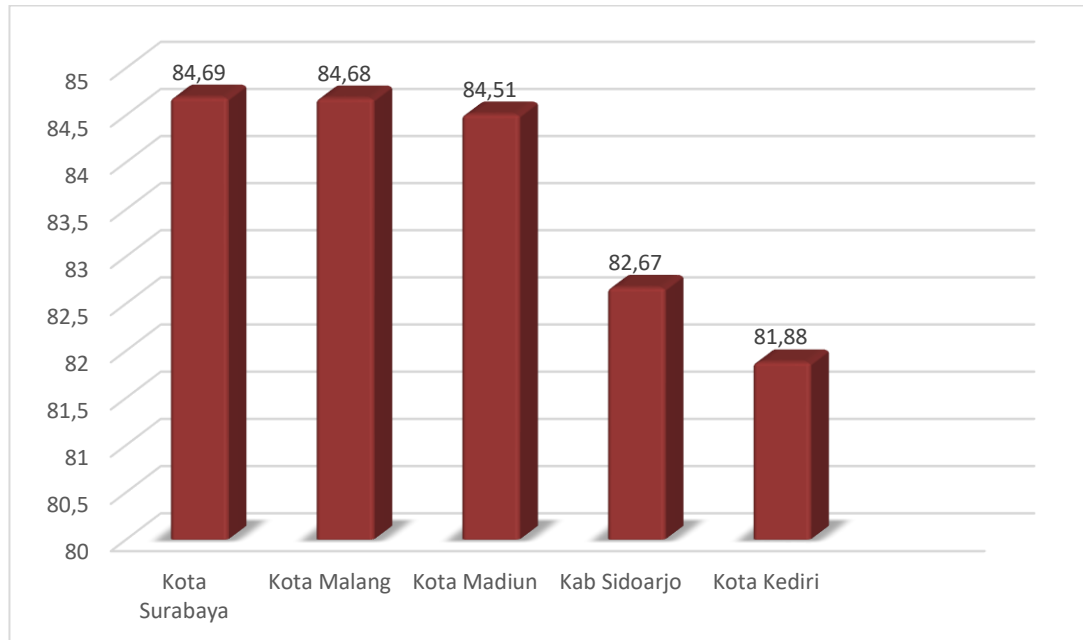
Gambar III.11. Perkembangan IPM Kota Madiun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2024

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2024 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 84,51. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2024 masih bertahan menjadi IPM berkategori "sangat tinggi". Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.

**Gambar III.12. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024
5 (lima) besar Kab/Kota se Jawa Timur**



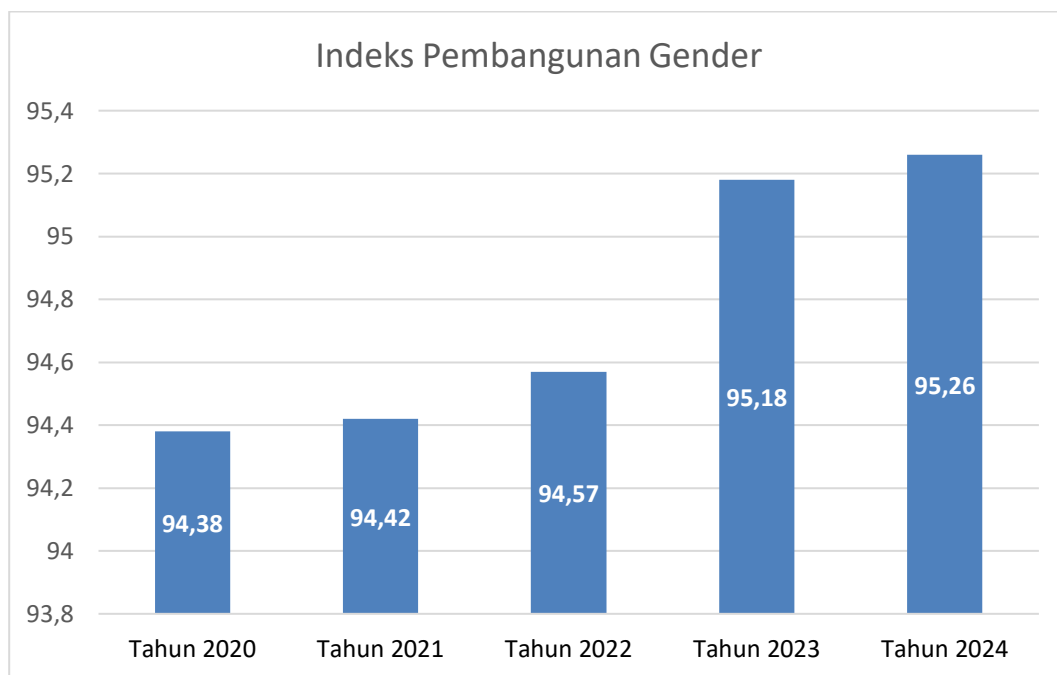
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2024

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Gambar III.13. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun
Tahun 2019-2023**



Sumber : BPS Kota Madiun 2025

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan. Indeks pada tahun 2020 sebesar 94,38 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 95,26. Secara umum IPG Kota Madiun mengalami peningkatan, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

Tujuan "Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing" didukung oleh 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.21. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 3 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43	14,54	100,76
		Rata-rata Lama Sekolah	11,67	12,11	103,77
3.1.2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13	75,67	103,47
3.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22 indeks	76,51	99,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

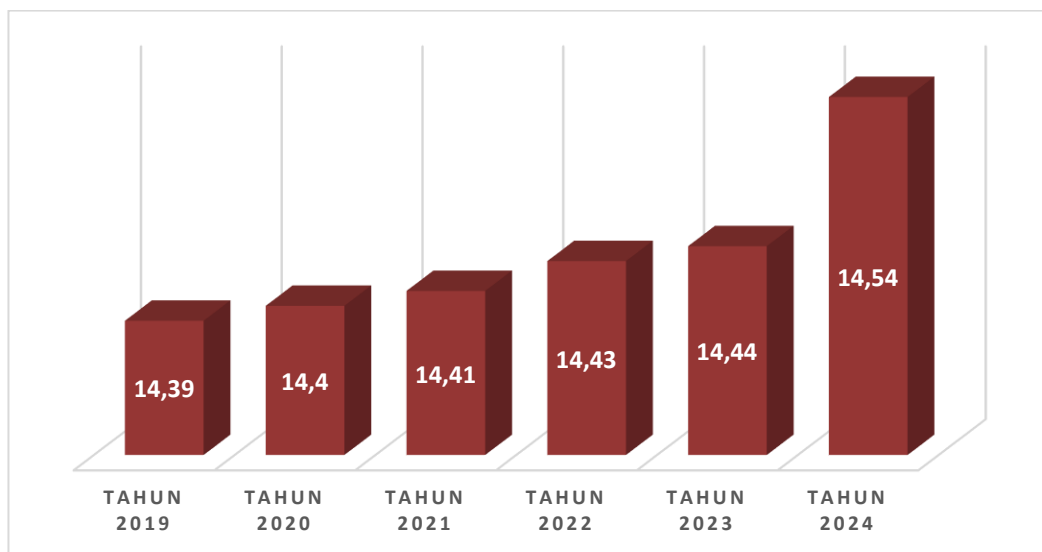
A. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat :

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2019 hingga 2024, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,39 tahun (2019) menjadi 14,54 tahun (2024) atau naik sebesar 1,15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Harapan Lama

Sekolah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 14,43 dengan capaian kinerja sebesar 100,76%. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2024, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,54 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2. Pertumbuhan yang positif tersebut menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

**Gambar III.14. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Madiun
Tahun 2019-2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2024

Faktor pendorong meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

1. Sekolah gratis di Kota Madiun
2. Adanya program Bantuan Beasiswa Pendidikan
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang pendidikan
4. Belanja pemerintah di bidang pendidikan

Faktor penghambat meningkatnya Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu, masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.

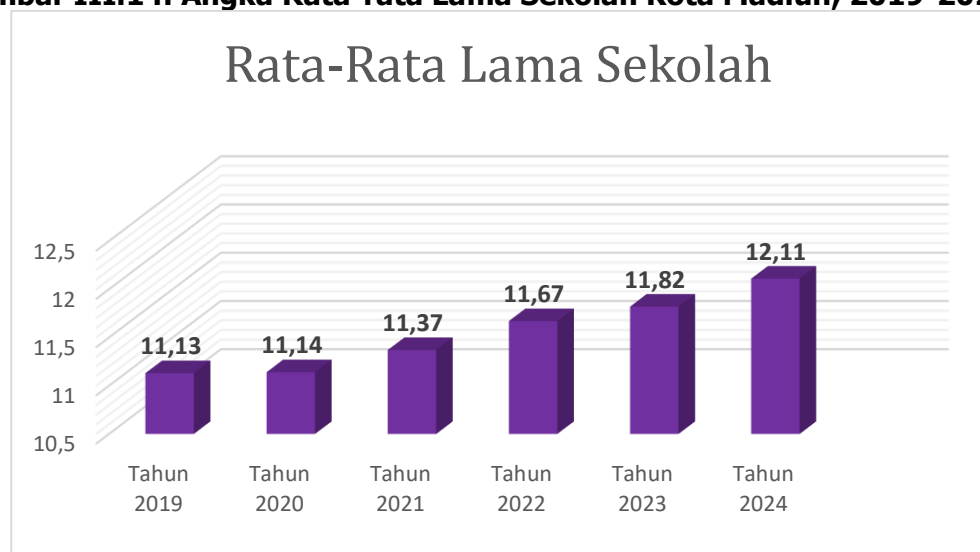
Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

1. Dilakukan pendataan terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Telah dibentuk tim untuk pendataan untuk anak tidak sekolah
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar
4. Meningkatkan kualitas pendidikan kejar paket

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Gambar III.14. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Madiun, 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2024

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 11,13, kemudian meningkat di tahun 2020 yaitu 11,14, naik lagi di tahun 2021 sebesar 11,37. Pada tahun 2024 realisasi indikator ini sebesar 12,11 atau naik 0,29 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 11,82, sehingga capaian kinerjanya adalah 103,77% dari target yang telah ditetapkan 11,67.

Kenaikan trend realisasi Indikator RLS disebabkan oleh adanya faktor-faktor pendorong yaitu:

1. Sekolah gratis di Kota Madiun
2. Adanya bantuan laptop, seragam, ongkos jahit serta akses internet gratis
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
4. Akses sekolah yang mudah dan terjangkau

Faktor penghambat meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu, masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

B. Sasaran 2 "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat":

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Perhitungan Angka Harapan Hidup sebelum tahun 2024 masih menggunakan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010). Namun pada laporan kinerja tahun 2024, metode perhitungan AHH sudah menggunakan hasil *Long Form* SP2020 (SP2020-LF), sehingga akan terdapat perbedaan data series AHH pada laporan kinerja tahun 2023 dan laporan kinerja tahun 2024.

Angka Harapan Hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut didukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Selama periode Tahun 2020 hingga 2024, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 74,82 tahun (2020) menjadi 75,67 tahun (2024) atau naik sebesar 0,85 tahun dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Gambar III.15. Trend Angka Harapan Hidup Kota Madiun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, Hasil Long Form SP 2020

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya tren kenaikan yang signifikan dari AHH di Kota Madiun dari Tahun 2020 ke Tahun 2024. Selain itu, indikator AHH tahun 2024 di Kota Madiun sudah melampaui target yang ditetapkan yang mencapai 103,47%. Walaupun AHH sudah melampaui target yang ditetapkan, namun masih diperlukan upaya yang mendukung peningkatan AHH agar tren AHH di Kota Madiun selalu meningkat setiap tahunnya.

Kenaikan tren AHH dan tercapainya target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 ini karena adanya dukungan faktor kesehatan berupa:

- Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

- b. Adanya skrining faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia. Hal tersebut dikarenakan adanya fenomena transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin penderita PTM.
- c. Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit tidak menular
- d. Kota Madiun sudah mendeklarasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sehingga sanitasi lingkungan sudah lebih baik.

Meskipun kondisi kesehatan di Kota Madiun sudah baik, namun masih ada isu yang menjadi perhatian, yaitu stunting, tuberkulosis dan demam berdarah. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2023, prevalensi stunting di Kota Madiun sebesar 12,8%, dan berada di bawah prevalensi Provinsi Jawa Timur (17,7%) dan nasional (21,5%). Meskipun masih di bawah prevalensi provinsi dan nasional, masih diperlukan intervensi lebih lanjut agar prevalensi stunting dapat terus ditekan dan menurun angkanya. Indonesia juga menempati peringkat kedua terbanyak di dunia untuk penyakit tuberkulosis menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sehingga perlu adanya peningkatan angka penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Hal tersebut bertujuan agar penularan bakteri tuberkulosis tidak semakin meluas dan dapat mencapai eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Madiun pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan 4 kali lipat dibanding tahun 2023. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 80,75 dan meningkat menjadi 328,09 pada tahun 2024. Hal tersebut memerlukan intervensi yang lebih inovatif agar tidak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD.

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan AHH pada tahun 2025 yaitu:

1. Mempertahankan agar tidak ada kematian pada ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
2. Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
3. Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular, antara lain:
 - a. Melaksanakan program Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis sehingga angka penemuan kasus tuberkulosis dan angka kesembuhan tuberkulosis juga meningkat
 - b. Meningkatkan pelaksanaan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat, melakukan fogging untuk daerah yang memenuhi syarat fogging, serta mengimplementasikan nyamuk ber-Wolbachia yang didukung oleh Kementerian Kesehatan agar kasus DBD di Kota Madiun dapat menurun
 - c. Meningkatkan cakupan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) agar dapat dideteksi lebih dini sehingga penderita segera mendapatkan pengobatan yang tepat agar tidak terjadi komplikasi
4. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, baik itu untuk masalah gizi kurang maupun gizi lebih
5. Meningkatkan upaya penurunan prevelensi stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif termasuk koordinasi dengan lintas sektor dan audit kasus stunting dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting
6. Meningkatkan layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di semua kelurahan di Kota Madiun sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.

C. Sasaran 3 “Meningkatnya Pemberdayaan Gender”

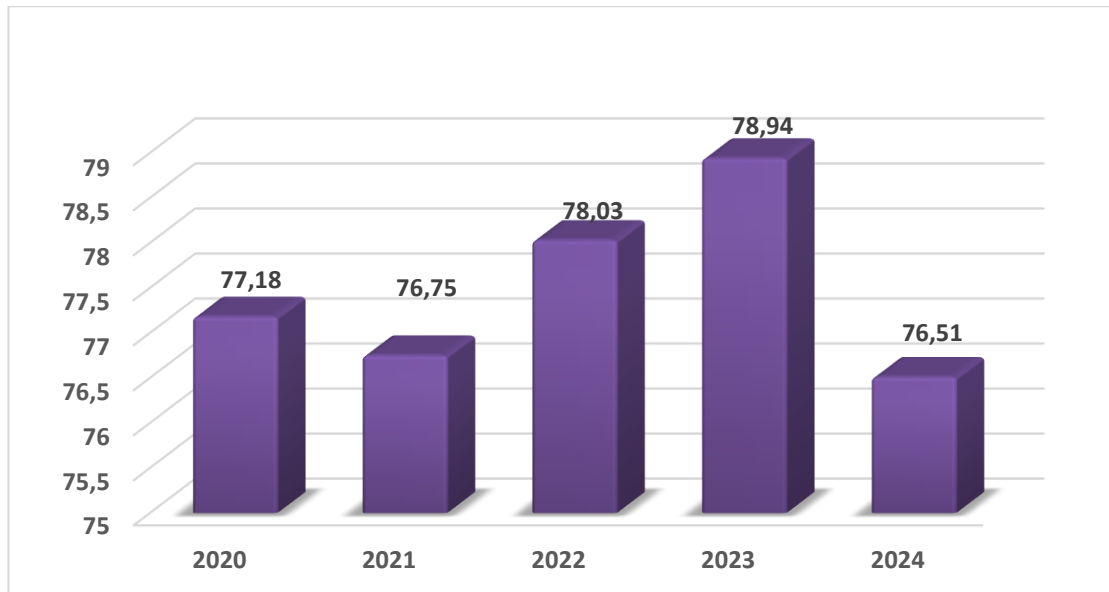
Indeks Pemberdayaan Gender

IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender, menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. IDG terdiri tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh non pertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

IDG di Kota Madiun pada tahun 2020 sebesar 77,18. IDG Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun dari tahun sebelumnya tersebut dipengaruhi oleh persentase keterwakilan anggota perempuan di DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Pada Tahun Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 76,75, hal ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana peranan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dimungkinkan berkurang, selain itu juga kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menurun sehingga Distribusi Pendapatan antara laki-laki dan perempuan terjadi ketimpangan. IDG Tahun 2022 naik kembali menjadi 78,03, hal ini disebabkan oleh perekonomian yang mulai membaik, Perdagangan online yang makin marak mendesak posisi perempuan terbiasa bekerja di wilayah UMKM sehingga dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga. IDG Tahun 2023, IDG Kota Madiun mengalami kenaikan. IDG Kota Madiun tahun 2023 sebesar 78,94. Untuk tahun 2024 IDG mengalami penurunan Kembali yaitu menjadi 76,51. Hal ini dikarenakan penurunan partisipasi Perempuan dalam politik dan ekonomi, serta adanya tantangan dalam bidang Kesehatan reproduksi

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

Gambar III.16. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kota Madiun 2024

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian kinerja IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- Lebih mengintensifkan sosialisasi secara berkelanjutan kepada perempuan agar lebih berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik
- Dilakukannya pelatihan kepada perempuan agar lebih mandiri sehingga dapat membantu perekonomian keluarga sehingga terjadi keseimbangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki
- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai

tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan

- d. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;

- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

4. Misi Keempat : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun didukung oleh 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran

Pada Misi 4 Tujuan 1 terdapat 1 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel III.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	6,87**

Tabel III.23. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,40	6,87**	106,68%**

Tabel III.24. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87**	6,00**	6,31**

Sumber : Bappelitbangda Kota Madiun, Bappelitbangda Provinsi Jawa Timur

**Angka 2021 dikarenakan angka 2022 dan seterusnya belum rilis

1. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Pilar tersebut yaitu :

1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita
- Share manufaktur terhadap PDRB
- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat.

Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator :

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas

c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan.

Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

2) PILAR 2 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat,

ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

Dengan indikator :

- Rasio Pendapatan Gini
- Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indikator:

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 3 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

a. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator :

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan

b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

Dengan Indikator :

- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dengan Indikator :

- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di RPJMD Kota Madiun ditargetkan di tahun 2024 sebesar 6,87, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan indikator yang dihitung oleh BAPPENAS dan terakhir mengeluarkan angka penghitungan di tahun 2021. Pada Tahun 2022 dan 2023 BAPPENAS belum mengeluarkan nilai lagi sehingga angka IPEI Kota Madiun belum bisa diukur mengalami kenaikan atau penurunan. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kota Madiun tahun 2021 sebesar 6,87 yang tergolong kategori memuaskan.

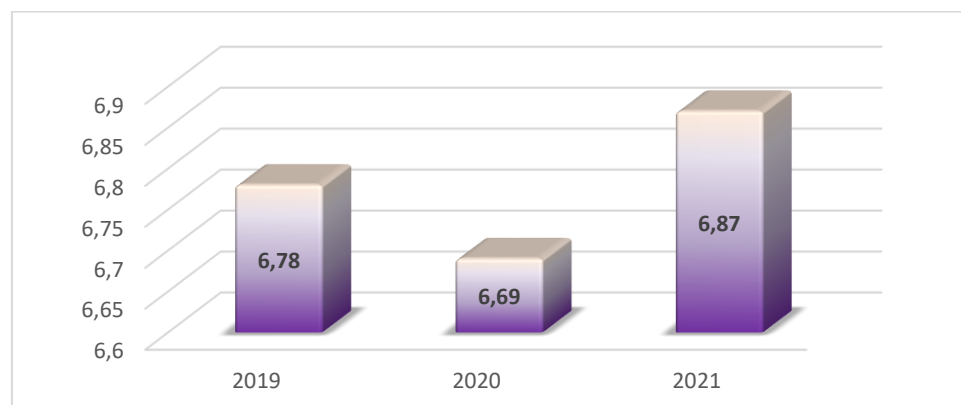
Untuk tahun 2021 Kota Madiun mendapat nilai untuk tiga pilar yaitu:

1. Pilar 1 pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di daerah mendapat nilai poin 6,16 (tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri)
2. Pilar 2 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di daerah mendapatkan nilai poin 6,79 (tertinggi ketiga setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Mojokerto)
3. Pilar 3 perluasan akses dan kesempatan di daerah (tertinggi kedua setelah Kota Blitar)

Meskipun demikian Pemerinta Kota Madiun tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di tiga pilar tersebut, yaitu :

1. Dengan menciptakan lapangan kerja produktif dan menguntungkan dengan kegiatan-kegiatan padat karya di kelurahan-kelurahan
2. Penyediaan jejaring pengaman sosial
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Menetapkan kebijakan publik yang memadai

**Gambar III.17 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Tahun 2019 s.d. 2021**



Sumber : BAPPENAS

Tujuan “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif” didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel III. 25. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 4 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
4.1.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	5,00%	4,30%	114
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	7,98%	4,59%	57,51
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa	21,57%	30,48	141,31

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

A. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran terbuka

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

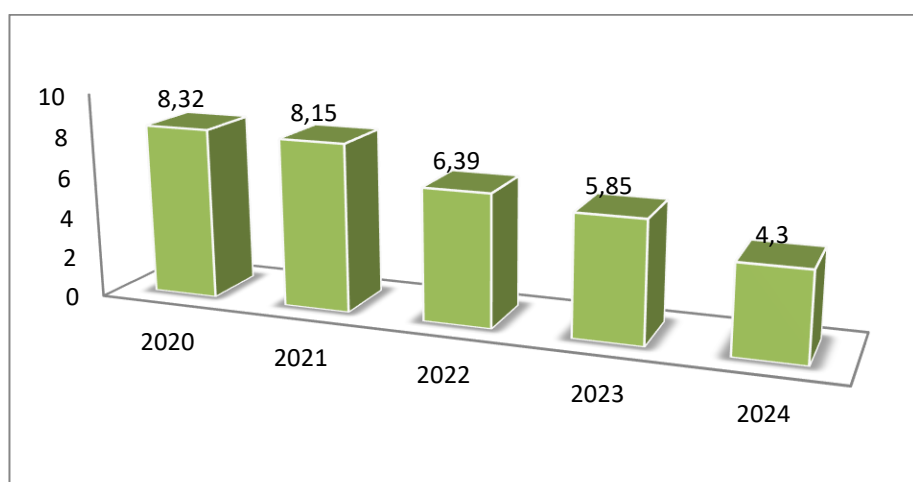
Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran.

Target Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019 – 2024 sebesar 5,00%. Berdasarkan hasil Sakernas oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2024 sebesar 4,30%, dengan demikian Angka TPT tahun 2024 sudah memenuhi target TPT tahun 2024, dengan capaian kinerja sebesar 114%.

Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun berdasarkan hasil dari Sakernas oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun sebesar 4,30% dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 5,85% sehingga mengalami penurunan sebesar 1,55%

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Gambar III.18. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2020-2024



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Madiun tahun 2023 sebesar 5,85% dan TPT tahun 2024 sebesar 4,30%, turun sebesar 1,55 poin persen. Penurunan TPT ini menggambarkan keberhasilan program kerja dan kegiatan bidang ketenagakerjaan di tahun 2023 dan 2024.

Penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2024 tercatat mencapai 163.08 ribu jiwa yang mengalami kenaikan sebesar 1,65 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Apabila dilihat dari pola usia kerja dalam rentang tiga tahun terakhir ini, usia kerja di Kota Madiun menunjukkan pola yang hampir sama dimana jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding jumlah bukan angkatan kerja.

Tabel III. 26. Status Keadaan Ketenagakerjaan

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agustus (2024- 2023)	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja	161.428	163.080	1.652	1,02
Angkatan Kerja	111.852	115.142	3.290	2,94
- Bekerja	105.313	110.196	4.883	4,64
- Pengangguran	6.539	4.946	-1.593	-24,36
Bukan Angkatan Kerja	49.576	47.938	-1.638	-3,30
	persen	persen	persen	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,85	4,30	-1,55	
- Laki-laki	6,07	4,46	-1,61	
- Perempuan	5,57	4,11	-1,46	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,29	70,60	1,31	
- Laki-Laki	78,69	78,87	0,18	
- Perempuan	60,42	62,81	2,39	

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada pergeseran dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana jumlah angkatan kerja di Kota Madiun mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen poin dan bukan angkatan kerja mengalami penurunan 3,30 persen poin.

Lebih detailnya, penduduk usia kerja di Kota Madiun tahun 2023 penduduk bekerja sebanyak 105.313 jiwa, pengangguran 6.539 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 49.576 jiwa. Sedangkan untuk kondisi tahun 2024 sebagian besar adalah penduduk yang bekerja dengan jumlah mencapai 110.196 jiwa, pengangguran sebanyak 4.946 jiwa, dan bukan angkatan kerja sebanyak 47.938 jiwa.

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2023 ke 2024 terdapat kenaikan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan jumlah penduduk bekerja yang meningkat, dan penurunan jumlah bukan Angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran menurun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk bekerja naik sebanyak 4.883 jiwa atau naik sebesar 4,64 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 6.539 menjadi 4.946 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 1.593 jiwa atau 24,36 persen. Penurunan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja dari 49.576 menjadi 47.938 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 1.638 jiwa atau 3,30 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 161.428 jiwa menjadi 163.080 jiwa di tahun 2024, dengan persentase kenaikan sebesar 1,02%.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2024 adalah sebesar 4,30 %, yaitu perbandingan antara pengangguran sebesar 4.946 orang dengan angkatan kerja sebesar 110.196 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,55 % dari TPT tahun 2023 yaitu sebesar 5,85 %, dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 1.593 orang. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 ini diakibatkan oleh banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia dan wirausaha baru selain itu masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja sehingga menyebabkan jumlah

pengangguran semakin menurun, dan ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) sebesar 1,02 persen poin dari tahun sebelumnya atau naik sebanyak 1.652 orang. Peningkatan jumlah usia kerja di Kota Madiun ini dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja sebanyak 3.290 orang. Apabila di bandingkan dengan target TPT tahun 2024 sebesar 5,00 %, realisasi TPT tahun 2024 sebesar 4,30 %. Untuk TPT apabila Capaian Kinerja lebih kecil dari target maka Capaian kinerja semakin baik, karena angka pengangguran lebih kecil dari target.

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka menurun tetapi didominasi oleh sektor jasa sedangkan pada sektor ini tidak terlalu besar penyerapan tenaga kerjanya.

A. Faktor Pendorong

1. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai berkembang setelah selesainya pandemi COVID-19.
2. Sudah mulai dibukanya sejumlah lowongan pekerjaan oleh para pelaku usaha/pemberi kerja dari dalam dan luar negeri.
3. Industri kreatif yang semakin berkembang didukung perkembangan teknologi digital yang berkembang pesat.
4. Terjalannya kerja sama dengan lembaga maupun perusahaan dalam peningkatan *Soft Skill* dan *Hard Skill* serta penempatan para pencari kerja.
5. Program kegiatan Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat mendukung dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, diantaranya Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja, Job Fair dan Aplikasi SICAKER.

B. Faktor Penghambat

1. Penyebab pengangguran di Kota Madiun adalah adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru

bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.

2. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Hal tersebut menjadi penyebab pengangguran dengan banyaknya lulusan muda yang menganggur untuk menunggu pekerjaan.
3. Sebuah perusahaan yang memiliki lowongan pekerjaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria sesuai dengan jabatan yang akan ditempati oleh calon karyawan tersebut. Namun menjadi kendala ketika sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan dengan skill yang tinggi. Secara otomatis, hanya akan ada beberapa pelamar yang memiliki kesempatan. Hal ini disebabkan karena jarang ada pelamar yang memiliki banyak keterampilan untuk menunjang posisi di suatu perusahaan.
4. Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

C. Upaya yang dilaksanakan dan Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan kondisi tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi
- b. Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.
- c. Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di

sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.

- d. Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- e. Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat
- f. Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- g. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- h. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- i. Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan
- j. *Updating* data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah penganggutan di Kota Madiun.

B. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

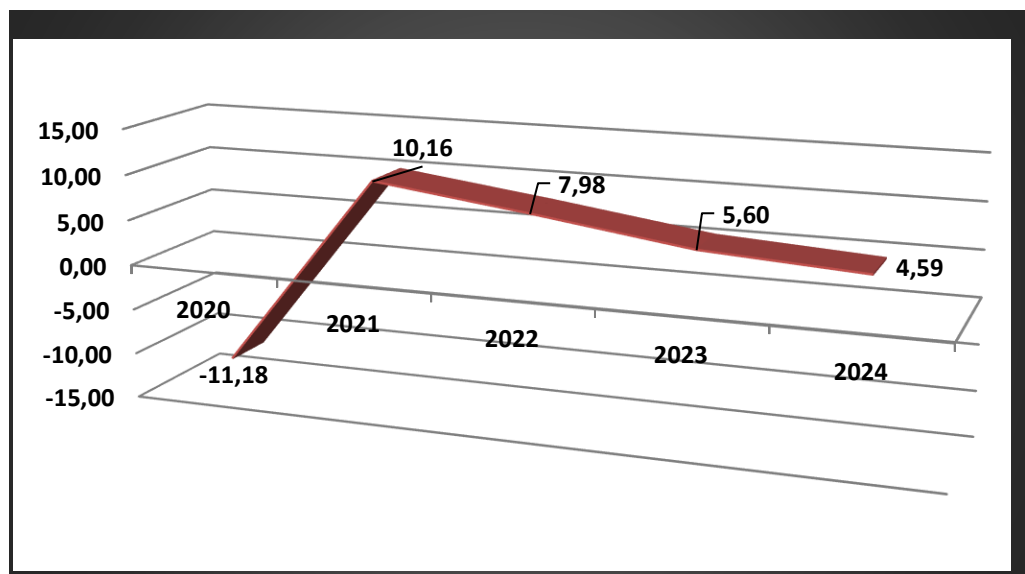
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air pengelolaan sampah; limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan.

PDRB sektor perdagangan berdasarkan realisasi data BPS sebesar 5,60 (data tahun 2023) untuk tahun 2024 sebesar 4,59. Hal tersebut terjadi bukan karena menurunnya aktivitas perdagangan namun karena perbandingan meningkatnya PDRB pada kategori lainnya sangat tinggi sehingga kategori pada sektor perdagangan terlihat menurun. Hal ini dibuktikan dengan total peningkatan pada secara keseluruhan tingkat perekonomian Kota Madiun tahun 2023 sebesar 5,80% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,52% (Data Tahun 2023). Adapun perkembangan PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun mulai tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**Gambar III.19. PDRB Sektor Perdagangan di Kota Madiun
Tahun 2020 – 2024**



Sumber : BPS Kota Madiun

Upaya-upaya dalam peningkatan capaian PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat (WARTEK Inflasi).
2. Meningkatkan akses jalan, transportasi publik, dan sistem distribusi barang untuk memudahkan perdagangan. Ini akan mempercepat perputaran barang dan meningkatkan efisiensi
3. Revitalisasi dan memperbaiki fasilitas pasar tradisional serta mendorong pembangunan pasar modern yang lebih nyaman bagi konsumen dan pedagang
4. Pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang manajemen usaha, pemasaran, serta penggunaan teknologi untuk memperluas pasar, baik secara offline maupun online
5. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan
6. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
7. Mengembangkan kawasan wisata yang memiliki nilai tambah dari sektor perdagangan, seperti pusat oleh-oleh khas Madiun, galeri seni, atau pasar wisata yang dapat menarik lebih banyak pengunjung
8. Memperkuat kolaborasi antara sektor pariwisata dengan sektor perdagangan untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung

Kontribusi Perangkat Daerah dalam indikator PDRB sektor perdagangan:

1. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah
2. Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah
3. Penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur perdagangan, seperti pasar, jalan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang memperlancar distribusi barang dan jasa

4. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, dan teknologi, termasuk pelatihan untuk memanfaatkan platform digital dalam menjangkau pasar yang lebih luas
5. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, perangkat daerah bisa membantu pelaku usaha memperkenalkan produk lokal kepada pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, maupun event-event
6. Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi dalam sektor perdagangan

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Jasa Lainnya. Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional. usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan

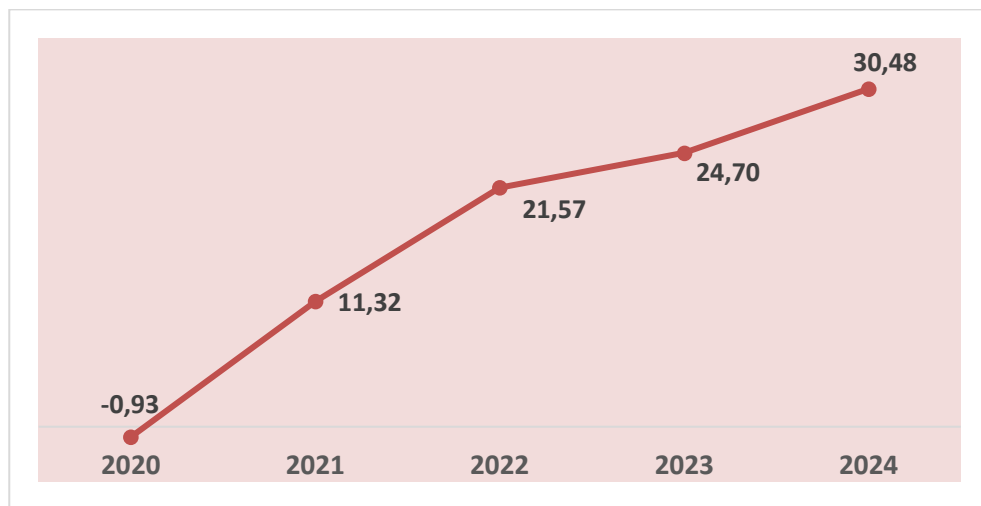
dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

Jasa Pendidikan/Education Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokkan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini. Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi. Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

Jasa Kesehatan cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Jasa Lainnya/Other Services Activitie Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

Gambar III.20 PDRB Sektor Jasa di Kota Madiun Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kota Madiun

Untuk data capaian tahun 2024 sebesar 30,48% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 21,57%. Untuk data Tahun 2023 capaian PDRB sektor jasa Tahun 2023 mencapai 24,7% jauh berada diatas target sebesar 11,32%. Untuk data series pertumbuhan PDRB sektor jasa atas dasar harga konstan menurut BPS pada tahun 2022 adalah sebesar 21,57 dengan capaian 190,54%. Pada tahun 2021 adalah sebesar 11,32 dengan capaian sebesar 195,17% jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -0,93 atau mengalami kenaikan sebesar 12,25 poin.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan capaian PDRB di sektor jasa yaitu:

1. Revitalisasi pasar – pasar yang ada di Kota Madiun.
2. Mengembangkan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata, seperti pembangunan fasilitas publik, destinasi wisata, dan aksesibilitas menuju tempat-tempat wisata yaitu dengan pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun, lapak-lapak di Kelurahan, Pahlawan Bisnis Center (PBC).
3. Menyelenggarakan berbagai event dan festival, seperti Festival Budaya Madiun, yang tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mendongkrak sektor jasa di bidang kuliner, akomodasi, dan transportasi
4. Pembangunan jalur sepeda wisata penghubung lapak.
5. Pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha jasa untuk memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk dan layanan mereka secara online
6. Pembangunan infrastruktur pendukung selain transportasi, perbaikan fasilitas umum seperti jalan, area parkir, dan aksesibilitas ke kawasan industri dan perdagangan juga menjadi prioritas untuk mendukung sektor jasa
7. Pengawasan dan kalibrasi berbagai macam alat ukur yang digunakan di sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya
8. Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha sektor jasa dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investor, terutama di sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB
9. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan di Kota Madiun, baik rumah sakit, klinik, serta pusat layanan kesehatan lainnya, sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB sektor jasa. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan berkontribusi pada pengembangan sektor kesehatan sebagai bagian dari sektor jasa

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya promosi yang efektif dan pemasaran yang efisien dapat membatasi perkembangan sektor jasa di Kota Madiun. Jika potensi wisata atau produk jasa yang ada tidak dipromosikan dengan baik, hal ini akan menghambat masuknya pengunjung atau konsumen yang potensial
2. Persaingan antar penyedia jasa yang semakin ketat, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi dan layanan berbasis digital, dapat menghambat pertumbuhan sektor jasa. Pengusaha jasa yang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar yang berubah dapat tertinggal
3. Sektor jasa di Kota Madiun terlalu bergantung pada satu atau beberapa jenis layanan
4. Sektor jasa yang kurang berinovasi atau lambat dalam mengadopsi teknologi baru dapat terhambat dalam menghadapi tren global seperti e-commerce, digitalisasi, dan otomatisasi

Faktor Pendorong:

1. Tingkat inflasi daerah yang terkendali.
2. Tersedianya jaminan sosial melalui asuransi tenaga kerja, kesehatan dan kematian bagi pekerja.
3. Menurunnya angka kemiskinan.
4. Sarana prasarana umum atau fasilitas publik yang memadai seperti jalan, jembatan, sanitasi, dan lain-lain sehingga memudahkan aksesibilitas di Kota Madiun
5. Perkembangan teknologi informasi yang pesat juga mendorong sektor jasa seperti e-commerce, layanan digital, dan jasa berbasis teknologi lainnya yang menjadi lebih penting di kehidupan sehari-hari
6. Meningkatnya fasilitas layanan kesehatan di Kota Madiun, baik rumah sakit, klinik, serta pusat layanan kesehatan lainnya

7. Kemudahan bagi pelaku usaha sektor jasa dengan penyederhanaan prosedur perizinan dan regulasi yang mendukung investasi di sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya
8. Pertumbuhan perdagangan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, mendorong sektor jasa seperti distribusi, pengepakan, dan layanan terkait lainnya

Pada Misi 4 Tujuan 2 terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut

Tabel III.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi	
			2023 (n-1)	2024 (n)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	82,88	84,23
	Indek Gini	0,35	0,416	0,435

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

Tabel III.28 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Akhir Periode RPJMD (%)
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	77,2	84,23	109,11
	Indek Gini	0,35	0,435	75,71

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

Tabel III.29. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi dan Realisasi Nasional

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Indeks Ketentraman	82,88	N/A	N/A
	Indek Gini	0,435	0,372	0,381

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun, Badan Pusat Statistik

1. Indeks Ketentraman

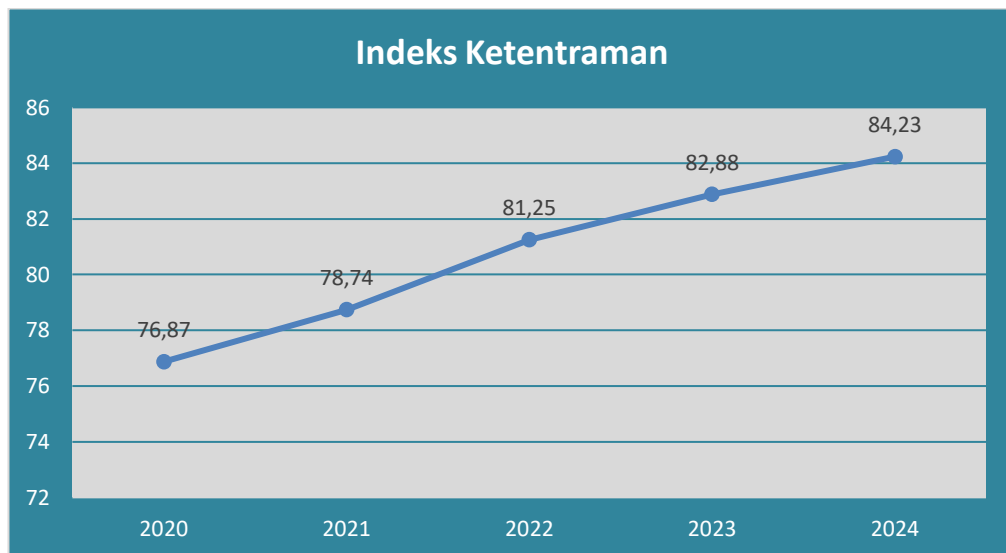
Indeks Ketentraman sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Capaian indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2024 adalah 84,23 dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024. Peningkatan keamanan dan ketentraman akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman:

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma-norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

**Gambar III.21 Indeks Ketentraman Kota Madiun
Tahun 2020-2024**



Sumber : Satpol Kota Madiun

Survei Indeks Ketentraman mulai dilaksanakan tahun 2020 dengan hasil nilai 76,87 kemudian tahun 2021 mendapatkan nilai 78,74 naik 1,87 poin dibanding tahun sebelumnya, tahun 2022 didapatkan nilai 81,25 naik 2,51 poin dibanding tahun 2021, kemudian tahun 2023 didapatkan nilai 82,88 naik 1,63 poin dibanding tahun 2022. Dan tahun 2024 ini mendapatkan nilai 84,23 dengan peringkat "B" berpredikat "Kondusif" naik 1,35 poin dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa tren setiap tahun selalu positif (naik) untuk hasil nilai survei indeks ketentraman. Hasil nilai indeks dipengaruhi beberapa faktor yang mendorong kenaikan nilai survei setiap tahun.

Dari sisi Variabel, V-4 Keagamaan peringkat pertama/perolehan nilai tertinggi dengan Nilai Interval 3,56 setara dengan Nilai Konversi 88,89. Ada dua variabel dengan peringkat paling rendah/perolehan nilai paling rendah yakni V-16 Bebas Dari Resiko Bencana Alam maupun Non Alam perolehan Nilai Interval 3,29 setara dengan Nilai Konversi 82,35 dan V-14 Bebas Dari Ketimpangan Ekonomi perolehan Nilai Interval 3,28 setara dengan Nilai Konversi 82,32.

Sedangkan dari empat dimensi, diketahui D-2 Dimensi pada Persepsi Suasana Tenang mendapatkan nilai peringkat tertinggi yakni Nilai Interval 3,44 atau Nilai Konversi 85,96 sedangkan D-4 Dimensi pada Persepsi Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma-Norma yang Ada (Ketertiban Umum) menjadi dimensi dengan nilai paling rendah yakni Nilai Interval 3,33 atau Nilai Konversi 83,36.

Faktor pendorong yaitu kesadaran aparaturnya dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri. Masyarakat juga memiliki peran dalam meningkatkan ketentraman, oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi sistem ketentraman dan ketertiban serta keamanan lingkungan, diantaranya dengan mengedukasi dan menyadarkan untuk ikut peduli terhadap ketentraman, ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini sekaligus mengingatkan, bahwa setiap masyarakat /komunitas membutuhkan ketentraman dan ketertiban untuk mendukung berbagai aktivitas.

Terkait dimensi bebas dari ketimpangan ekonomi, untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah yang strategis dan berkualitas, bertujuan meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat.

2. meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, yang tidak cuma spesifik di satu sektor, melainkan menyeluruh, seperti industri kecil dan jasa yang bisa tumbuh di mana saja. Juga, agar lebih memfokuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi padat karya atau pembangunan yang lebih mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Terkait dengan nilai variabel bebas dari resiko bencana alam maupun non alam, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan dan kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi dampak yang timbul akibat bencana
3. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta pelaksanaan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini yang berbasis pada kearifan lokal

Terkait dengan Dimensi Persepsi Keteraturan Sesuai Hukum yang Berlaku dan Norma-Norma yang Ada, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawab Satpol PP, khususnya dalam hal: a. menegakkan Perda dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat
2. Melaksanakan program penegakan Perda/Peraturan Walikota, yakni dengan melakukan inventarisasi keteraturan sesuai hukum yang berlaku dan norma-norma yang ada, monitoring pelaksanaan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota secara lebih humanis.

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara konsisten dan berkesinambungan, khususnya pembinaan dan pengembangan kapasitas anggota LINMAS sekaligus melakukan pendataan anggota LINMAS

2. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.

Penghitungan Indeks Gini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

dimana,

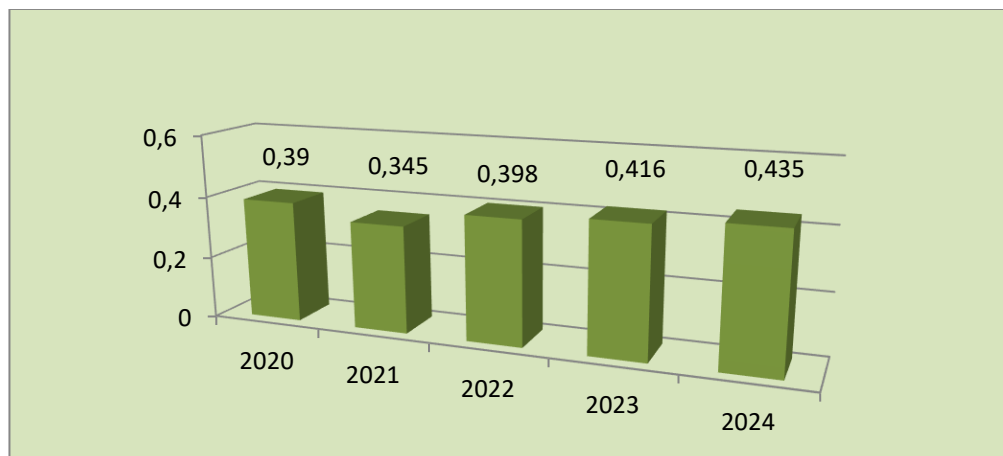
- GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)
- P_i : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_i : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i
- F_{i-1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut :

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
$x = 0$	Merata sempurna
$0 < x < 0,4$	Tingkat ketimpangan rendah
$0,4 < x < 0,5$	Tingkat ketimpangan sedang
$0,5 < x < 1$	Tingkat ketimpangan tinggi
$x = 1$	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Adapun data series Indeks Gini Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana berikut :

Gambar III.21 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Indeks Gini Kota Madiun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan ketimpangan dari Tahun 2019 menjadi sebesar 0,39, kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid 19 dimana kondisi pada saat itu perekonomian secara keseluruhan menurun sehingga terjadi kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah. Untuk Tahun 2021 mengalami kenaikan angka yang artinya membaik dari Tahun 2020 menjadi sebesar 0,345, hal ini menandakan mulai membaiknya tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam satu wilayah, akan tetapi Indeks

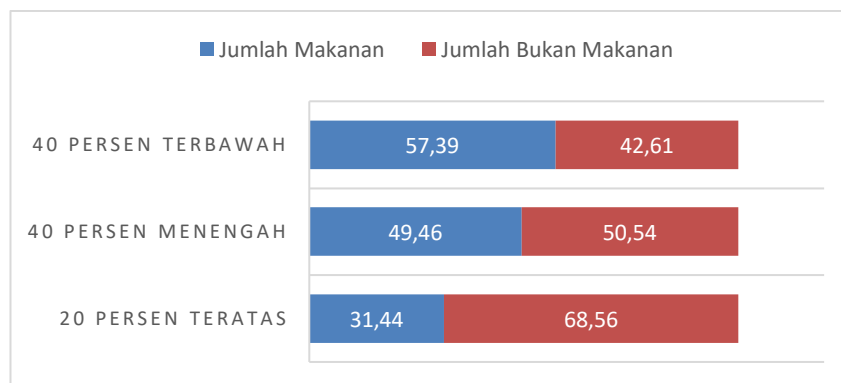
Gini pada Tahun 2022 mengalami penurunan angka kembali menjadi sebesar 0,398, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 terjadi inflasi yang tinggi hampir di semua daerah bahkan di sebagian besar negara terjadi kenaikan inflasi yang tinggi. Indeks Gini tahun 2023 di angka 0,416 dan di tahun 2024 mengalami kenaikan ketimpangan dengan indeks gini sebesar 0,435.

Berdasarkan data SUSENAS tahun 2024, secara rata-rata, penduduk Kota Madiun mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.043.730 per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Jika dikonversi secara harian, maka rata-rata penduduk Kota Madiun mengeluarkan Rp. 68.124,00 per orang per hari. Selanjutnya, jika dalam satu rumah tangga terdapat 4 anggota rumah tangga, maka secara rata-rata rumah tangga tersebut memiliki pengeluaran sebesar Rp 8.174.730,00 dalam sebulan.

Pada data Susenas, pengeluaran penduduk diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya data tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yakni 40% penduduk dengan pengeluaran terendah, 40% penduduk dengan pengeluaran menengah, dan 20% penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Jika dilihat menurut kelompok penduduk berdasarkan pengeluarannya, semakin tinggi kelompok pengeluaran rumah tangga, maka proporsi pengeluaran makanannya akan semakin kecil.

Gambar III.22

Proporsi Pengeluaran Penduduk Kota Madiun Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Masyarakat Berdasarkan Pengeluarannya



Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Berdasarkan grafik diatas, pada kelompok 40% penduduk berpengeluaran terbawah, proporsi pengeluaran untuk makanan sebesar 57,39 persen dari total pengeluaran penduduk, lebih besar dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan.

Pada kelompok 40% penduduk berpengeluaran menengah dan kelompok 20% teratas, proporsi pengeluaran lebih besar teralokasi untuk kebutuhan non makanan dibandingkan untuk makanan, bahkan pada kelompok 20% penduduk berpengeluaran teratas, proporsi pengeluaran untuk makanan hanya 31,44 persen dari total pengeluaran mereka.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penyebab kenaikan ketimpangan pada tahun 2024 dikarenakan adanya kenaikan alokasi pengeluaran pada kalangan atas terutama pengeluaran non makanan yang meningkat. Sedangkan pada kelompok menengah-bawah pengeluaran untuk non makanan semakin merosot, dikarenakan ada beberapa faktor seperti inflasi yang membuat kalangan menengah-bawah untuk menahan pengeluaran non makanan dan memfokuskan pengeluaran pada makanan. Artinya adalah terdapat ketimpangan pendapatan yang semakin melebar antara kelompok teratas dengan kelompok menengah ke bawah. Meskipun angkanya naik tetapi kondisi ketimpangan di Kota Madiun masuk dalam kategori ketimpangan moderat atau sedang yang di antara angka $0,4 < x < 0,5$. Hal ini karena kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang signifikan yang juga berlaku secara nasional.

Kebijakan membuka peluang investasi secara luas dan kemudahan akses melalui kemajuan teknologi tentunya membawa dampak positif dan negatif ke masyarakat. Adanya pergeseran kultur di masyarakat yang menyebabkan perubahan gaya hidup juga berpengaruh pada ketimpangan ini.

Dengan masuknya investasi di bidang jasa dan perdagangan yang menawarkan konsep "One stop shopping", serta kemajuan teknologi dengan berbagai aplikasi online, menyebabkan "kue ekonomi" yang ada di Kota Madiun

lebih banyak dinikmati oleh kelompok atas, dibandingkan kelompok menengah dan kelompok terbawah yang kemampuannya terbatas.

Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan indeks gini, maka:

1. perlu dukungan untuk meningkatkan kegiatan padat karya, sehingga membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan.
2. Diperlukan juga kebijakan serta komitmen yang jelas dalam pengaturan investasi di Kota Madiun, sehingga investasi tidak hanya memberikan keuntungan pada kelompok atas (pemilik modal), tetapi kelompok menengah kebawah juga merasakan manfaat dari investasi
3. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu agar ekonominya tetap stabil
4. Peningkatan softskill pada siswa sekolah menengah untuk dapat meningkatkan kualitas SDM
5. Peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur sarana prasarana umum dan kesehatan sehingga seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses fasilitas umum dan kesehatan yang merata.
6. Memberikan bantuan akses perbankan kepada para UMKM sehingga dapat meningkatkan skala usaha yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah.
- 2) Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT.
- 3) Bantuan Sosial Air Bersih
- 4) Bantuan Sosial Lansia Non Potensial
- 5) Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar
- 6) Santunan Kematian

- 7) Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya)
- 8) Bantuan Sosial untuk Janda Perintis
- 9) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 10) Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
- 11) Melakukan pemberdayaan UMKM dan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya
- 12) Mengintensifkan warung tekan inflasi dalam upaya penyetabilan harga

Tujuan "Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat" didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan capaian sebagai berikut :

Tabel. III.30. Hasil Kinerja Sasaran Tujuan 5 Tahun 2024

Sasaran		Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
4.2.1	Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45	4,38	101,57
4.2.2	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	77,8	78,04	100,31
		Indeks Rasa Aman	83,31	84,16	101,02

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Bakesbangpol, Satpol PP, Bakesbangpol Kota Madiun

A. Sasaran "Pengurangan Kemiskinan"

Angka Kemiskinan

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2024 bahwa indikator sasaran pengurangan kemiskinan sebesar 4,45. Hal ini juga mengalami penyesuaian target sebagaimana tertuang pada

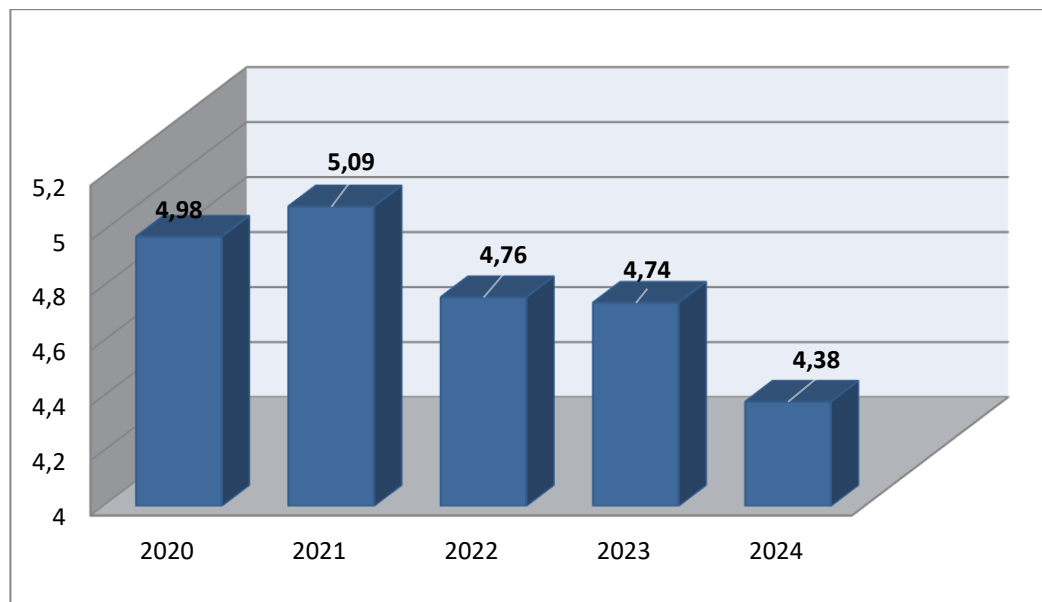
RPJMD Perubahan sebesar 4,43. Hal ini berdasarkan proyeksi penghitungan angka kemiskinan di Kota Madiun.

Tahun 2022 angka kemiskinan turun seiring dengan meningkatnya perekonomian secara global dari 5,09 (9.060 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,76 (8.490 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 514.409,00 menjadi Rp 551.620,00 atau naik sebesar Rp 37.211,00.

Tahun 2023 angka kemiskinan kembali turun dari 4,76 (8.490 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,74 (8.460 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 551.620,00 menjadi Rp 605.131,00 atau naik sebesar Rp 53.511,00.

Tahun 2024 angka kemiskinan kembali turun dari 4,74 (8.460 jumlah penduduk miskin) menjadi 4,38 (7.840 jumlah penduduk miskin) dengan garis kemiskinan naik dari Rp 605.131,00 menjadi Rp 637.838,00 atau naik sebesar Rp 32.707,00.

Gambar III.23 Persentase Angka Kemiskinan Periode 2020-2024



Sumber : BPS Kota Madiun 2024

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah DBHCHT.
3. Bantuan Sosial Air Bersih.
4. Bantuan Sosial Lansia Non Potensial.
5. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
6. Santunan Kematian.
7. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
8. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
9. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
10. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA.

B. Sasaran "Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat"

1. Indeks Kerukunan

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2024 adalah 78,04 dengan kategori sangat tinggi (Harmonis) sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 77,80 dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,69%. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 77,80 dengan kenaikan persentase capaian kinerja sebesar 0,31%.

Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

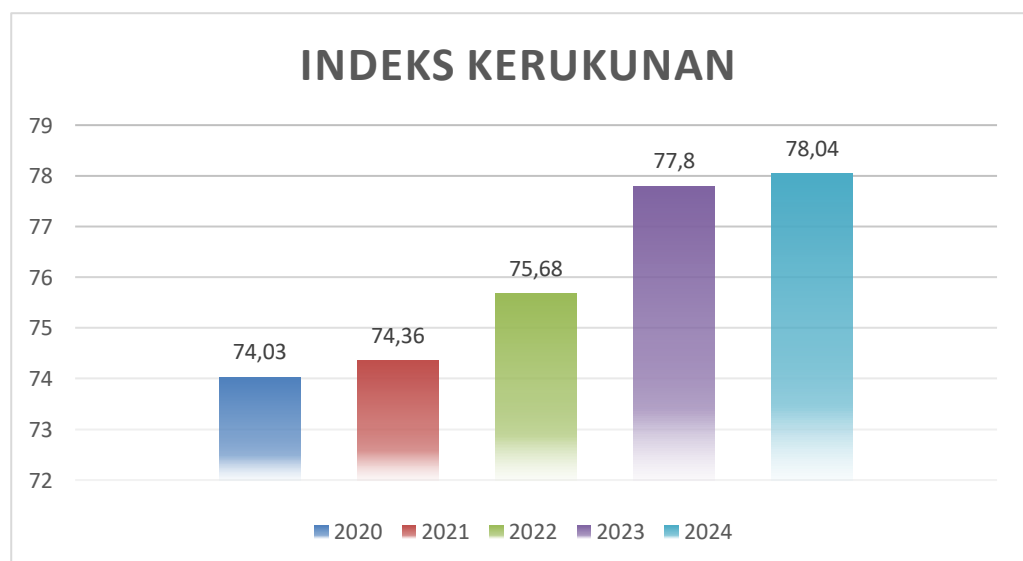
Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi Jejaring Panca Mandala (JPM)
4. Sarasehan Bela Negara
5. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
6. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
7. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat

**Tabel III.24 Data Series Capaian Indeks Kerukunan Kota Madiun
Tahun 2020-2024**



NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI KINERJA
1.	2020	2,77	3,7015 atau 74,0306
2.	2021	74,30	74,36
3.	2022	74,40	75,68
4.	2023	74,46	77,80
5.	2024	77,80	78.04

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Tahun 2024

2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa , harta dan kehormatan. Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan.

Indeks Rasa Aman adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan mereka. Indeks ini mengacu pada bagaimana individu merasa terlindungi dari ancaman atau bahaya, baik itu ancaman fisik, sosial, atau lingkungan. Dalam konteks ini, "rasa aman" dapat meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Keamanan dari Kejahatan

Persepsi masyarakat terhadap tingkat kriminalitas di wilayah tempat tinggal mereka, termasuk kejahatan ringan (seperti pencurian) hingga kejahatan berat (seperti perampokan atau kekerasan).

2. Keamanan Sosial

Ini mencakup rasa aman dalam berinteraksi sosial, tanpa rasa takut diskriminasi, pelecehan, atau intimidasi berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial.

3. Keamanan Lingkungan

Menyentuh rasa aman terkait bencana alam, polusi, atau ancaman lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang bisa membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup masyarakat.

4. Keamanan Ekonomi

Meliputi aspek seperti keamanan pekerjaan, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan jaminan sosial yang mengurangi ketidakpastian ekonomi.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat rasa aman di suatu daerah atau kota antara lain:

1. Tingkat Kriminalitas

Semakin tinggi angka kejahatan di suatu daerah, maka indeks rasa aman cenderung rendah.

2. Keberadaan Aparat Keamanan

Keberadaan polisi atau petugas keamanan lainnya yang responsif dan terlatih dapat meningkatkan rasa aman masyarakat.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali berhubungan dengan ketidakamanan sosial, yang dapat menurunkan rasa aman.

4. Keberadaan Infrastruktur dan Layanan Publik

Ketersediaan fasilitas umum yang aman dan pelayanan yang baik (seperti layanan darurat, sistem transportasi, dsb) dapat meningkatkan rasa aman.

5. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang berfokus pada penegakan hukum, pencegahan kejahatan, dan perbaikan kualitas hidup dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan rasa aman.

Manfaat dari pengukuran Indeks Rasa Aman:

1. Kesejahteraan Sosial

Rasa aman yang tinggi mendukung kesejahteraan masyarakat, karena orang cenderung merasa lebih tenang dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kepercayaan Masyarakat

Indeks rasa aman yang tinggi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, keamanan, dan pemerintahan.

3. Daya Tarik Investasi

Wilayah dengan rasa aman yang tinggi menjadi lebih menarik bagi investor dan pengusaha karena dianggap stabil dan aman untuk beroperasi.

Indeks rasa aman biasanya diukur melalui survei atau kuesioner yang menanyakan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek keamanan. Data ini bisa dikumpulkan oleh lembaga pemerintah, lembaga survei independen, atau organisasi internasional. Responden akan diminta untuk menilai seberapa aman mereka merasa dalam berbagai situasi dan aspek kehidupan, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, atau area publik.

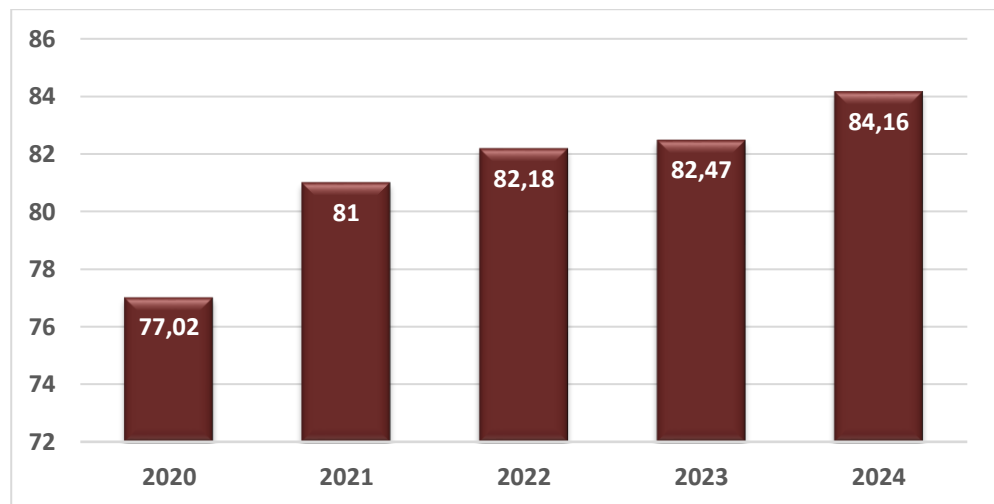
Indeks Rasa Aman di Kota Madiun mencerminkan bagaimana penduduk Kota Madiun merasakan tingkat keamanan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan keamanan di kota tersebut.

Pengukuran Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi.

Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

- a) Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- b) Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- c) Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- d) Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

**Gambar III.31. Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun
Tahun 2020-2024**



Sumber : Satpol PP Kota Madiun

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2024 adalah sebesar 84,16 dengan peringkat “A” dengan predikat “AMAN TERKENDALI”, dilihat dari grafik diatas mulai tahun 2020-2024 nilai indeks mengalami kenaikan tiap tahun. Mulai tahun 2020 mendapatkan nilai 77,02 kemudian tahun 2021 mendapatkan nilai 81 naik 3,98 poin dibanding tahun sebelumnya, untuk tahun 2022 mendapatkan nilai 82,18 dan tahun 2023 mendapatkan nilai 82,47 naik 0,29 poin dari tahun 2022, sedangkan untuk tahun 2024 ini mendapatkan nilai 84,16 naik 1,69 poin dibanding tahun 2023.

Faktor pendorong hasil Indeks Rasa Aman dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu:

1. Patroli rutin dari petugas Satpol PP yang berkoordinasi dengan Polri serta didukung oleh peran serta masyarakat dengan dilakukannya sistem ronda malam di setiap RT/RW di lingkungan Kota Madiun yang turut menjaga keamanan dilingkungan masing-masing.
2. Toleransi dan kerukunan antar kelompok etnis, agama dan golongan di Kota Madiun sehingga meminimalisir terjadinya konflik
3. Penerangan jalan yang cukup di tempat-tempat umum, termasuk jalan-jalan di area perumahan dan pusat kota, dapat mengurangi potensi tindak kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama pada malam hari
4. Keberadaan fasilitas seperti CCTV di area publik, pos keamanan, atau patroli rutin juga memberikan rasa aman kepada warga karena mereka merasa diawasi dan terlindungi
5. Adanya program pengentasan kemiskinan yang efektif, seperti pemberian bantuan sosial dan pelatihan kerja, masyarakat di Kota Madiun dapat memperoleh kehidupan yang lebih stabil dan mengurangi potensi kerawanan sosial
6. Pemberdayaan UMKM, jika Masyarakat secara ekonomi lebih stabil maka tidak terjebak situasi untuk melakukan Tindakan kriminalitas
7. Akses Kesehatan yang merata yang baik ke fasilitas kesehatan dan layanan sosial memberikan rasa aman kepada warga karena mereka tahu bahwa kebutuhan dasar mereka, seperti kesehatan, dapat terpenuhi dengan baik. Ini mengurangi rasa cemas dan meningkatkan stabilitas sosial
8. Adanya kebijakan pemerintah yang memprioritaskan keamanan dan ketertiban umum, seperti peningkatan sarana dan prasarana penunjang keamanan (seperti pos polisi, pencahayaan jalan, dll.), memberikan rasa aman yang lebih besar bagi Masyarakat
9. Penyelesaian masalah social yang proaktif
10. Penegakan peraturan perundang-undangan
11. Pemeliharaan dan perawatan lingkungan serta pengelolaan ruang publik dengan baik

Faktor penghambat yang mempengaruhi Indeks Rasa Aman yaitu:

1. Penyebaran berita negatif di media dapat membuat kekhawatiran/kecemasan bahkan ketakutan di masyarakat
 2. Masih terdapat masyarakat yang enggan melaporkan kejahatan kepada pihak berwajib sehingga data yang dikumpulkan tentang tingkat kriminalitas tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya
 3. Perbedaan persepsi tentang rasa aman karena bersifat obyektif
- Rencana tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan atau peningkatan indeks rasa aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024:
1. Pemerintah Kota Madiun mengambil langkah cepat dalam pemulihan ekonomi dengan menitikberatkan masalah infrastruktur dan peningkatan dukungan ekonomi arus bawah yakni, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
 2. Untuk mewujudkan rasa aman masyarakat memberdayakan 3 pilar; Babinsa, Lurah dan Masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan, karena kejahatan itu ada ditengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat tersebar dimana-mana, sehingga untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Bahkan negara maju juga sedang mengembangkan perpolisian komunitas atau "community policing." Kehadiran Polisi, Tentara dan Lurah sebagai mediator, Fasilitator dan jembatan antara Masyarakat dengan Pemerintah atau sebaliknya.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun tahun 2024, total anggaran belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.306.765.518.143,64. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja operasi sebesar dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja operasi dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis.

**Tabel III.34 Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran dan Efisiensi
Penggunaan Sumber Daya
Atas Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja	(Alokasi Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5=(4/3)x100	6	7	8=5x6	9=8-7
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	80,08	81,03	101,19%	826.406.357.168,64	671.260.397.783,87	836.210.128.888,30	164.949.731.104,43
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,01	3,21	106,64%	6.828.275.669,00	6.142.210.706,00	7.281.981.693,52	1.139.770.987,52
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45	4,57	102,70%	17.889.533.911,00	17.842.025.642,00	18.371.948.308,60	529.922.666,60
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	88,02	88,74	100,82%	35.256.993.259,00	33.959.395.321,00	35.545.394.021,85	1.585.998.700,85
	Indeks Inovasi Daerah	53,96	67,09	120,00%	1.681.866.000,00	1.604.308.049,00	2.018.239.200,00	413.931.151,00
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Indeks Infrastruktur	98,59	98,59	100,00%	138.618.014.922,00	133.400.959.955,11	138.618.014.922,00	5.217.054.966,89
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,93	62,21	107,39%	25.893.916.863,00	24.783.508.878,00	27.807.018.264,24	3.023.509.386,24
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,43	14,54	100,76%	35.646.327.925,00	33.005.974.817,28	35.918.060.154,50	2.912.085.337,22
	Rata-Rata Lama Sekolah	11,67	12,11	103,77%	35.646.327.925,00	33.005.974.817,28	36.990.319.723,37	3.984.344.906,09
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13	75,67	103,47%	84.862.499.199,00	80.198.761.428,00	87.810.000.196,75	7.611.238.768,75
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	77,22	78,94	102,23%	1.721.752.890,00	1.616.963.878,00	1.760.103.252,22	143.139.374,22
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,00	4,3	114,00%	6.516.417.130,00	5.915.223.126,00	7.428.715.528,20	1.513.492.402,20
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	Persentase pertumbuhan PDRB ektor perdagangan	7,98	5,6	70,18%	7.331.573.493,00	7.142.543.880,91	5.144.963.854,74	- 1.997.580.026,17
	Persentase pertumbuhan PDRB ektor jasa	21,57	24,7	114,51%	11.978.062.344,00	11.807.624.752,11	13.716.186.365,17	1.908.561.613,06
Pengurangan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,45	4,38	101,57%	29.478.155.952,00	26.965.490.427,00	29.941.857.281,58	2.976.366.854,58
Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Indeks Kerukunan	77,8	78,04	100,31%	32.086.232.068,00	31.189.050.858,00	32.185.212.732,48	996.161.874,48
	Indeks Rasa Aman	83,31	84,16	101,02%	8.923.211.425,00	7.791.099.193,00	9.014.253.673,36	1.223.154.480,36
					1.306.765.518.143,64	1.127.631.513.512,56	1.325.762.398.060,89	198.130.884.548,33
				Efisiensi = (total 7/total 6) x 100				15,16%

Sumber : Tim LKjIP data diolah

Selain pencapaian kinerja dimaksud Pemerintah Kota Madiun telah mendapatkan penghargaan di tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Penghargaan Kabupaten/Kota (Indonesia Barat) Terbaik (Peringkat I) Kontribusi Konten Audio Visual untuk Dinas Kominfo Kota Madiun dalam Anugerah Media Center (AMC) 2024 Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Penghargaan Top Pembina BUMD 2024 kepada Wali Kota Madiun, Dr. Maidi.
3. Penghargaan Top BUMD Award 2024 kategori BUMD Perumdam Bintang 5 diraih untuk Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun.
4. Penghargaan Top CEO BUMD 2024 kepada Dirut PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto.
5. Predikat WTP untuk LKPD 2023 oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur
6. Rekor MURI Peragaan Busana Kebaya Kartini dengan Catwalk Terpanjang (1.009 meter).
7. Penghargaan Peringkat II Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional dari Provinsi Jawa Timur.
8. Penghargaan Tiga Besar Pemerintah Daerah dengan Transaksi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Tertinggi Provinsi Jawa Timur.
9. Juara 2 Pemerintah Daerah dengan Adoption Rate dan Pemanfaatan PMM Tinggi Versi Januari sampai dengan Mei Provinsi Jawa Timur tahun 2024 oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
10. Penghargaan Digital Government Award 2024 dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Predikat Terbaik Kategori Pemerintah Kota.
11. Penghargaan Kepada Kelurahan Manisrejo sebagai Terbaik Ketiga Lomba Pelaksana Gotong Royong tingkat Jawa Timur dalam puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

12. Penghargaan Kepada Kota Madiun sebagai TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa-Bali terkait Ekosistem Pengendalian Inflasi Terintegrasi Menjaga Ketersediaan Stok dan Keterjangkauan Harga Pangan.
13. Pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dribble bola basket terbanyak dengan 1.223 bola basket.
14. Penghargaan Pemerintah Kabupaten/Kota Atas Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31
15. Penghargaan Dharma Karya Kencana kepada Supriyadi (Ketua Pokja RDK Kampung KB Kapendis Kota Madiun) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
16. Penghargaan Dharma Karya Kencana kepada Sugiharti (Ketua Pokja Kampung KB Sejahtera Kota Madiun) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
17. Penghargaan Top 5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Award 2024 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
18. Penghargaan iBangga Award atas prestasi dan komitmen serta peran aktif dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting 2024 dari Provinsi Jawa Timur.
19. Juara satu grand desain pembangunan kependudukan award tingkat Provinsi Jawa Timur 2024.
20. Penghargaan Kepada PPID Dinas Kominfo Kota Madiun sebagai 10 Instansi Terbaik Program Pariwara Antikorupsi 2024 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
21. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada Wali Kota Madiun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.

22. Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kelurahan Taman oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
23. Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kelurahan Kelun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
24. Penghargaan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Kelurahan Oro-Oro Ombo oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI.
25. Penghargaan Innovative Government untuk Pemerintah Kota Madiun dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024.
26. Penghargaan Innovative Hospital untuk RSUD Kota Madiun dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024.
27. Penghargaan Innovative Corporate untuk PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dalam Jawa Pos Radar Madiun Award 2024.
28. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards dengan cakupan 100 persen.
29. Runner up Kota Paling Berkelanjutan dalam UI Green City Metric.
30. Kota Paling Berkelanjutan dalam Bidang Tata Pamong dalam UI Green City Metric.
31. Penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (Proklim) Tingkat Nasional Kepada Wali Kota Madiun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
32. Penghargaan Trophy Proklim Kategori Lestari untuk Rw 08 Kelurahan Rejomulyo.
33. Penghargaan Sertifikat Proklim Utama untuk Rw 04 Kelurahan Kartoharjo
34. Penghargaan Sertifikat Proklim Utama untuk Rw 08 Kelurahan Demangan.
35. Penghargaan Sertifikat Proklim Utama untuk Rw 03 Kelurahan Patihan.
36. Penghargaan Sertifikat Proklim Utama untuk Rw 02 Kelurahan Madiun Lor.

37. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 10 Kelurahan Winongo.
38. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 11 Kelurahan Nambangan Lor.
39. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 02 Kelurahan Kelun.
40. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 01 Kelurahan Pilangbango.
41. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 06 Kelurahan Tawangrejo.
42. Penghargaan Sertifikat Proklamasi Utama untuk Rw 03 Kelurahan Ngegong.
43. Juara I Best Performance Water Company Kategori Kecil dalam PERPAMSI AWARDS 2024 untuk Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun.
44. Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Kepada Perumda Tirta Taman Sari Kota Madiun atas partisipasi aktif dalam program Gerakan Nasional (GN).
45. Anugerah Pandu Negeri 2024 kategori Gold oleh Indonesia Institute Publik Governance (IIPG) Kepada Pemerintah Kota Madiun sebagai Pemda dengan kinerja dan governansi sangat memuaskan.
46. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.
47. Penganugerahan Paritrana Tahun 2024 tingkat nasional kepada Perumda Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun kategori Badan Usaha Terbaik sektor Perdagangan.
48. Penghargaan kepada Pemerintah Kota Madiun terkait Pencapaian Pemenuhan Kelengkapan Atribut Pada Sembilan Variabel (9/9) untuk Mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
49. Penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk SDN 1 Winongo, SDN Oro-oro Ombo, SDN 02 Nambangan Kidul, SDN 02 Kanigoro, SDN 02 Pandean, SDN 02 Mojorejo, SDN 02 Klegen, SDN 03 Madiun Lor, SMPN 8 Kota Madiun

50. Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional untuk SDN 01 Pandean, SDN 02 Demangan, SDN 02 Josenan, SDN 02 Kartoharjo, SDN 02 Tawangrejo, SDN 03 Taman, SDN 04 Klegen, SDN 04 Manisrejo, SDN Kejuron, SDN Kelun, SDN Rejomulyo, SD Advent Imanuel, MIS Islamiyah 01, MIS Islamiyah 02, MIS Islamiyah 03, MIS Terpadu Bakti Ibu, MIN 2 Kota Madiun, MTSN Kota Madiun
51. Penghargaan Top 5 Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik 2024 KemenPAN-RB untuk Inovasi Profit M-Tech Dinas Kominfo Kota Madiun sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan.
52. Penghargaan Top 5 Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI) Pelayanan Publik 2024 KemenPAN-RB untuk Inovasi Pendekar Berkumis SMPN 11 Kota Madiun sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi.
53. Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Pratama Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Patihan.
54. Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Madya Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Nambangan Lor.
55. Penghargaan Kelurahan Bersih dan Lestari (Berseri) Kategori Mandiri Tingkat Jawa Timur untuk Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Taman.
56. Penghargaan Anugerah Media Humas Terbaik I kategori Kabupaten/Kota tingkat Nasional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
57. Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun sebagai Tiga Besar Daerah dengan kategori TPID kabupaten/kota pantauan IHK Berkinerja terbaik di wilayah Jawa Timur.
58. Penghargaan Terbaik Ketiga kategori Kota/Kabupaten dalam SATA Jatim Award 2024.
59. Penghargaan Terbaik Ketiga Hasil Capaian Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode Pelaporan 2023.

60. Penghargaan Syariah Award 2024 Kepada Kota Madiun sebagai Juara II Kategori Keuangan Sosial Syariah dari Gubernur Jawa Timur.
61. Penghargaan Syariah Award 2024 Kepada Kota Madiun sebagai Juara III Kategori Inovasi di Sektor Ekonomi Syariah dari Gubernur Jawa Timur.
62. Penghargaan Kepada Perpustakaan Cerdas Arum Kelurahan Pangongangan sebagai Inovasi Promosi Layanan Perpustakaan Terbaik Tingkat Nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
63. Penghargaan Kepada Perpustakaan Cerdas Arum Kelurahan Pangongangan sebagai Inovasi dan Kreasi Pelibatan Masyarakat Terbaik Tingkat Nasional dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
64. Peringkat I Pemeringkatan Profil Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2024 dari Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
65. Penghargaan Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif Terbaik Ketiga dengan nilai 97,42 dalam Komisi Informasi (KI) Award 2024.
66. Penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Predikat Baik dari Provinsi Jawa Timur.
67. Penghargaan kepada Kota Madiun kategori Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2024 tingkat Jawa Timur.
68. Penghargaan Juara 3 Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Posyandu Dahlia Kelurahan Kejuron.
69. Penghargaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) tingkat Provinsi Jawa Timur kepada PT INKA Madiun (atas binaan Dinkes PPKB Kota Madiun).
70. Penghargaan Anugerah Guru Prima Terbaik 1 Tingkat Jawa Timur Kepada Ema Rochmawati Guru TK Negeri Pembina.
71. Penghargaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kota Madiun atas Pencapaian sebagai Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang Berperan Aktif Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Gizi Balita Melalui Kegiatan Gemarikan tingkat Jawa Timur.

72. Anugerah Daerah Pelopor Transformasi Digital Pembelajaran kategori Unggul dari Kemendikdasmen.
73. Predikat Kota Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) 2024.
74. Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top Digital Implementation 2024 Level 5 Stars.
75. Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top Leader on Digital Implementation 2024 Kepada Pj. Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto.
76. Penghargaan TOP Digital Awards 2024 kategori Top CIO Digital Implementation 2024 untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah.
77. Penghargaan Juara Harapan 1 Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada Camat Kartoharjo beserta jajaran.
78. Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) kategori Kepala Perangkat Daerah Inovatif Terinovatif VI untuk Kadin Bapelitbangda Kota Madiun.
79. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
80. Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kategori Daya Saing Daerah Tingkat Kota Fiskal Rendah Wilayah Barat dari Kementerian Dalam Negeri bersama Tempo.co.

Terdapat kurang lebih 155 penghargaan untuk yang diterima oleh Pemerintah Kota Madiun di Tahun 2024 ini.

BAB IV

P ENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Madiun berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan 7 (tujuh) indikator. Capaian kinerja dari 7 indikator tujuan adalah 5 indikator tercapai, 1 indikator tidak tercapai yaitu Indeks Gini, 1 indikator belum bisa dihitung capaiannya karena Lembaga penghitung data tidak melakukan penghitungan sehingga angka terakhir hanya sampai dengan tahun 2021 yaitu indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.

Kelima indikator tersebut didukung oleh 11 (sebelas) sasaran dengan 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator tersebut 15 (lima belas) indikator telah melebihi target dan 2 (dua) indikator kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.

B. Permasalahan

Permasalahan pembangunan berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a) masih adanya anak tidak sekolah yang disebabkan bukan karena faktor pembiayaan melainkan disebabkan faktor sosial di keluarga dan lingkungan Masyarakat
- b) Pemerataan kualitas sarana dan prasarana sekolah sesuai SPM perlu ditingkatkan
- c) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
- d) Kualitas SDM tenaga kerja perlu ditingkatkan
- e) adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa dan lulusan magister pun semakin kesulitan memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut.
- f) Kemajuan teknologi yang semakin pesat kini membebani para angkatan kerja untuk mampu beradaptasi. Sayangnya, jika para angkatan kerja tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan mudah ter-PHK dari kesempatan kerja mengingat teknologi kini sudah memasuki seluruh lini kehidupan manusia.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
 - a) Semakin Kota Madiun menjadi Kota Wisata Iconik, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas udara
 - b) 2024 menjadi tahun usaha bagi Kota Madiun, banyak lahan lahan terbuka di jadikan bangunan tempat usaha, sehingga ruang terbuka prifat sangat banyak berkurang, sehingga menyebabkan nilai indeks kualitas lahan tidak bisa optimal
 - c) Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan volume sampah meningkat, kondisi TPA Winongo sudah di ambang batas.
 - d) Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan
 - e) Kurang optimalnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
 - a) Iklim investasi / usaha perlu peningkatan daya saing
 - b) Belum optimalnya kinerja BUMD
 - c) Belum optimalnya daya saing produk dan akses pasar bagi produk UMKM
 - d) Masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana usaha untuk UMKM
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
 - a) Penetapan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dengan arah penerapan RB berdampak yang menyebabkan perubahan pada implementasi RB di Pemerintah Kota Madiun
 - b) Penetapan kebijakan pemberlakuan sistem kerja yang berdampak pada perubahan kebijakan dan penyesuaian sistem kerja

- c) Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
 - d) Terdapat beberapa indikator general baru yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga
 - e) Belum optimalnya harmonisasi Raperda dan Raperkada
 - f) Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral
 - g) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap SOP Unit Pelayanan
 - h) Belum optimalnya pembangunan Zona Integritas
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- a. Masih perlu ditingkatkannya peran FKUB dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat
 - b. Peran tokoh masyarakat dan ulama masih perlu ditingkatkan
 - c. Masih terbatasnya keterlibatan dan pelestarian budaya adat masyarakat

C. Upaya Meningkatkan Kinerja

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

1. Melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a) Dilakukan pendataan terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS)
 - b) Telah dibentuk tim untuk pendataan untuk anak tidak sekolah
 - c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan gedung bangunan sekolah, pemberian bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP, laptop gratis siswa SD dan SMP serta sarana dan prasarana belajar mengajar
 - d) Meningkatkan kualitas pendidikan

- e) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
- f) Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan pendidikan
- g) Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru
- h) Mempertahankan agar tidak ada kematian pada ibu dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan ibu bersalin
- i) Menurunkan kematian bayi dan balita dengan berbagai upaya pelayanan kesehatan untuk bayi dan balita
- j) Menurunkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular dengan meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular
- k) Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, baik itu untuk masalah gizi kurang maupun gizi lebih
- l) Meningkatkan upaya penurunan prevelensi stunting baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif termasuk koordinasi dengan lintas sektor dan audit kasus stunting dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting
- m) Meningkatkan layanan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di semua kelurahan di Kota Madiun sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- n) Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi
- o) Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja untuk

mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja.

- p) Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
 - q) Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - r) Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Infrastruktur Hijau
- a) Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - b) Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
 - c) Optimalisasi penambahan RTH dan Penghijauan Kota oleh Perangkat Daerah terkait
 - d) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3
 - e) Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
 - f) Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - g) Optimalisasi peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
- a. Pengendalian Harga dan Inflasi dengan Operasi Pasar dan kegiatan Tekan Inflasi melalui Subsidi Bahan Pokok Kepada masyarakat (WARTEK Inflasi).

- b. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
 - c. Revitalisasi Pasar dan perbaikan sarana prasarana pasar rakyat sebagai salah satu pusat perdagangan daerah
 - d. Merintis jalur sistem distribusi perdagangan.
 - e. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi daerah
 - f. Mempromosikan produk perdagangan/produk unggulan daerah
 - g. Lebih memanfaatkan sistem informasi manajemen dan teknologi dalam pengelolaan sistem perdagangan contoh: SIM Pasar, E-Retribusi, E- Bakul.
 - h. Menggalakkan Promosi Produk Perdagangan melalui Pameran produk dan Event-event perdagangan serta pelatihan-pelatihan pada pedagang.
 - i. Sosialisasi dan Pembinaan kepada pengusaha terkait kemudahan pengurusan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha sesuai peraturan yang berlaku.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- a) Penetapan peraturan Walikota Nomor Tahun 2023 tentang Sistem Kerja
 - b) Melaksanakan bimtek mengenai pohon kinerja/cascading pada bulan Juni 2024 dalam rangka peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
 - c) Melaksanakan bimtek mengenai SPIP pada bulan Juni 2024
 - d) Melaksanakan upaya-upaya erbaikan menajeen resiko yaitu:
 - e) bimtek mengenai MRI pada bulan Februari 2024
 - f) menyusun rancangan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah pada bulan

- g) menyusun revisi pedoman pengelolaan risiko pada bulan April 2024
- h) Melaksanakan bimtek mengenai MRI Fraud dan kegiatan pencegahan, deteksi dan pemeriksaan pada bulan Februari 2024
- i) Melakukan asistensi Penyusunan Propemperda dan Propemperkada
- j) Melakukan fasilitasi dan harmonisasi Raperda dan Raperkada
- k) Melakukan review, dan evaluasi dilaksanakan tiap semester terkait penyelenggaraan statistik sektoral
- l) Mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional Pengelola PBJ ke BKPSDM Kota Madiun: Usulan kebutuhan fungsional Pengelola PBJ tahun 2024 sebanyak 2 orang. ABK 8 orang, dan keterisian PNS eksisting 6 orang. Hal ini dalam rangka upaya peningkatan indeks tata kelola pengadaan
- m) Pemetaan kompetensi (Assessment) telah dilaksanakan bertahap untuk pegawai mulai dari jenjang JPT, Administrator, Pengawas, Fungsional dan Pelaksana. Dan diperbarui secara berkala apabila telah melebihi masa 3 tahun hasil Assessment nya.
- n) Pemetaan talenta saat ini telah dalam proses penyusunan bagi pegawai yang telah memiliki hasil Assessment
- o) Melakukan pengawasan atas kejelasan informasi terkait SOP pelaksanaan tugas dan Kemudahan untuk mengikuti SOP pada OPD Pelayanan
- p) Melaksanakan pengawasan terhadap obyektifitas Kebijakan Manajemen SDM
- q) Mengoptimalkan sosialisasi pencegahan korupsi (gratifikasi, benturan kepentingan dsb)
- r) Melaksanakan pengawasan ketaatan dan kinerja

- s) Melaksanakan Reviu Pengelolaan UKPB dan Probitry Audit
 - t) Maksimalan perbaikan/revisi peraturan dan aplikasi WBS
 - u) Melakukan evaluasi hasil SKM secara konsisten dan memberikan feed back terhadap hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- a) Rapat koordinasi Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
 - b) Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 - c) Sosialisasi Jejaring Panca Mandala (JPM)
 - d) Sarasehan Bela Negara
 - e) Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
 - f) Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
 - g) Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
 - h) Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di Masyarakat
 - i) Melanjutkan kegiatan patroli wilayah di Kota Madiun dengan berkoordinasi dengan POLRI
 - j) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota secara tegas
 - k) Memberikan sosialisasi Peraturan Daerah yang terkait dengan pelanggaran tantribum kepada masyarakat (Organisasi Dharma Wanita, PKK, masyarakat kelurahan, dan anak sekolah)
 - l) Memberikan pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah secara persuasif dan humanis (contoh: pemberian panggilan dan pembinaan kepada badan usaha yang tidak memiliki izin usaha)
 - m) Melanjutkan sistem ronda malam di RT/RW di Lingkungan Kota Madiun
 - n) Menyelenggarakan advokasi dan kampanye anti kekerasan kepada masyarakat.



- o) Untuk mewujudkan rasa aman masyarakat memberdayakan 3 pilar; Babinsa, Lurah dan Masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan, karena kejahatan itu ada ditengah tengah masyarakat, kemudian masyarakat tersebar dimana-mana, sehingga untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Bahkan negara maju juga sedang mengembangkan perpolisian komunitas atau "community policing." Kehadiran Polisi, Tentara dan Lurah sebagai mediator, Fasilitator dan jembatan antara Masyarakat dengan Pemerintah atau sebaliknya.